



LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH (LPPD)

KABUPATEN KEBUMEN

2024



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
PROVINSI JAWA TENGAH

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalamua'laikum Warohmatullahi Wabarakatuh.

Ucapan rasa syukur atas nikmat dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa sehingga atas ijin-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

Sejalan dengan upaya untuk mewujudkan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) sebagaimana Pasal 69 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 11 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa "*Bupati/Walikota menyampaikan LPPD Kabupaten/Kota Kepada Menteri melalui Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun*".

LPPD memuat satu kesatuan hasil pengukuran kinerja Pemerintah Daerah yang terdiri dari Capaian Kinerja Makro, Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah, Capaian Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang termuat dalam kesesuaian materi. Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sesuai pada ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

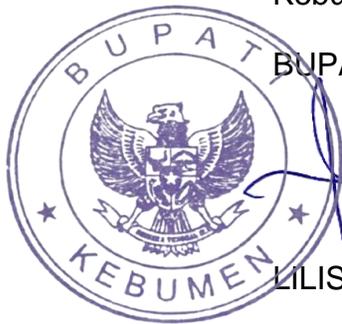
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak atas dukungan dan kerjasama yang diberikan, semoga LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif terhadap pelaksanaan kinerja yang baik serta dapat menjadi bahan evaluasi untuk penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang. Selanjutnya kami menyampaikan permohonan maaf yang setulus-tulusnya apabila dalam penyampaian laporan ini terdapat kekurangan dan kesalahan.

Wassalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Kebumen, 24 Maret 2025

BUPATI KEBUMEN

LILIS NURYANI



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.1.1 Penjelasan Umum.....	2
a. Undang-Undang Pembentukan Daerah	2
b. Data Geografis Wilayah	3
c. Informasi Umum Data Kependudukan	5
d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan	8
e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah.....	10
f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah.....	14
g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah).....	17
1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah	20
a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah	20
b. Visi dan Misi Kepala Daerah	21
c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah.....	23
d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan.....	30
1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal	62
a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen	62
b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen	63
c. Kebijakan Umum.....	64
d. Arah Kebijakan.....	67

BAB II CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH	73
2.1 Capaian Kinerja Makro	73
2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	73
2.1.2 Angka Kemiskinan	75
2.1.3 Tingkat Pengangguran	77
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi	78
2.1.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku	79
2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio	80
2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan	81
2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil	82
2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan	94
2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	97
2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja	98
2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	99
2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya	102
2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah	105
2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai	108
2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja	197
BAB III CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN	263
3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	263
3.1.1 Target Kinerja	263
3.1.2 Realisasi	263
3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota	265
3.2.1 Target Kinerja	265
3.2.2 Realisasi	265
3.3 Permasalahan dan Kendala	265
3.4 Saran dan Tindak Lanjut	265
BAB IV PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL	266
4.1 Urusan Pendidikan	266
4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar	266
4.1.2 Target Pencapaian SPM	266

4.1.3	Anggaran	267
4.1.4	Dukungan Personil	271
4.1.5	Hasil Capaian.....	271
4.1.6	Kendala yang Dihadapi	274
4.2	Urusan Kesehatan	275
4.2.1	Jenis Pelayanan Dasar	275
4.2.2	Target Pencapaian SPM	276
4.2.3	Anggaran	279
4.2.4	Dukungan Personil	282
4.2.5	Hasil Capaian.....	286
4.2.6	Kendala yang Dihadapi	317
4.3	Urusan Pekerjaan Umum	319
4.3.1	Jenis Pelayanan Dasar	319
4.3.2	Target Pencapaian SPM	319
4.3.3	Anggaran	322
4.3.4	Dukungan Personil	324
4.3.5	Hasil Capaian.....	325
4.3.6	Kendala yang Dihadapi	329
4.4	Urusan Perumahan Rakyat	329
4.4.1	Jenis Pelayanan Dasar	329
4.4.2	Target Pencapaian SPM	330
4.4.3	Anggaran	331
4.4.4	Dukungan Personil	332
4.4.5	Hasil Capaian.....	333
4.4.6	Kendala yang Dihadapi	337
4.5	Urusan Trantibumlinmas	337
4.5.1	Jenis Pelayanan Dasar	337
4.5.2	Target Pencapaian SPM	338
4.5.3	Anggaran	340
4.5.4	Dukungan Personil	345
4.5.5	Hasil Capaian.....	345
4.5.6	Kendala yang Dihadapi	352
4.6	Urusan Sosial.....	353
4.6.1	Jenis Pelayanan Dasar	353
4.6.2	Target Pencapaian SPM	353
4.6.3	Anggaran	359
4.6.4	Dukungan Personil	361
4.6.5	Hasil Capaian.....	361
4.6.6	Kendala yang Dihadapi	371

4.7 Program dan Kegiatan	372
BAB V PENUTUP	378
LAMPIRAN	379

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen.....	4
Tabel I.2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen.....	5
Tabel I.3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	6
Tabel I.4 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024	7
Tabel I.5 Jumlah Desa. Kelurahan. RW dan RT Kabupaten Kebumen.....	9
Tabel I.6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen Tahun 2024	14
Tabel I.7 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024* (unaudited)	18
Tabel I.8 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024	32
Tabel I.9 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	58
Tabel I.10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024	61
Tabel I.11 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM	64
Tabel I.12 Integrasi SPM Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026	69
Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen	73
Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil	82
Tabel II.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan.....	94
Tabel II.4 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	97
Tabel II.5 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja	98
Tabel II.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja	99
Tabel II.7 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya.....	102
Tabel II.8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD	105
Tabel II.9 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	109
Tabel II.10 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja	197
Tabel III.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024	264
Tabel III.1 Target Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024	266
Tabel III.2 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	267
Tabel III.3 Rincian Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024	268
Tabel III.4 Dukungan Personel Penerapan SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2024	271
Tabel III.5 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024.....	271
Tabel III.6 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2024	272

Tabel III.7 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2024	273
Tabel III.8 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2024	273
Tabel III.9 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	274
Tabel III.10 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	274
Tabel III.11 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	276
Tabel III.12 Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	279
Tabel III.13 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan	279
Tabel III.14 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	282
Tabel III.15 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024	286
Tabel III.16 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2024	287
Tabel III.17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2024.....	290
Tabel III.18 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2024	292
Tabel III.19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2024	294
Tabel III.20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2024	296
Tabel III.21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2024	300
Tabel III.22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2024.....	302

Tabel III.23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2024	305
Tabel III.24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2024	308
Tabel III.25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2024	310
Tabel III.26 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2024	312
Tabel III.27 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2024.....	314
Tabel III.28 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	317
Tabel III.29 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024	317
Tabel III.30 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	319
Tabel III.31 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	322
Tabel III.32 Rincian Kegiatan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	323
Tabel III.33 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	324
Tabel III.34 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	325
Tabel III.35 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari) Tahun 2024	325
Tabel III.36 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2024	326
Tabel III.37 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	328
Tabel III.38 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024	329

Tabel III.39 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	330
Tabel III.40 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen	331
Tabel III.41 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen	331
Tabel III.42 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	333
Tabel III.43 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen.....	333
Tabel III.44 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2024	333
Tabel III.45 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten) Tahun 2024	334
Tabel III.46 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	335
Tabel III.47 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024	337
Tabel III.48 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024	338
Tabel III.49 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024	340
Tabel III.50 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024	345
Tabel III.51 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen.....	345
Tabel III.52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2024	346
Tabel III.53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2024.....	347
Tabel III.54 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) Tahun 2024	348
Tabel III.55 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) Tahun 2024	349

Tabel III.56 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2024	350
Tabel III.57 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024	352
Tabel III.58 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024	352
Tabel III.59 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024.....	353
Tabel III.60 Alokasi Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024	359
Tabel III.61 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024	359
Tabel III.62 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen	361
Tabel III.63 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024	361
Tabel III.64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024.....	362
Tabel III.65 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024	364
Tabel III.66 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024	366
Tabel III.67 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2024.....	368
Tabel III.68 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2024	369
Tabel III.69 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024	371
Tabel III.70 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024	371

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen	3
Gambar I.2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen.....	4
Gambar II.1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2021 – 2024.....	74
Gambar II.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen, 2015- 2024	75
Gambar II.3 Indeks Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2024	76
Gambar II.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen, 2022 – 2024.....	78
Gambar II.5 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) Tahun 2019 – 2023.....	79
Gambar II.6 Perhitungan Efisiensi Anggaran.....	108

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Penyusunan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) adalah laporan yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. LPPD merupakan salah satu laporan yang wajib yang disusun dan disampaikan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 69 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Beberapa dasar hukum lainnya yang mendasari penyusunan LPPD ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kabupaten Kebumen yang merupakan salah satu kabupaten di Indonesia juga berkewajiban untuk menyusun LPPD. Penyusunan LPPD Kabupaten Kebumen dilakukan oleh tim penyusun LPPD dan telah dilakukan reviu oleh tim pereviu. LPPD Kabupaten Kebumen juga telah memenuhi persyaratan bahwa paling lambat diserahkan 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir dan dokumen LPPD yang telah dibuat dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. Penyusunan LPPD ini dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan seluruh data dan informasi yang dimasukkan ke dalam LPPD disusun berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, akurasi dan objektif.

Dokumen LPPD Kabupaten Kebumen ini berisi satu kesatuan hasil pengukuran kinerja pemerintah daerah yang terdiri atas data-data capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang memuat capaian kinerja makro, capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, capaian akuntabilitas kinerja pemerintah daerah, laporan penerapan standar pelayanan minimal yang memuat hasil capaian penerapan standar pelayanan minimal, kendala penerapan standar pelayanan minimal dan ketersediaan anggaran dalam penerapan standar pelayanan minimal. Selain beberapa hal tersebut, LPPD juga memuat capaian kinerja pelaksanaan tugas pembantuan baik yang diberikan oleh provinsi ataupun pemerintah pusat. LPPD Kabupaten Kebumen disampaikan oleh Bupati Kebumen kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.1.1 Penjelasan Umum

a. Undang-Undang Pembentukan Daerah

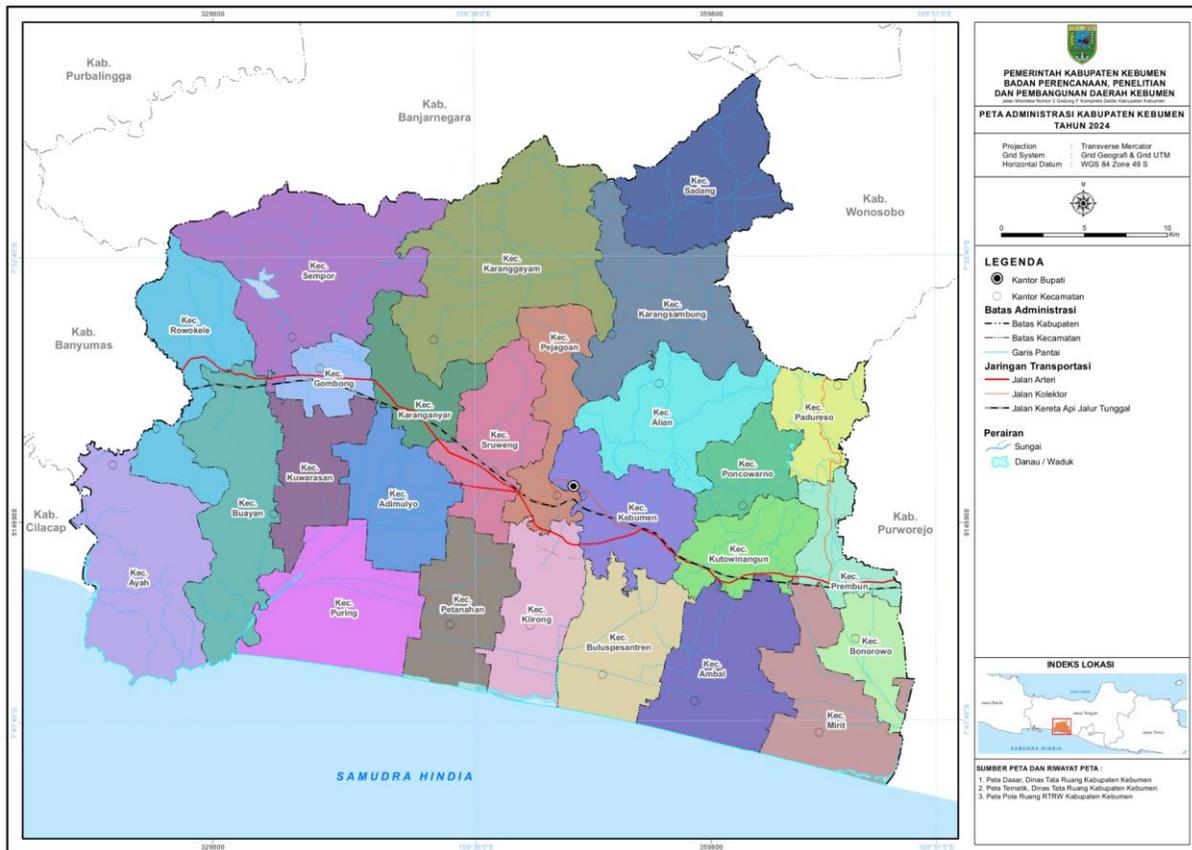
1. Pembentukan dan penyelenggaraan urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kebumen mendasari:
2. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 15 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
13. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024; dan
14. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024.

b. Data Geografis Wilayah

Secara geografis Kabupaten Kebumen terletak di antara 7°27’-7°50’ Lintang Selatan dan 109°22’-109°50’ Bujur Timur. Secara administratif Kabupaten Kebumen berbatasan dengan (Gambar 1.1):

- Sebelah timur Kabupaten Purworejo
- Sebelah selatan Samudera Hindia
- Sebelah barat Kabupaten Cilacap dan Banyumas, serta
- Sebelah utara Kabupaten Banjarnegara dan Wonosobo.

Luas wilayah Kabupaten Kebumen sebesar 128.111,50 hektar atau 1.281,115 kilometer persegi. Dilihat dari kondisi/kawasan, Kabupaten Kebumen secara garis besar terdiri dari 3 (tiga) klaster wilayah, yaitu wilayah pegunungan yang terletak di bagian utara wilayah, wilayah dataran rendah yang terletak di bagian tengah, serta wilayah pantai yang terletak di bagian selatan. Ketinggiannya berkisar antara 0-997,5 meter di atas permukaan laut.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Gambar I.1 Peta Administrasi Kabupaten Kebumen

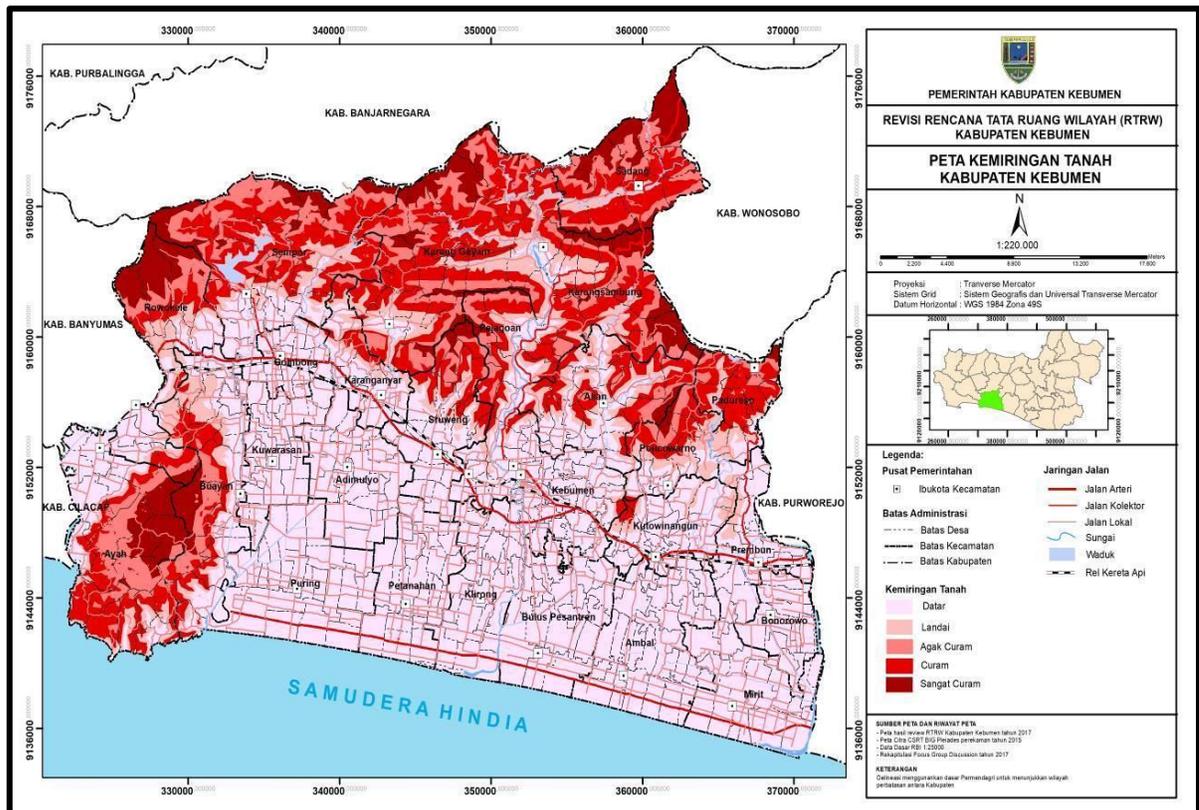
Dilihat dari kondisi topografinya, wilayah Kabupaten Kebumen terdiri atas pantai, dataran rendah dan kawasan perbukitan dengan ketinggian permukaan antara 0 s.d. 997,5 meter. Berdasarkan letak ketinggian dari permukaan air laut dibagi menjadi 6 tingkatan, sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini:

Tabel I.1 Ketinggian Tanah dari Permukaan Laut di Kabupaten Kebumen

No	Ketinggian	Luas (Ha)	Persentase (%)
1	0-7 meter	26.378,15	20,59
2	7-18 meter	22.163,28	17,30
3	18-25 meter	15.360,36	11,69
4	25-100 meter	23.316,29	18,20
5	100-500 meter	40.111,17	31,31
6	500-997,5 meter	781,71	0,61

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2017

1. Kemiringan tanah di wilayah Kabupaten Kebumen dikelompokkan dalam 4 (empat) tingkatan yaitu:
2. Kemiringan 0-2%, meliputi lebih dari separuh wilayah Kabupaten Kebumen yaitu kurang lebih seluas 66.953,16 hektar atau sekitar 52,26%;
3. Kemiringan 2-15%, meliputi luas wilayah sekitar 5.944,37 hektar atau 4,64% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen;
4. Kemiringan 15-40%, meliputi luas wilayah sekitar 21.919,37 hektar atau 17,11% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen; dan
5. Kemiringan lebih dari 40%, meliputi luas wilayah sekitar 33.294,6 hektar atau 25,99% dari luas wilayah Kabupaten Kebumen.



Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, Peta Revisi RTRW, 2024

Gambar I.2 Peta Topografi Kabupaten Kebumen

Secara Hidrogeologis, Sumber air di Kabupaten Kebumen terdiri dari air permukaan dan air tanah. Air permukaan adalah air yang muncul atau mengalir di permukaan. Jenis air permukaan yang ada di wilayah Kabupaten Kebumen yakni sungai, rawa, mata air, dan air waduk yang banyak dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat sehari-hari termasuk untuk keperluan irigasi pertanian. Sedangkan air tanah adalah semua air yang terdapat pada lapisan pengandung air (akuifer) di bawah permukaan tanah. Potensi air tanah di Kabupaten Kebumen berdasarkan data dari Direktorat Geologi Tata Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral adalah sebesar 5,7 juta m²/tahun. Air tanah dibagi menjadi dua yakni air tanah dangkal dan air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah yang umum digunakan oleh masyarakat sebagai sumber air bersih berupa sumur-sumur. Salah satu jenis air tanah dalam adalah Cekungan Air Tanah. Kabupaten Kebumen memiliki tiga cekungan tanah yang meliputi Cekungan Air Tanah Banyumudal, Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo dan Cekungan Air Tanah Kroya. Persebaran cekungan air tanah di Kabupaten Kebumen adalah sebagai berikut:

Tabel I.2 Persebaran Cekungan Air Tanah di Kabupaten Kebumen

No	Cekungan Air Tanah	Lokasi
1	Cekungan Air Tanah Banyumudal	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah dan Buayan.
2	Cekungan Air Tanah Kebumen Purworejo	Sebagian wilayah Kecamatan Gombong, Buayan, Karanganyar, Kuwarasan, Puring, Adimulyo, Sruweng, Petanahan, Klirong, Alian, Kebumen, Buluspesantren, Kutowinangun, Ambal, Mirit, Prembun, Bonorowo, Poncowarno dan Padureso.
3	Cekungan Air Tanah Kroya	Sebagian wilayah Kecamatan Ayah.

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

c. Informasi Umum Data Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.446.833 jiwa, tumbuh sebesar 0,89% dari tahun 2023. Berdasarkan proyeksi penduduk tahun 2024, jumlah penduduk laki-laki sebanyak 734.040 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 712.793 jiwa. Adapun secara terperinci jumlah penduduk di Kabupaten Kebumen berdasarkan jenis kelamin tahun 2024 sebagaimana data berikut ini:

Tabel I.3 Komposisi Jumlah Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
1	33.05.01	AYAH	34.796	50,70%	33.831	49,27%	68.627	4,74%
2	33.05.02	BUAYAN	35.835	51,06%	34.349	49,30%	70.184	4,85%
3	33.05.03	PURING	34.298	50,70%	33.348	48,94%	67.646	4,68%
4	33.05.04	PETANAHAN	32.436	50,58%	31.697	49,30%	64.133	4,43%
5	33.05.05	KLIRONG	34.396	50,70%	33.441	49,42%	67.837	4,69%
6	33.05.06	BULUSPESANTREN	31.849	50,94%	30.674	49,30%	62.523	4,32%
7	33.05.07	AMBAL	34.068	50,92%	32.842	49,06%	66.910	4,62%
8	33.05.08	MIRIT	28.943	50,79%	28.038	49,08%	56.981	3,94%
9	33.05.09	PREMBUN	15.298	50,28%	15.129	49,21%	30.427	2,10%
10	33.05.10	KUTOWINANGUN	25.687	50,74%	24.942	49,72%	50.629	3,50%
11	33.05.11	ALIAN	36.491	50,94%	35.142	49,26%	71.633	4,95%
12	33.05.12	KEBUMEN	69.456	50,59%	67.836	49,06%	137.292	9,49%
13	33.05.13	PEJAGOAN	29.567	50,87%	28.554	49,41%	58.121	4,02%
14	33.05.14	SRUWENG	32.787	50,48%	32.166	49,13%	64.953	4,49%
15	33.05.15	ADIMULYO	19.660	49,97%	19.682	49,52%	39.342	2,72%
16	33.05.16	KUWARASAN	27.350	50,98%	26.301	50,03%	53.651	3,71%
17	33.05.17	ROWOKELE	27.451	50,60%	26.798	49,02%	54.249	3,75%
18	33.05.18	SEMPOR	37.397	50,81%	36.198	49,40%	73.595	5,09%
19	33.05.19	GOMBONG	25.377	49,89%	25.492	49,19%	50.869	3,52%
20	33.05.20	KARANGANYAR	19.537	50,505	19.153	50,11%	38.690	2,67%
21	33.05.21	KARANGGAYAM	32.331	51,16%	30.859	49,50%	63.190	4,37%
22	33.05.22	SADANG	12.446	51,43%	11.753	48,84%	24.199	1,67%
23	33.05.23	BONOROWO	11.662	50,95%	11.225	48,57%	22.887	1,58%
24	33.05.24	PADURESO	8.909	50,64%	8.683	49,05%	17.592	1,22%
25	33.05.25	PONCOWARNO	10.104	50,90%	9.746	49,36%	19.850	1,37%
26	33.05.26	KARANGSAMBUNG	25.909	50,98%	24.914	49,10%	50.823	3,51%

No	Kecamatan		Laki-Laki		Perempuan		Jumlah Total	
	Kode	Nama	Jumlah	%	Jumlah	%	Jumlah	%
Jumlah			734.040	50,73%	712.793	49,27	1.446.833	100

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2024

Berdasarkan data di atas terlihat bahwa Kecamatan Kebumen merupakan Kecamatan dengan jumlah penduduk yang terbesar dengan jumlah 137.292 jiwa atau 9,49% dari seluruh jumlah penduduk Kabupaten Kebumen. sedangkan jumlah penduduk yang terkecil adalah Kecamatan Padureso dengan jumlah penduduk sebanyak 17.592 jiwa atau 1,22% dari jumlah penduduk Kabupaten Kebumen.

2. Pertumbuhan Penduduk

Angka Pertambahan Penduduk adalah besaran persentase perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan dengan jumlah penduduk pada waktu sebelumnya. Secara rinci data pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel I.4 Angka Pertumbuhan Penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2023	2024	
1	Ayah	68.007	68.627	0,91%
2	Buayan	69.528	70.184	0,94%
3	Puring	66.857	67.646	1,18%
4	Petanahan	63.433	64.133	1,10%
5	Klirong	67.129	67.837	1,05%
6	Buluspesantren	61.890	62.523	1,02%
7	Ambal	66.327	66.910	0,88%
8	Mirit	56.283	56.981	1,24%
9	Prembun	30.160	30.427	0,89%
10	Kutowinangun	50.189	50.629	0,88%
11	Alian	70.726	71.633	1,28%
12	Kebumen	136.446	137.292	0,62%
13	Pejagoan	57.627	58.121	0,86%

No	Kecamatan	Jumlah		Pertumbuhan Penduduk
		2023	2024	
14	Sruweng	64.246	64.953	1,10%
15	Adimulyo	39.053	39.342	0,74%
16	Kuwarasan	53.252	53.651	0,75%
17	Rowokele	53.832	54.249	0,77%
18	Sempor	72.871	73.595	0,99%
19	Gombong	50.707	50.869	0,32%
20	Karanganyar	38.560	38.690	0,34%
21	Karanggayam	62.700	63.190	0,78%
22	Sadang	24.068	24.199	0,54%
23	Bonorowo	22.691	22.887	0,86%
24	Padureso	17.457	17.592	0,77%
25	Poncowarno	19.624	19.850	1,15%
26	Karangsambung	50.360	50.823	0,92%
Jumlah		1.434.023	1.446.833	0,89%

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. 2024

Tabel 1.7 menunjukkan bahwa angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kebumen Tahun 2024 adalah sebesar 0,89%. Data ini merupakan data hasil pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen. Dengan angka pertumbuhan tersebut di atas perlu diperhatikan adanya kemungkinan terjadinya masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

d. Jumlah Kecamatan, Desa dan Kelurahan

Kabupaten Kebumen terdiri atas 26 kecamatan, 449 desa dan 11 kelurahan dengan jumlah Rukun Warga (RW) sebanyak 1.930 dan 7.127 Rukun Tetangga (RT). Berdasarkan data yang dipublikasikan melalui portal gis.dukcapil.kemendagri.go.id Tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Kebumen per 30 Juni 2024 adalah 1.441.425 jiwa terdiri dari laki-laki sebanyak 731.216 jiwa dan perempuan sebanyak 710.209 jiwa. Kecamatan terluas adalah Kecamatan Karanggayam dengan total luas 109,29 km² atau 8,53% dan Kecamatan Sempor dengan luas 100,15 km² atau 7,82% dari keseluruhan luas Kabupaten Kebumen, sedangkan kecamatan dengan luas terkecil adalah Kecamatan Gombong yaitu 19,48 km².

Tabel I.5 Jumlah Desa, Kelurahan, RW dan RT Kabupaten Kebumen

NO.	KECAMATAN	JUMLAH			
		DESA	KELURAHAN	RW	RT
1	Ayah	18	0	81	396
2	Buayan	20	0	90	341
3	Puring	23	0	98	318
4	Petanahan	21	0	81	258
5	Klirong	24	0	107	318
6	Buluspesantren	21	0	82	386
7	Ambal	32	0	113	313
8	Mirit	22	0	70	265
9	Bonorowo	11	0	42	139
10	Prembun	13	0	40	130
11	Padureso	9	0	23	86
12	Kutowinangun	19	0	80	241
13	Alian	16	0	73	254
14	Poncowarno	11	0	34	100
15	Kebumen	24	5	138	554
16	Pejagoan	13	0	64	257
17	Sruweng	21	0	97	332
18	Adimulyo	23	0	81	227
19	Kuwarasan	22	0	86	247
20	Rowokele	11	0	61	294
21	Sempor	16	0	74	368
22	Gombong	12	2	81	288
23	Karanganyar	7	4	61	242
24	Karanggayam	19	0	76	390
25	Sadang	7	0	35	131
26	Karangsambung	14	0	62	252
	Total	449	11	1.930	7.127

e. Rincian Perangkat Daerah dan Unit Kerja Perangkat Daerah serta Dasar Hukum Pembentukan Perangkat Daerah

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
1	Sekretariat Daerah	Perbup Nomor 108 Tahun 2021
2	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	Perbup Nomor 109 Tahun 2021
3	Inspektorat Daerah	Perbup Nomor 110 Tahun 2021
4	Dinas Kesehatan. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Perbup Nomor 56 Tahun 2023
	Rumah Sakit Umum Daerah	Perbup Nomor 134 Tahun 2021
	Pusat Kesehatan Masyarakat	Perbup Nomor 135 Tahun 2021
	UPTD Klinik Pengobatan Penyakit Paru	Perbup Nomor 136 Tahun 2021
	UPTD Laboratorium Kesehatan	Perbup Nomor 137 Tahun 2021
5	Dinas Pendidikan. Kepemudaan dan Olahraga	Perbup Nomor 112 Tahun 2021
	Satuan Pendidikan	Perbup Nomor 138 Tahun 2021
6	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Perbup Nomor 113 Tahun 2021
	UPTD Pengawasan Bangunan. Pemeliharaan Jalan dan Jembatan	Perbup Nomor 139 Tahun 2021
	UPTD Pemeliharaan Jaringan Irigasi	Perbup Nomor 140 Tahun 2021
7	Dinas Perumahan Rakyat. Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Perbup Nomor 22 Tahun 2024
8	Satuan Polisi Pamong Praja	Perbup Nomor 115 Tahun 2021
9	Dinas Sosial. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Perbup Nomor 116 Tahun 2021
	UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak	Perbup Nomor 70 Tahun 2024

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
10	Dinas Tenaga Kerja	Perbup Nomor 117 Tahun 2021
	UPTD Balai Latihan Kerja	Perbup Nomor 141 Tahun 2021
11	Dinas Pertanian dan Pangan	Perbup Nomor 118 Tahun 2021
12	Dinas Perindustrian. Perdagangan. Koperasi. Usaha Kecil dan Menengah	Perbup Nomor 119 Tahun 2021
	UPTD Pasar	Perbup Nomor 142 Tahun 2021
	UPTD Metrologi Legal	Perbup Nomor 143 Tahun 2021
	UPTD Pengelolaan Kawasan PKL Alun-Alun Kebumen	Perbup Nomor 23 Tahun 2024
13	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Perbup Nomor 120 Tahun 2021
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Perbup Nomor 121 Tahun 2021
15	Dinas Komunikasi dan Informatika	Perbup Nomor 122 Tahun 2021
16	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Perbup Nomor 123 Tahun 2021
17	Dinas Lingkungan Hidup. Kelautan dan Perikanan	Perbup Nomor 124 Tahun 2021
	UPTD Laboratorium Lingkungan	Perbup Nomor 144 Tahun 2021
	UPTD Pengelolaan Air Limbah dan Sampah	Perbup Nomor 145 Tahun 2021
18	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Perbup Nomor 125 Tahun 2021
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perbup Nomor 126 Tahun 2021
20	Badan Perencanaan. Penelitian dan Pengembangan	Perbup Nomor 127 Tahun 2021
21	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Perbup Nomor 128 Tahun 2021

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
22	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	Perbup Nomor 129 Tahun 2021
23	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	Perbup Nomor 130 Tahun 2021
24	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Perbup Nomor 131 Tahun 2021
25	Kecamatan Adimulyo	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
26	Kecamatan Alian	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
27	Kecamatan Ambal	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
28	Kecamatan Ayah	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
29	Kecamatan Bonorowo	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
30	Kecamatan Buayan	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
31	Kecamatan Buluspesantren	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
32	Kecamatan Gombong	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	Kelurahan Gombong	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Wonokriyo	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
33	Kecamatan Karanganyar	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	Kelurahan Karanganyar	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Plarangan	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Panjatan	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Jatiluhur	Perbup Nomor 87 Tahun 2016

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
34	Kecamatan Karanggayam	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
35	Kecamatan Karangsembung	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
36	Kecamatan Kebumen	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
	Kelurahan Kebumen	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Bumirejo	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Panjer	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Tamanwinangun	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
	Kelurahan Selang	Perbup Nomor 87 Tahun 2016
37	Kecamatan Klirong	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
38	Kecamatan Kutowinangun	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
39	Kecamatan Kuwarasan	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
40	Kecamatan Mirit	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
41	Kecamatan Padureso	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
42	Kecamatan Pejagoan	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
43	Kecamatan Petanahan	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
44	Kecamatan Poncowarno	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
45	Kecamatan Prembun	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
46	Kecamatan Puring	Perbup Nomor 86 Tahun 2016

No	Nama Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah	Dasar Hukum
47	Kecamatan Rowokele	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
48	Kecamatan Sadang	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
49	Kecamatan Sempor	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
50	Kecamatan Sruweng	Perbup Nomor 86 Tahun 2016
51	Staf Ahli Bupati	Perbup Nomor 88 Tahun 2016

f. Rincian Aparatur Sipil Negara berdasarkan Urusan Pemerintahan, Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan, Fungsi Pengawasan dan Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan yang berada di Setiap Perangkat Daerah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, jumlah Perangkat Daerah di Kabupaten Kebumen terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, 16 (enam belas) Dinas, 5 (lima) Badan, dan 26 Kecamatan. Adapun jumlah Pegawai Negeri Sipil yang tersebar pada perangkat daerah tersebut sampai dengan 31 Desember 2024 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel I.6 Jumlah Perangkat Daerah dan ASN Kabupaten Kebumen
Tahun 2024

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
1.	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	7	12	21	40
2.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	7	6	10	23
3.	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	7	3	8	18
4.	Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah	21	3	47	71

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
5.	Badan Perencanaan dan Penelitian dan Pengembangan Daerah	7	10	12	29
6.	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	6	7	6	19
7.	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	7	12	13	32
8.	Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	37	1574	303	1914
9.	Dinas Komunikasi dan Informatika	6	7	9	22
10.	Dinas Lingkungan Hidup, Kelautan dan Perikanan	12	16	78	106
11.	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	7	6	33	46
12.	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	19	10	147	176
13.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	6	13	9	28
14.	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2	8	6	16
15.	Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga	14	4756	2916	7686
16.	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	14	9	62	85
17.	Dinas Pertanian dan Pangan	8	81	89	178
18.	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	10	6	24	40
19.	Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	7	8	10	25

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
20.	Dinas Tenaga Kerja	7	24	7	38
21.	Inspektorat Daerah	9	34	11	54
22.	Satuan Polisi Pamong Praja	12	13	17	42
23.	Sekretariat Daerah	20	43	73	136
24.	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	8	3	14	25
25.	Kecamatan Adimulyo	7	2	8	17
26.	Kecamatan Alian	7	2	7	16
27.	Kecamatan Ambal	6	2	7	15
28.	Kecamatan Ayah	8	2	9	19
29.	Kecamatan Bonorowo	7	1	8	16
30.	Kecamatan Buayan	7	2	9	18
31.	Kecamatan Buluspesantren	6	2	6	14
32.	Kecamatan Gombong	15	2	11	28
33.	Kecamatan Karanganyar	24	2	12	38
34.	Kecamatan Karanggayam	8	2	6	16
35.	Kecamatan Karangsembung	8	1	11	20
36.	Kecamatan Kebumen	31	1	16	48
37.	Kecamatan Klirong	7	2	5	14
38.	Kecamatan Kutowinangun	7	1	8	16

NO	Perangkat Daerah	Rincian ASN			TOTAL
		Struktural	Fungsional	Pelaksana	
39.	Kecamatan Kuwarasan	8	2	6	16
40.	Kecamatan Mirit	6	2	7	15
41.	Kecamatan Padureso	7	2	6	15
42.	Kecamatan Pejagoan	5	2	7	14
43.	Kecamatan Petanahan	6	2	9	17
44.	Kecamatan Poncowarno	8	2	5	15
45.	Kecamatan Prembun	6	2	8	16
46.	Kecamatan Puring	8	2	7	17
47.	Kecamatan Rowokele	8	2	7	17
48.	Kecamatan Sadang	7	2	8	17
49.	Kecamatan Sempor	7	2	8	17
50.	Kecamatan Sruweng	6	2	9	17
	JUMLAH	490	6.712	4.135	11.337

Sumber: BKPSDM Kabupaten Kebumen. 2024

g. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Memuat Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran Menurut Urusan Pemerintahan Daerah)

Penetapan kebijakan umum keuangan daerah meliputi penetapan kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan yang mengacu pada upaya pencapaian sasaran pembangunan yang ingin dicapai dengan asumsi-asumsi perkembangan kondisi makro ekonomi daerah. Undang-undang 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) didesain untuk memperkuat desentralisasi fiskal guna mewujudkan pemerataan layanan dan kesejahteraan masyarakat.

Mendasari hal tersebut diatas realisasi pendapatan daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai Rp.3.131.071.255.386,00* dari target sebesar Rp.3.062.696.919.000,00

atau sebesar 102,33%*, capaian realisasi pendapatan daerah pada tahun 2024 juga mengalami pertumbuhan sejumlah Rp.230.049.745.665,00* atau sebesar 7,93%* bila dibandingkan dengan realisasi pendapatan daerah tahun 2023 Rp.2.901.021.509.721,00.

Sementara itu realisasi belanja daerah Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai Rp.3.115.014.330.258,00* dari target sebesar Rp. 3.237.537.144.000,00 atau sebesar 96,22%*, capaian belanja daerah tersebut mengalami pertumbuhan sejumlah Rp.137.872.415.429,00* atau sebesar 4,63%* bila dibandingkan dengan realisasi belanja daerah pada tahun 2023 Rp.2.977.141.914.829,00

APBD Kabupaten Kebumen ditutup dengan mencatatkan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp.191.022.871.005,98. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 selengkapnya dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel I.7 Realisasi APBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024* (unaudited)

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	BELANJA DAERAH	3.237.537.144.000	3.115.014.330.258	96,22
I	BELANJA OPERASI	2.240.808.596.285	2.134.525.599.246	95,26
1	Belanja Pegawai	1.253.846.431.851	1.187.615.334.962	94,72
2	Belanja Barang dan Jasa	827.393.106.434	790.209.428.632	95,51
3	Belanja Subsidi	1.450.000.000	1.447.997.750	99,86
4	Belanja Hibah	147.997.946.000	145.372.917.402	98,23
5	Belanja Bantuan Sosial	10.121.112.000	9.879.920.500	97,62
II	BELANJA MODAL	288.393.970.715	278.316.622.550	96,51
1	Belanja Modal Tanah	5.633.135.000	5.547.762.848	98,48
2	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	120.419.785.636	117.600.488.966	97,66
3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	41.747.023.424	40.226.975.917	96,36
4	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	105.852.413.000	102.857.035.252	97,17
5	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	14.701.613.655	12.044.972.327	81,93
III	BELANJA TIDAK TERDUGA	2.000.000.000	323.000.000	16,15
1	Belanja Tidak Terduga	2.000.000.000	323.000.000	16,15
IV	BELANJA TRANSFER	706.334.577.000	701.849.108.462	99,36
1	Belanja Bagi Hasil	16.002.191.000	15.934.319.925	99,58
2	Belanja Bantuan Keuangan	690.332.386.000	685.914.788.537	99,36

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
	PENDAPATAN			
V	PENDAPATAN ASLI DAERAH			
1	Pajak Daerah	142.880.000.000	139.439.551.572	97,59
2	Retribusi Daerah	34.328.188.000	33.227.714.159	96,79
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	21.751.620.000	21.856.399.056	100,48
4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	268.233.162.000	283.470.518.314	105,68
	JUMLAH (V)	467.192.970.000	477.994.183.101	102,31
VI	PENDAPATAN TRANSFER			
1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	2.327.121.395.000	2.366.169.012.472	101,68
2	Pendapatan Transfer Antar Daerah	268.282.554.000	268.345.050.813	100,02
3	Bantuan Keuangan	87.514.800.000	86.528.970.500	98,87
	JUMLAH (VI)	2.595.403.949.000	2.634.514.063.285	101,51
VII	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH			
1	Pendapatan Hibah	100.000.000	18.563.009.000	18.563,01
2	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
	JUMLAH (VII)	100.000.000	18.563.009.000	18.563,01
VIII	PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	179.440.225.000	179.270.945.877.98	99,91
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya	164.691.485.000	164.691.485.877.98	100
2	Pencairan Dana Cadangan	12.648.740.000	12.774.460.000	100,99
3	Penerimaan kembali Pemberian Pinjaman	2.100.000.000	1.805.000.000	85,95
IX	PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	4.600.000.000	4.305.000.000	93,59
1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	0
2	Penyertaan Modal Daerah	2.500.000.000	2.500.000.000	100

NO	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
3	Pemberian Pinjaman Daerah	2.100.000.000	1.805.000.000	85,95
X	PEMBIAYAAN NETTO	174.840.225.000	174.965.945.877.98	100,07

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024*

1.1.2 Perencanaan Pembangunan Daerah

a. Permasalahan Strategis Pemerintah Daerah

1) Isu Strategis Pembangunan Daerah

Isu strategis pembangunan daerah merupakan permasalahan utama daerah yang berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 serta prioritas kebijakan nasional dan provinsi yang bersifat mandatori. Adapun Isu strategis permasalahan daerah Kabupaten Kebumen tahun 2024, adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Pelayanan Publik
2. Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Kestabilan Ekonomi
4. Pengembangan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi dan kemampuan adaptasi terhadap perubahan iklim.
5. Fasilitasi pelaksanaan Pemilu/ Pemilukada dan kesiapsiagaan terhadap bencana

2) Prioritas Pembangunan Kabupaten Kebumen

Berpedoman pada RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, telah dirumuskan arah kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 yaitu **“Pemantapan dan Pengembangan Kualitas Infrastruktur dalam Rangka Peningkatan Sektor Pertanian, Industri dan Jasa melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik serta Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia”** yang selanjutnya menjadi Tema Pembangunan Kabupaten Kebumen Tahun 2024. Tema tersebut selanjutnya dijabarkan kedalam prioritas pembangunan daerah sebagaimana berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia;
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan;
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim; dan
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana.

Penjabaran lebih lanjut dari 5 (lima) prioritas pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 akan dicapai melalui fokus pada upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan tata kelola dan kinerja organisasi;
 - b. peningkatan pengelolaan data pembangunan;
 - c. peningkatan akuntabilitas dan kemandirian keuangan daerah; dan
 - d. peningkatan tata kelola dan layanan SPBE.
2. Peningkatan kualitas sumber daya manusia. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan dalam rangka pemenuhan SPM Kesehatan;
 - b. peningkatan upaya pencegahan stunting;
 - c. peningkatan aksesibilitas dan mutu Pendidikan; dan
 - d. peningkatan perlindungan perempuan dan anak.
3. Peningkatan stabilitas ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan penanggulangan kemiskinan. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan nilai tambah sektor pertanian, perikanan dan kelautan;
 - b. peningkatan skala ekonomi koperasi, industri/usaha mikro, kecil dan menengah;
 - c. pengembangan industri pariwisata dan ekonomi kreatif;
 - d. peningkatan sektor perdagangan dalam rangka menjaga distribusi. pasokan dan ketersediaan barang;
 - e. peningkatan investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja;
 - f. penguatan ketahanan pangan; dan
 - g. peningkatan integrasi program dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
4. Pemantapan dan pengembangan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi serta peningkatan adaptasi perubahan iklim. dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan konektivitas infrastruktur jalan kabupaten pendukung ekonomi;
 - b. peningkatan konektivitas infrastruktur sumber daya air;
 - c. peningkatan cakupan pelayanan air bersih perpipaan;
 - d. peningkatan kelayakan hunian;
 - e. pengembangan sistem transportasi publik; dan
 - f. peningkatan kualitas lingkungan hidup melalui penataan RTH dan pengelolaan persampahan.
5. Peningkatan kondusivitas wilayah dan ketahanan bencana, dilakukan melalui upaya:
 - a. peningkatan kewaspadaan dini;
 - b. fasilitasi penyelenggaraan pemilu dan pilkada serentak 2024;
 - c. peningkatan kesiapsiagaan penanggulangan bencana; dan
 - d. pengembangan seni dan budaya pendukung industri pariwisata.

b. Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi pembangunan daerah Kabupaten Kebumen yang tertuang dalam Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 adalah:

**“Mewujudkan Kabupaten Kebumen Semakin Sejahtera,
Mandiri, Berakhlak, Bersama Rakyat”**

Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. **Sejahtera** : Sejahtera merupakan suatu perwujudan kondisi keadaan dimana masyarakat terpenuhi kebutuhan dasarnya, baik kebutuhan lahir maupun batin. secara merata;
2. **Mandiri** : Mandiri mengandung makna bahwa masyarakat Kabupaten Kebumen memiliki kemampuan mendayagunakan potensi lokal dan sumber daya yang ada, sehingga mandiri diterjemahkan sebagai perekonomian yang berpihak pada masyarakat, ekonomi yang tumbuh melalui pemerataan, dan ekonomi yang bertumpu pada sektor-sektor yang berbasiskan pada potensi daerah dalam mencapai kemandirian daerah yang tangguh. Indikator untuk mengukur pencapaian kemandirian adalah meningkatnya daya saing daerah, dan meningkatnya prasarana dan sarana perekonomian dapat dilihat dari kondisi infrastruktur dan peluang investasi;
3. **Berakhlak** : Berakhlak berarti bahwa pembangunan di Kebumen tidak hanya mengejar pemenuhan pembangunan fisik semata, namun juga bertujuan untuk membentuk kualitas rohani masyarakat yang memiliki kualitas moral, etika dan karakter hidup yang tinggi berbasis kehidupan spiritual berlandaskan akhlakul karimah sesuai dengan ajaran-ajaran agama;
4. **Bersama Rakyat** : Masyarakat tidak hanya sekedar obyek namun juga sebagai subyek pembangunan. Diharapkan masyarakat berpartisipasi aktif dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan Kabupaten Kebumen.

Dalam upaya pencapaian visi pembangunan Kabupaten Kebumen tahun 2021-2026, ditetapkan misi pembangunan daerah antara lain:

1. Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi;
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya;
3. Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan;
4. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan; dan
5. Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat.

c. Program Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Jangka Menengah

Mendasari Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, program prioritas pembangunan daerah yang akan dilaksanakan selama tahun 2016-2021 difokuskan dalam rangka pencapaian sasaran RPJMD dan mencapai visi dan misi daerah dan pencapaian SPM yang dijabarkan dalam 6 (enam) Urusan Pemerintahan Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 18 (delapan belas) Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Berkaitan dengan Pelayanan Dasar, 7 (tujuh) Urusan Pemerintahan Pilihan, 2 (dua) Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan, 5 (lima) Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan, 1 (satu) Unsur Kewilayahan, serta 1 (satu) Unsur Pemerintahan Umum. Secara garis besar fokus dan prioritas masing-masing program adalah sebagai berikut:

1) Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Pendidikan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Pendidikan; dan
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Kesehatan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan;
- c. Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman;
- d. Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan; dan
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA);
- b. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
- c. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase;
- d. Program Penataan Bangunan Gedung;
- e. Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya;
- f. Program Penyelenggaraan Jalan;
- g. Program Pengembangan Jasa Konstruksi;
- h. Program Penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
- i. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

4. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengembangan Perumahan;
 - b. Program Kawasan Permukiman;
 - c. Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh; dan
 - d. Program Peningkatan Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU).
5. Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.
 - b. Program Penanggulangan Bencana
 - c. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran;
 - d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
6. Sosial

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pemberdayaan Sosial;
- b. Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan;
- c. Program Rehabilitasi Sosial;
- d. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial;
- e. Program Penanganan Bencana;
- f. Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan; dan
- g. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2) Urusan Pemerintahan Wajib yang tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar

1. Tenaga Kerja

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja;
- b. Program Penempatan Tenaga Kerja;
- c. Program Hubungan Industrial;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan;
- b. Program Perlindungan Perempuan;
- c. Program Peningkatan Kualitas Keluarga;
- d. Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak;
- e. Program Pemenuhan Hak Anak (PHA); dan
- f. Program Perlindungan Khusus Anak.

3. Pangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan;
- b. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat;
- c. Program Penanganan Kerawanan Pangan;
- d. Program Pengawasan Keamanan Pangan;
- e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

4. Pertanahan

Program yang dilaksanakan dalam urusan pemerintahan bidang pertanahan adalah Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan. Program ini dilakukan untuk mendukung pencapaian indikator kinerja persentase penanganan sengketa lahan.

5. Lingkungan Hidup

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan Lingkungan Hidup;
- b. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup;
- c. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati);
- d. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3);
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH);
- f. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- g. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat;
- h. Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup;
- i. Program Pengelolaan Persampahan;
- j. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pendaftaran Penduduk;
- b. Program Pencatatan Sipil;
- c. Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penataan Desa;
- b. Program Peningkatan Kerjasama Desa;
- c. Program Administrasi Pemerintahan Desa;

- d. Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat;
 - e. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Pengendalian Penduduk;
 - b. Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB);
 - c. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS);
9. Perhubungan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).
 - b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
10. Komunikasi dan Informatika

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Informasi Dan Komunikasi Publik;
 - b. Program Aplikasi Informatika;
 - c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
11. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi;
 - b. Program Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian;
 - c. Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi;
 - d. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM);
 - e. Program Pengembangan UMKM.
12. Penanaman Modal

Program yang dilaksanakan adalah

 - a. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal;
 - b. Program Promosi Penanaman Modal;
 - c. Program Pelayanan Penanaman Modal;
 - d. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
 - e. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal;
 - f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
13. Kepemudaan dan Olahraga

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

 - a. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan;
 - b. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan; dan

c. Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan.

14. Statistik

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral, melalui penyelenggaraan statistik sektoral di lingkup daerah kabupaten/kota dengan fokus pada pengumpulan, pengolahan, analisis dan diseminasi data statistik sektoral.

15. Persandian

Program yang akan dilaksanakan adalah Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi yang diarahkan pada penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang difokuskan pada penyediaan layanan keamanan informasi pemerintah daerah Kabupaten/Kota dan pelaksanaan keamanan informasi pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

16. Kebudayaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Pengembangan Kebudayaan; dan
- b. Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.

17. Perpustakaan

Program yang dilaksanakan adalah

- a. Program Pembinaan Perpustakaan; dan
- b. Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno.

18. Kearsipan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Arsip;
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3) Urusan Pilihan

1. Kelautan dan Perikanan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap;
- b. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya;
- c. Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan.

2. Pariwisata

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata;
- b. Program Pemasaran Pariwisata;
- c. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

3. Pertanian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian;
- b. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian;
- c. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner;
- d. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian;
- e. Program Perizinan Usaha Pertanian; dan
- f. Program Penyuluhan Pertanian.

4. Energi dan Sumber Daya Mineral

Program yang dilaksanakan yaitu Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan yang diarahkan pada pengelolaan potensi energi baru dan terbarukan yang ada di Kabupaten Kebumen.

5. Perdagangan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan;
- b. Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;
- c. Program Pengembangan Ekspor;
- d. Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen;
- e. Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri; dan
- f. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

6. Perindustrian

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan dan Pembangunan Industri;
- b. Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota; dan
- c. Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional.

7. Transmigrasi

Program yang dilaksanakan adalah Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi yang difokuskan pada Pemindahan dan Penempatan Transmigran Yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota.

4) Fungsi Pendukung Urusan Pemerintahan

1. Sekretariat Daerah

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
- c. Program Perekonomian dan Pembangunan.

2. Sekretariat DPRD

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD.

5) Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

1. Perencanaan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah;
- b. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah;
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

2. Keuangan

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Program Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- c. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah; dan
- d. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

3. Kepegawaian

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Kepegawaian Daerah; dan
- b. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

4. Pendidikan dan Pelatihan

Program yang dilaksanakan adalah Program Pengembangan Sumber Daya Manusia.

5. Penelitian dan Pengembangan

Program yang dilaksanakan adalah Program Penelitian dan Pengembangan Daerah.

6) Fungsi Pengawasan Urusan Pemerintahan

1. Inspektorat Daerah

Program yang dilaksanakan antara lain:

- a. Program Penyelenggaraan Pengawasan
- b. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi
- c. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

7) Fungsi Kewilayahan

1. Kecamatan

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik;
- c. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan;
- d. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum;
- e. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Desa;

8) Fungsi Pemerintahan Umum

1. Kesatuan Bangsa dan Politik

Program yang dilaksanakan adalah sebagai berikut:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan;
- c. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik;
- d. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
- f. Program Peningkatan Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial;

9) Fungsi Lainnya

- a. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan;
- b. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah;
- c. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparat Pengawasan;
- d. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah;
- e. Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan;
- f. Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah; dan
- g. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Kebijakan Kepala Daerah.

Selain program yang tercakup dalam klasifikasi urusan kewenangan Pemerintah Daerah di atas, dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan Perangkat Daerah, direncanakan juga program yang bersifat pendukung operasional Perangkat Daerah sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran;
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur; dan
3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja.

d. Kegiatan Pembangunan Daerah Berdasarkan Dokumen Perencanaan Tahunan

Berdasarkan Peraturan Bupati Kebumen Nomor 38 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kebumen Nomor 37 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024, telah dirumuskan kegiatan prioritas pembangunan tahun 2024. Sinergi antara prioritas dan sasaran pembangunan dalam RKPD Tahun 2023

dengan prioritas program dan kegiatan pembangunan berdasarkan RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

Tabel I.8 Program dan Kegiatan Prioritas Tahun 2024

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			878.220.383.303
Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan			272.878.673.424
	Program Pengelolaan Pendidikan		272.878.673.424
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141.152.394.424
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	91.968.161.000
		Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.436.003.000
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.322.115.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan			436.396.250.379
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		300.705.120.612
		Peningkatan Pelayanan BLUD	300.705.120.612
	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat		129.863.484.767
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah kabupaten/Kota	39.303.328.000
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	90.264.560.767
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	37.839.000
		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	257.757.000
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan		2.940.049.000
		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	212.668.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.727.381.000
	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman		512.169.000
		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.181.000
		Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	421.988.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan		2.375.427.000
		Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.755.000
		Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.289.000
		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.256.383.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			120.553.090.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)		7.586.305.000
		Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.876.000
		Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	7.374.429.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum		10.967.274.000
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.967.274.000
	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase		1.663.642.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.642.000
	Program Penataan Bangunan Gedung		13.856.340.000
		Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.856.340.000
	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya		2.802.878.000
		Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.802.878.000
	Program Penyelenggaraan Jalan		83.141.972.000
		Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	83.141.972.000
	Program Pengembangan Jasa Konstruksi		101.114.000
		Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.360.000
		Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.754.000
		Penerbitan Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional (Non Kecil dan Kecil)	0
	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang		433.565.000
		Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	246.780.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	58.357.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.928.000
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	31.500.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman			12.400.400.000
	Program Pengembangan Perumahan		498.787.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.999.000
		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	468.788.000
	Program Kawasan Permukiman		683.825.000
		Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	683.825.000
	Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh		804.717.000
		Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	804.717.000
	Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)		10.413.071.000
		Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.413.071.000
Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat			26.622.892.000
	Program Peningkatan Ketentraman Dan Ketertiban Umum		12.980.594.000
		Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.431.759.000
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	541.560.000
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.275.000
	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran		2.368.778.000
		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.317.811.000
		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.954.000
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	33.013.000
	Program Penanggulangan Bencana		5.636.760.000
		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	292.446.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.196.342.000
		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.412.300.000
		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.735.672.000
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial			9.369.077.500
	Program Pemberdayaan Sosial		241.043.000
		Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	241.043.000
	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan		2.810.000
		Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/ Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.810.000
	Program Rehabilitasi Sosial		3.361.523.000
		Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.775.574.000
		Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	585.949.000
	Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial		4.748.486.000
		Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.748.486.000
	Program Penanganan Bencana		859.764.000
		Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	580.635.000
		Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	279.129.000
	Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan		155.451.500

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	155.451.500
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar			117.074.890.436
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja			1.412.936.876
	Program Perencanaan Tenaga Kerja		0
		Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	0
	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja		760.653.876
		Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	743.044.876
		Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.609.000
	Program Penempatan Tenaga Kerja		506.938.000
		Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	253.232.000
		Perlindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	253.706.000
	Program Hubungan Industrial		145.345.000
		Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	145.345.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak			949.629.000
	Program Pengarusutamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan		499.153.000
		Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.063.000
		Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	445.090.000
	Program Perlindungan Perempuan		106.707.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.067.000
		Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.640.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	0
	Program Peningkatan Kualitas Keluarga		11.095.000
		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.095.000
	Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak		32.369.000
		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.369.000
	Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)		247.092.000
		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	107.886.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	139.206.000
	Program Perlindungan Khusus Anak		53.213.000
		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
		Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.213.000
		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
Urusan Pemerintahan Bidang Pangan			1.244.864.000
	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan		52.611.000
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.611.000
	Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat		626.697.000
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	113.464.000
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	331.000.000
		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	182.233.000
	Program Penanganan Kerawanan Pangan		476.620.000
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.971.000
		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	465.649.000
	Program Pengawasan Keamanan Pangan		88.936.000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	88.936.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan			37.000.000
	Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan		37.000.000
		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup			14.584.161.000
	Program Perencanaan Lingkungan Hidup		79.863.000
		Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	79.863.000
	Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup		767.912.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	280.521.000
		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	68.881.000
		Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	418.510.000
	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)		2.564.569.000
		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.564.569.000
	Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)		29.677.000
		Penyimpanan sementara Limbah B3	29.677.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)		58.055.000
		Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.055.000
	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		64.201.000
		Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.201.000
	Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat		37.306.000
		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.306.000
	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup		10.297.0000
		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.297.000
	Program Pengelolaan Persampahan		10.972.281.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pengelolaan Sampah	10.972.281.000
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil			3.191.082.000
	Program Pendaftaran Penduduk		2.260.655.000
		Pelayanan Pendaftaran Penduduk	779.681.000
		Penataan Pendaftaran Penduduk	1.466.805.000
		Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000
	Program Pencatatan Sipil		231.038.000
		Pelayanan Pencatatan Sipil	220.899.000
		Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000
	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan		699.389.000
		Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000
		Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	657.310.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa			9.407.692.600
	Program Penataan Desa		44.736.000
		Penyelenggaraan Penataan Desa	44.736.000
	Program Peningkatan Kerjasama Desa		2.235.815.600
		Fasilitasi Kerjasama Antar Desa	2.235.815.600
	Program Administrasi Pemerintahan Desa		6.068.698.000
		Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.068.698.000
	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat		1.058.443.000.

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.058.443.000.
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana			16.436.146.000
	Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)		9.364.103.000
		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.953.461.000
		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.183.297.000
		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.951.906.000
		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	1.275.439.000
	Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)		7.072.043.000
		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	493.749.000
		Pelaksanaan Dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota Dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan Dan Kesejahteraan Keluarga	6.578.294.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan			37.559.496.000
	Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Llaj)		37.559.496.000
		Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	31.263.164.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	168.568.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	375.668.000
		Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	544.385.000
		Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.425.000
		Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.387.332.000
		Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.740.437.000
		Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.517.000
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika			6.103.467.000
	Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik		2.988.963.000
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.988.963.000
	Program Pengelolaan Aplikasi Informatika		3.114.504.000
		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000
		Pengelolaan E- government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	803.706.000
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi. Usaha Kecil. Dan Menengah			5.181.446.000
	Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi		16.072.000
		Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16.072.000
	Program Pendidikan Dan Pelatihan Perkoperasian		166.797.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.797.000
	Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi		936.543.000
		Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	936.543.000
	Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil. Dan Usaha Mikro (Umkm)		111.700.000
		Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	111.700.000
	Program Pengembangan Umkm		3.950.334.000
		Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.950.334.000
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal			1.502.053.000
	Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal		92.504.000
		Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Di Bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	73.259.000
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.245.000
	Program Promosi Penanaman Modal		439.485.000
		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	439.485.000
	Program Pelayanan Penanaman Modal		344.389.000
		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu bidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	344.389.000
	Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal		604.104.000
		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	604.104.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	21.571.000
		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.571.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga			14.458.650.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	431.690.000
		Penyadaran. Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	431.690.000
		Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	13.609.191.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.230.603.000
		Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.172.817.000
		Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	472.286.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.733.485.000
		Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	417.769.000
		Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	417.769.000
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik			55.680.000
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	55.680.000
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian			163.094.000
		Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	163.094.000
		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan			4.040.939.960
	Program Pengembangan Kebudayaan		2.546.220.000
		Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.409.000
		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.429.811.000
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya		1.494.719.960
		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.494.719.960
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan			435.055.000
	Program Pembinaan Perpustakaan		418.283.000
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	325.269.000
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.014.000
	Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno		16.772.000
		Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	16.772.000
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan			348.498.000
	Program Pengelolaan Arsip		348.498.000
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	268.498.000
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000
Urusan Pemerintahan Pilihan			56.484.450.710
Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan			4.586.987.000
	Program Pengelolaan Perikanan Tangkap		2.189.321.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	797.794.000
		Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.729.000
		Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.201.025.000
		Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.773.000
	Program Pengelolaan Perikanan Budidaya		1.997.478.000
		Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudidaya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.973.000
		Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.966.505.000
	Program Pengawasan Sumber Daya Kelautan Dan Perikanan		47.127.000
		Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	47.127.000
	Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan		353.061.000
		Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	45.005.000
		Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	308.056.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata			8.827.610.040
	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata		6.725.227.040
		Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.127.108.040
		Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.545.420.000
		Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	52.699.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
	Program Pemasaran Pariwisata		2.028.931.000
		Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.028.931.000
	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif		73.452.000
		Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	73.452.000
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian			28.560.350.000
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian		2.739.133.500
		Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.850.534.000
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	689.612.250
		Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.692.000
		Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	15.308.000
		Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.987.250
	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian		20.896.180.000
		Pengembangan Prasarana Pertanian	1.510.471.000
		Pembangunan Prasarana Pertanian	14.866.727.000
		Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.518.982.000
	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner		2.317.768.500

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	290.288.250
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	147.706.500
		Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.578.341.000
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	283.266.250
		Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	18.166.500
	Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian		403.649.000
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	403.649.000
	Program Perizinan Usaha Pertanian		39.299.000
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.203.000
		Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan, Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan, Rumah Potong Hewan	20.096.000
	Program Penyuluhan Pertanian		2.164.320.000
		Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.164.320.000
Urusan Pemerintahan Bidang Energi Dan Sumber Daya Mineral			31.459.000
	Program Pengelolaan Energi Baru Terbarukan		31.459.000
		Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	31.459.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan			17.545.667.670
	Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan		16.095.784.670
		Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.734.804.670

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	1.360.980.000
	Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting		166.762.000
		Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	88.256.000
		Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	78.506.000
	Program Pengembangan Ekspor		88.108.000
		Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.108.000
	Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen		163.543.000
		Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	163.543.000
	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri		1.031.470.000
		Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.031.470.000
Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian			1.400.726.000
	Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri		1.278.454.000
		Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.278.454.000
	Program Pengendalian Izin Usaha Industri		86.156.000
		Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	86.156.000
	Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional		36.116.000
		Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	36.116.000
Urusan Pemerintahan Bidang Transmigrasi			118.638.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
	Program Pembangunan Kawasan Transmigrasi		118.638.000
		Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.638.000
Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan			1.305.655.407.151
Sekretariat Daerah			1.283.554.320.151
	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota		1.247.829.646.351
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.216.726.328.851
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	1.321.883.000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	13.184.708.000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	13.196.567.500
		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.237.194.000
		Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.043.701.000
		Penataan Organisasi	373.518.000
		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	745.746.000
	Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat		34.158.774.800
		Administrasi Tata Pemerintahan	450.918.800
		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	33.337.644.000
		Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	343.182.000
		Fasilitasi Kerja Sama Daerah	27.030.000
	Program Perekonomian Dan Pembangunan		1.565.899.000
		Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	160.453.000
		Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	848.321.000
		Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.645.000
Sekretariat Dprd			22.101.087.000
	Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd		22.101.087.000
		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.376.851.000
		Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.000.000
		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90.000.000
		Peningkatan Kapasitas DPRD	3.499.260.000
		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	889.925.000
		Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	15.000.000
		Pembahasan Kerja Sama Daerah	5.000.000
		Fasilitasi Tugas DPRD	12.772.051.000
Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan			722.982.140.000
Perencanaan			1.997.750.000
	Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah		1.248.079.000
		Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.033.869.000
		Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.407.000
		Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92.803.000
	Program Koordinasi Dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah		749.671.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	249.228.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	231.919.000
		Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	268.524.000
Keuangan			716.829.481.000
	Program Pengelolaan Keuangan Daerah		710.262.827.000
		Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	943.869.000
		Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	507.274.000
		Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	405.806.000
		Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	708.405.878.000
	Program Pengelolaan Barang Milik Daerah		1.382.346.000
		Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.382.346.000
	Program Pengelolaan Pendapatan Daerah		5.184.308.000
		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	5.184.308.000
Kepegawaian			1.947.171.000
	Program Kepegawaian Daerah		1.947.171.000
		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.379.086.000
		Mutasi dan Promosi ASN	409.279.000
		Pengembangan Kompetensi ASN	54.506.000
		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	104.300.000
Pendidikan Dan Pelatihan			1.386.653.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia		1.386.653.000
		Pengembangan Kompetensi Teknis	98.673.000
		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.287.980.000
Penelitian Dan Pengembangan			821.085.000
	Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah		821.085.000
		Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	603.147.000
		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	217.938.000
Unsur Pengawasan Urusan Pemerintahan			1.267.483.000
Inspektorat Daerah			1.267.483.000
	Program Penyelenggaraan Pengawasan		998.543.000
		Penyelenggaraan Pengawasan Internal	819.131.000
		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	179.412.000
	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan Dan Asistensi		268.940.000
		Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.532.000
		Pendampingan dan Asistensi	252.408.000
Unsur Kewilayahan			48.404.597.500
Kecamatan			48.404.597.500
	Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik		34.150.817.300
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.150.817.300
	Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		517.972.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	517.972.000
	Program Pembinaan Dan Pengawasan Pemerintahan Desa		3.022.536.000
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.022.536.000
	Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		10.713.272.200
		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	10.713.272.200
Unsur Pemerintahan Umum			42.774.658.000
Kesatuan Bangsa Dan Politik			42.774.658.000
	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan		568.417.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	568.417.000
	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik		39.263.803.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	39.263.803.000
	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		76.108.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	76.108.000
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya		159.908.000
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	159.908.000
	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial		2.706.422.000

Urusan	Program	Kegiatan	Pagu Indikatif 2024
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	2.706.422.000

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah menjadi pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan (lima) tahunan guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan 5 (lima) tahunan dalam RPJMD. Keterkaitan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, secara lebih lengkap dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel I.9 Keterkaitan Tujuan, Sasaran dan Strategi Pembangunan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

Tujuan		Sasaran		Strategi	
Misi 1: Peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik melalui pelayanan birokrasi yang responsif serta penerapan e-gov dan open-gov yang terintegrasi					
1.	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	1	Peningkatan kualitas sistem dan aparatur pelayanan publik
		1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	2	Konsolidasi aparatur dan lembaga pelayanan publik
		1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	3	Integrasi aplikasi sistem informasi manajemen pemerintah daerah dan penertiban administrasi aset daerah
Misi 2: Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya					
1.	Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia	1.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	1	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan kesehatan
		1.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	2	Peningkatan kualitas akses dan pelayanan pendidikan
		1.3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	3	Peningkatan kualitas pemberdayaan perempuan dan anak
Misi 3: Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasiskan agrobisnis dan ekonomi kerakyatan					

Tujuan		Sasaran		Strategi	
1.	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	1.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	1	Peningkatan nilai tambah dan kualitas sarana-prasarana pertanian
		1.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	2	Pengembangan usaha kecil dan industri padat karya
		1.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	3	Peningkatan daya saing perdagangan dan daya tarik pariwisata
		1.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah		
2.	Meningkatkan pemerataan pembangunan	2.1	Berkurangnya penduduk miskin	1	Penurunan kemiskinan
		2.2	Berkurangnya pengangguran	2	Penurunan pengangguran
Misi 4: Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan					
1.	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	1.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	1	Peningkatan konektivitas dan kualitas infrastruktur jalan serta infrastruktur prioritas lain yang mendukung pertumbuhan ekonomi
		1.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	2	Peningkatan kualitas air, udara dan tutupan lahan untuk pembangunan berkelanjutan
Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat					
1.	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	1.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	1	Penjagaan kesatuan bangsa
		1.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	2	Pelestarian cagar budaya

Tujuan		Sasaran		Strategi	
2.	Mewujudkan kondusivitas wilayah	2.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	1	Penurunan tindakan kriminal masyarakat
		2.2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	2	Peningkatan desa tangguh bencana

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen 2021-2026

Secara umum Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan tugas yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026. Dalam RPJMD terdapat 5 (lima) Misi, 7 (tujuh) Tujuan, 18 (delapan belas) Sasaran dan 21 (dua puluh satu) indikator sasaran yaitu:

1. Misi I terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran;
2. Misi II terdapat 1 (satu) Tujuan, 3 (tiga) Sasaran dan 5 (lima) indikator sasaran;
3. Misi III terdapat 2 (dua) Tujuan, 6 (enam) Sasaran dan 6 (enam) indikator sasaran;
4. Misi IV terdapat 1 (satu) Tujuan, 2 (dua) Sasaran dan 2 (dua) indikator sasaran; dan
5. Misi V terdapat 2 (dua) Tujuan, 4 (empat) Sasaran dan 4 (empat) indikator sasaran.

Tabel I.10 Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	85
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,5
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	74,98
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,86
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,37
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,37
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.129,966
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.830,22
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.994,28
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.657,54

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	14-15
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,30-5,40
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	63,10
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,28
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	71,43
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	34,05
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

1.1.3 Penerapan Standar Pelayanan Minimal

a. Dasar Pertimbangan Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Muatan SPM mencakup jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Setiap jenis pelayanan dasar harus memiliki mutu pelayanan dasar. Penjelasan ini tertuang secara jelas pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 ini merupakan turunan dari Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi pelaksanaan pelayanan dasar pada urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar berpedoman pada standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.

Untuk itu pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal dan aturan pelaksanaannya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal.

Berdasarkan aturan tersebut, baik pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota wajib melaksanakan Standar Pelayanan Minimal.

SPM diposisikan untuk menjawab hal-hal penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, khususnya dalam penyediaan pelayanan dasar yang bermuara pada penciptaan kesejahteraan rakyat, SPM yang ditetapkan menjadi salah satu acuan untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pemerintah daerah menyusun rencana pencapaian, Rencana penerapan SPM disesuaikan dengan kewenangan serta kemampuan keuangan daerah namun tetap menjadi hal yang prioritas. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

b. Dasar Hukum Penerapan SPM Pemerintah Kabupaten Kebumen

Dasar hukum Penerapan Standar Pelayanan Minimal Pemerintah Kabupaten Kebumen meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Di Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota.

c. Kebijakan Umum

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik, dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana penerapan SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen maka telah dilakukan integrasi SPM dalam dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah.

Tabel I.11 Program Pembangunan Daerah yang Mendukung Pelaksanaan SPM

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
BIDANG PENDIDIKAN				
MISI II Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				
Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)	83,51%
BIDANG KESEHATAN				
MISI II Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya				

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100%
BIDANG PEKERJAAN UMUM				
MISI IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	21,25%
		Program Peningkatan Prasarana. Sarana dan Utilitas Umum (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	1,17%
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT				
MISI IV Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan				
Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Program Pengembangan Perumahan	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
yang berkelanjutan		Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	64,48%
BIDANG TRANTIBUMLINMAS				
MISI V Mewujudkan masyarakat yang rukun, berbudaya dan bermartabat				
Mewujudkan kondusivitas wilayah	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda	100%
		Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	73,08%
	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%
BIDANG SOSIAL				
MISI III Mewujudkan daya saing ekonomi daerah melalui pengembangan potensi sumber daya alam, pariwisata dan kearifan lokal yang berbasis agrobisnis dan ekonomi kerakyatan				
Meningkatkan pemerataan pembangunan	Berkurangnya penduduk miskin	Program Rehabilitasi Sosial	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	100%

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA PROGRAM	TARGET CAPAIAN KINERJA PROGRAM
		Program Penanganan Bencana	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhannya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%

Sumber: Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Kebumen, 2024

d. Arah Kebijakan

Arah kebijakan pembangunan memberikan pedoman untuk menentukan tahapan pembangunan selama periode kepala daerah guna mencapai sasaran RPJMD secara bertahap. Arah kebijakan pembangunan merupakan keputusan dari semua pemangku kepentingan sebagai pedoman untuk mengarahkan perumusan strategi yang dipilih agar selaras dalam mencapai tujuan dan sasaran. Rumusan arah kebijakan merasionalkan pilihan strategi sehingga memiliki fokus serta sesuai dengan pengaturan pelaksanaannya. Penekanan fokus atau tema setiap tahun selama periode RPJMD memiliki kesinambungan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Kebumen tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026, sebagai landasan dan pedoman bagi seluruh Perangkat Daerah Kabupaten Kebumen dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan 5 (lima) tahun yang pelaksanaannya lebih lanjut dituangkan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran beserta kebijakan umum dan program pembangunan yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen sebagaimana telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Kebumen 2021-2026 akan memberikan arah bagi pelaksanaan setiap urusan pemerintahan daerah baik urusan terkait aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum maupun aspek daya saing daerah.

Strategi pembangunan daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran diwujudkan dalam bentuk kebijakan-kebijakan dan

program-program. Kebijakan merupakan arah/ketentuan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah sebagai dasar untuk dijadikan pedoman, pegangan/petunjuk dalam melaksanakan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan dan sasaran.

Kebijakan dan program pembangunan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk mencapai sasaran meningkatnya aksesibilitas masyarakat terhadap pelayanan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan kebijakan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. dengan program penyempurnaan sistem manajemen pelayanan publik. Sistem yang demikian diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan data dan informasi diberbagai tingkatan administrasi dalam rangka peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

SPM yang diteloh ditetapkan Pemerintah menjadi salah satu acuan bagi Pemerintah Kabupaten Kebumen untuk menyusun perencanaan dan penganggaran penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kebumen menyusun rencana pencapaian SPM yang memuat target tahunan pencapaian SPM dengan mengacu pada standar teknis penerapan SPM sesuai dengan Peraturan Menteri terkait. Guna mendukung Rencana pencapaian SPM di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen dilakukan:

1. Integrasi SPM dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
 - a. Dilakukan pada tahap penyusunan Rancangan Awal RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD, yaitu:
 - 1) Perumusan permasalahan pembangunan ;
 - 2) Penentuan pagu indikatif program/kegiatan.
 - b. Dijadikan sebagai salah Satu Kriteria Penentuan Urutan Prioritas Program/Kegiatan dari Usulan Masyarakat dalam Musrenbang Desa dan Kecamatan, kriteria sbb:
 - 1) Kesesuaian dengan Ranwal RKPD;
 - 2) Dukungan pemenuhan hak dasar rakyat (SPM);
 - 3) Kontribusi pada pencapaian target prioritas Pemb. Kab/Kota
 - 4) Dukungan nilai tambah.
2. Integrasi SPM dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
3. Integrasi SPM dalam Rencana Strategi Perangkat Daerah;
4. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah; dan
5. Integrasi SPM dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Tabel I.12 Integrasi SPM Dalam Arah Kebijakan Pembangunan Berdasarkan RJMD
Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing	Meningkatnya derajat pendidikan masyarakat	Angka Harapan Lama Sekolah (HLS)	Meningkatkan mutu pendidikan formal (terutama jenjang PAUD dan DIKDAS) dan pendidikan non formal	Peningkatan mutu pendidikan formal dan non formal.
			Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)	Meningkatkan akses dana bantuan pendidikan bagi masyarakat	Perluasan akses pendidikan formal
		Meningkatnya mutu dan manajemen pelayanan pendidikan	Persentase Akses dan Mutu Pelayanan Pendidikan	Memperluas akses dalam memperoleh layanan pendidikan yang berkualitas	Peningkatan partisipasi masyarakat dalam meraih pendidikan yang semakin berkualitas
		Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup	Meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat terutama untuk masyarakat kurang mampu dan berisiko tinggi terhadap kesehatan	Peningkatan akses kesehatan, serta kuantitas dan kualitas pelayanan kesehatan

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
			Angka Kematian Ibu	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Peningkatan akses dan pelayanan pada Ibu selama kehamilan dan pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar
			Angka Kematian Bayi	Perluasan akses dan peningkatan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada pelayanan kesehatan yang baik dan standar.	Peningkatan akses dan pelayanan pada bayi pasca kelahiran pada kesehatan yang baik dan standar
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Menciptakan masyarakat yang tenteram dan tertib melalui kepastian, perlindungan dan penegakan hukum	Terwujudnya masyarakat yang tenteram dan tertib berdasarkan kesadaran atas hukum	Kasus pelanggaran hukum	meningkatkan Koordinasi antar berbagai pihak untuk meminimalisir pelanggaran hukum, kasus bencana dan meningkatkan kemudahan bagi masyarakat untuk berdisiplin, berpolitik dan berbudaya	Optimalisasi produk hukum dan implementasinya di lapangan dalam mengatasi berbagai peristiwa/kejadian di Kabupaten Kebumen

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Pemantapan Ekonomi Kerakyatan Berbasis Komoditas dan Kawasan Unggulan Daerah Didukung Oleh Pembangunan Pertanian Dan Pariwisata	Mewujudkan pelayanan infrastruktur wilayah yang mantap	Meningkatnya pelayanan infrastruktur yang mendukung pengembangan wilayah	Persentase tingkat pelayanan infrastruktur wilayah	Meningkatkan kualitas pelayanan air minum dan sanitasi	Peningkatan kualitas dan kapasitas infrastruktur wilayah
				Meningkatkan pelayanan air bersih dan pengelolaan air limbah serta pengelolaan dan konservasi SDA	Peningkatan pelayanan air minum, pengelolaan sanitasi, dan pengelolaan SDA
	Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air, sumberdaya lahan, sumberdaya hutan, sumberdaya pesisir berdasarkan azas konservasi, efisien dan lestari	Meningkatnya perlindungan dan konservasi sumberdaya alam	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Menurunkan tingkat perusakan lingkungan hidup termasuk pencemaran udara, air, dan tanah	Peningkatan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Pemantapan upaya penanggulangan kemiskinan dan pengurangan pengangguran berbasis pembangunan perdesaan	Mewujudkan masyarakat yang berdaya dan sejahtera	Meningkatnya Keberdayaan Masyarakat	Angka Kemiskinan	Meningkatkan koordinasi dan fasilitasi terhadap upaya penanggulangan kemiskinan	Penurunan penduduk miskin di Kabupaten Kebumen

PRIORITAS	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA DAERAH	STRATEGI PENERAPAN SPM	ARAH KEBIJAKAN
Pemantapan daya saing daerah didukung dengan penyediaan infrastruktur yang berkualitas	Mewujudkan iklim yang kondusif bagi peningkatan ketenagakerjaan, perluasan kesempatan kerja dan penurunan angka pengangguran	Meningkatnya keterserapan tenaga kerja	Angka Pengangguran	Meningkatkan keterampilan masyarakat	
Pemantapan kualitas sumber daya manusia dan layanan sosial dasar masyarakat	Mewujudkan sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan terjangkau	Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana pendidikan	Persentase Gedung Sekolah Dalam Kondisi Baik	Meningkatkan kualitas sarana pendukung pendidikan	Peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan
		Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana serta mutu dan manajemen pelayanan kesehatan	Persentase tingkat akses dan mutu pelayanan kesehatan	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan PKD, puskesmas dan rumah sakit	Peningkatan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana bidang kesehatan

Sumber: RPJMD Kabupaten Kebumen Tahun 2021-2026

BAB II

CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

2.1 Capaian Kinerja Makro

Para pakar ekonomi menggunakan banyak jenis data untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah atau wilayah. Beberapa indikator yang penting untuk mengukur kinerja perekonomian suatu daerah tersebut diantaranya Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Angka Kemiskinan, Angka Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Per Kapita dan Ketimpangan Pendapatan, Capaian kinerja makro tersebut dihasilkan dari berbagai program yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, pemerintah pusat, pihak swasta dan pihak terkait lainnya dalam pembangunan nasional.

Untuk menghitung perubahan capaian indikator makro dilakukan dengan cara menghitung capaian kinerja makro tahun pelaporan dikurangi capaian kinerja makro tahun sebelumnya dibagi dengan capaian kinerja makro tahun sebelumnya dikalikan dengan 100%. Berikut ini capaian indikator kinerja makro Kabupaten Kebumen tahun 2023 dan 2024 sebagaimana tabel berikut ini:

Tabel II.1 Capaian Kinerja Makro Kabupaten Kebumen

No	Indikator Kinerja Makro	Capaian Kinerja		Laju Kinerja 2024
		Tahun 2023	Tahun 2024	
1	Indeks Pembangunan Manusia	71,88	72,48	0,828
2	Angka Kemiskinan	16,34	15,71	-3,856
3	Angka Pengangguran	5,11	5,07	-0,783
4	Pertumbuhan Ekonomi	5,66	5,30	-6,36
5	Pendapatan Per-Kapita	25,59	27,29	6,643
6	Ketimpangan Pendapatan	0,333	0,327	-1,802

Sumber: BPS Kabupaten Kebumen 2024

2.1.1 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

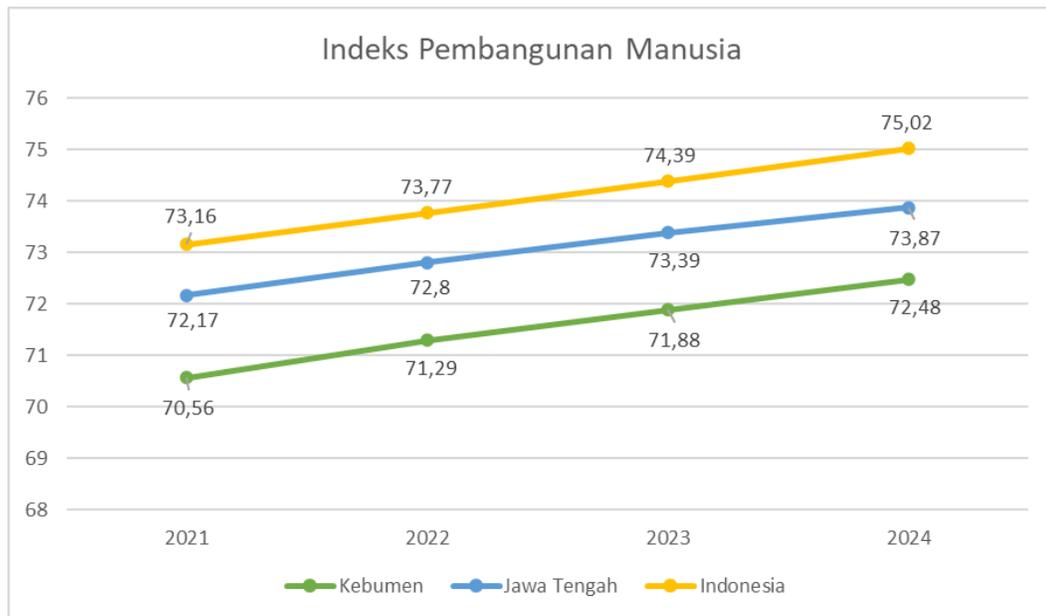
Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memberikan gambaran komprehensif mengenai tingkat pencapaian pembangunan manusia sebagai dampak dari kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara/daerah. Semakin tinggi nilai IPM suatu negara/daerah, menunjukkan pencapaian pembangunan manusianya semakin baik. Meskipun tidak mengukur semua dimensi dari pembangunan manusia, namun IPM dinilai mampu mengukur dimensi pokok dari pembangunan manusia.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 mencapai 72,48. Angka tersebut mengalami peningkatan 0,83 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 71,88.

Selama kurun waktu 2021 – 2024, IPM Kabupaten Kebumen rata – rata meningkat sebesar 0,90 persen.

Berdasarkan skala internasional UNDP (*United Nation Development Programme*), capaian IPM dikategorikan menjadi kategori sangat tinggi ($IPM \geq 80$), kategori tinggi ($70 \leq IPM < 80$), kategori sedang ($60 \leq IPM < 70$), dan kategori rendah ($IPM < 60$). Tahun 2010 hingga 2020 IPM Kabupaten Kebumen berada pada kategori sedang, dan mulai tahun 2021 IPM Kabupaten Kebumen termasuk kategori tinggi.

Meskipun IPM Kabupaten Kebumen terus meningkat 4 tahun terakhir, namun nilai IPM Kabupaten Kebumen masih di bawah IPM Jawa Tengah dan Nasional. Nilai IPM Jawa Tengah dan Indonesia pada tahun 2024 berturut-turut sebesar 73,87 dan 75,02. Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Nasional Tahun 2021-2024 secara lengkap tersaji dalam gambar berikut:



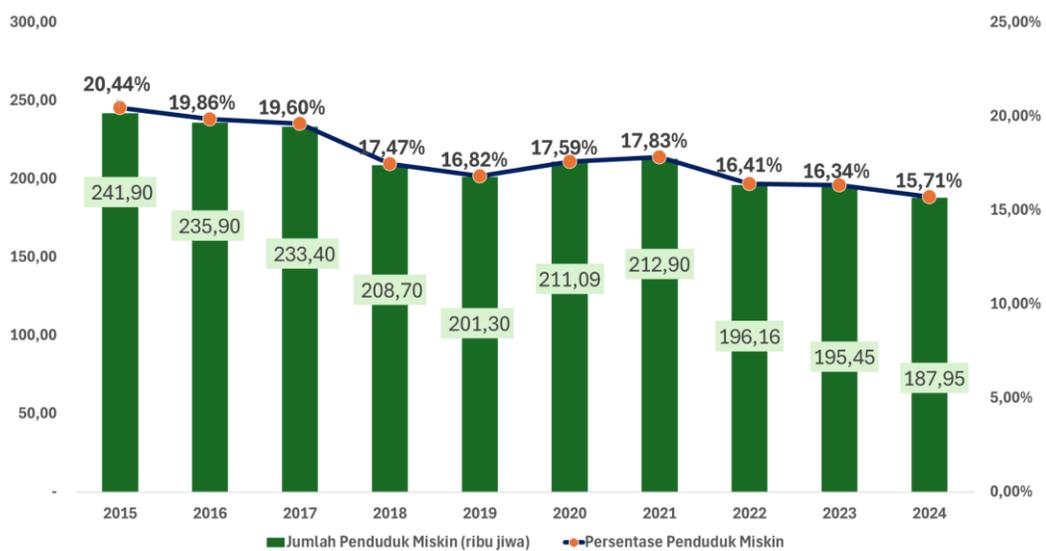
Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar II.1 Perkembangan IPM Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah dan Indonesia Tahun 2021 – 2024

Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Aspek umur panjang dan hidup sehat diukur melalui indikator Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) menggunakan hasil Long Form SP2020 (SP2020-LF), aspek pengetahuan diukur melalui indikator Harapan Lama Sekolah (HLS) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan aspek standar hidup layak diukur melalui indikator Pengeluaran Per Kapita per tahun (yang disesuaikan).

2.1.2 Angka Kemiskinan

Kemiskinan di suatu wilayah dapat dijelaskan melalui beberapa indikator antara lain jumlah penduduk miskin, persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, indeks keparahan kemiskinan, serta karakteristik penduduk miskin itu sendiri berdasarkan fasilitas tempat tinggal, tingkat pendidikan, status pekerjaan, status kesehatan dan lainnya. Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama satu dekade terakhir dapat ditinjau melalui analisis tren tingkat kemiskinan. Analisis tren ini bermanfaat untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pengentasan kemiskinan pemerintah daerah Kabupaten Kebumen. Beberapa indikator yang dapat digunakan dalam analisis tren tersebut antara lain garis kemiskinan (rupiah/kapita/bulan), jumlah (ribu jiwa) dan persentase penduduk miskin, serta indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan.



Sumber: Badan Pusat Statistik

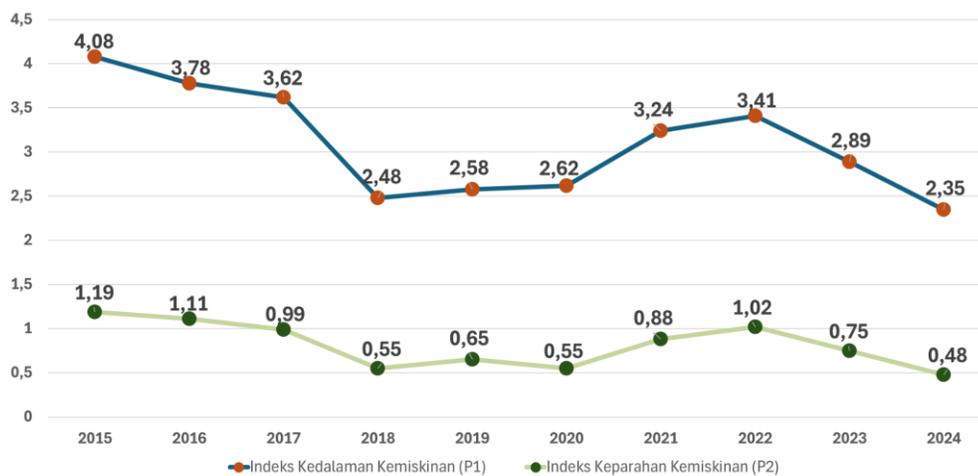
Gambar II.2 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kebumen. 2015-2024

Program pengentasan kemiskinan Kabupaten Kebumen selama hampir satu dekade terakhir sebenarnya relatif berhasil. Hal ini terlihat dari perkembangan tingkat kemiskinan selama 2015 – 2019 yang mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase (Grafik 2.2). Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen pada 2015 sebanyak 241,9 ribu jiwa (20,44 persen), kemudian pada 2019 menurun menjadi 201,3 ribu jiwa (16,82 persen). Akan tetapi, pada 2020 dan 2021 jumlah dan persentase penduduk miskin mengalami peningkatan. Pada 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Kebumen sebanyak 211,1 ribu jiwa (17,59 persen), kemudian pada 2021 bertambah menjadi 212,9 ribu jiwa (17,83 persen). Peningkatan ini secara tidak langsung merupakan imbas dari pandemi COVID-19. Penduduk miskin, rentan miskin dan yang bekerja di sektor informal merupakan penduduk yang paling terdampak dari mewabahnya pandemi COVID-19. Berbagai pembatasan mobilitas atau kegiatan ekonomi berdampak pada penurunan pendapatan mereka. Penurunan pendapatan

ini menyebabkan kemiskinan semakin bertambah karena semakin banyak penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita per bulan di bawah garis kemiskinan.

Berbagai upaya pemulihan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah mulai membuahkan hasil. Keberhasilan berbagai upaya pemulihan ekonomi juga tampak dari penurunan tingkat kemiskinan di Kebumen, baik dari sisi jumlah maupun persentase. Pada 2023 jumlah penduduk miskin di Kebumen menurun menjadi 195,45 ribu jiwa atau 16,34 persen, sedangkan pada 2024 jumlah penduduk miskin di Kebumen menurun menjadi 187,95 ribu jiwa atau 15,71 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan persentase penduduk miskin di Kebumen pada 2023 dan 2024 tercatat lebih rendah dari periode-periode sebelum pandemi.

Selanjutnya, untuk keperluan analisis kemiskinan yang lebih lanjut, maka diperlukan indikator lain seperti tingkat kedalaman kemiskinan dan tingkat keparahan kemiskinan. Indeks Kedalaman Kemiskinan merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk miskin dari garis kemiskinan. Adapun indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar II.3 Indeks Kedalaman dan Keparahannya Kemiskinan Kabupaten Kebumen 2015-2024

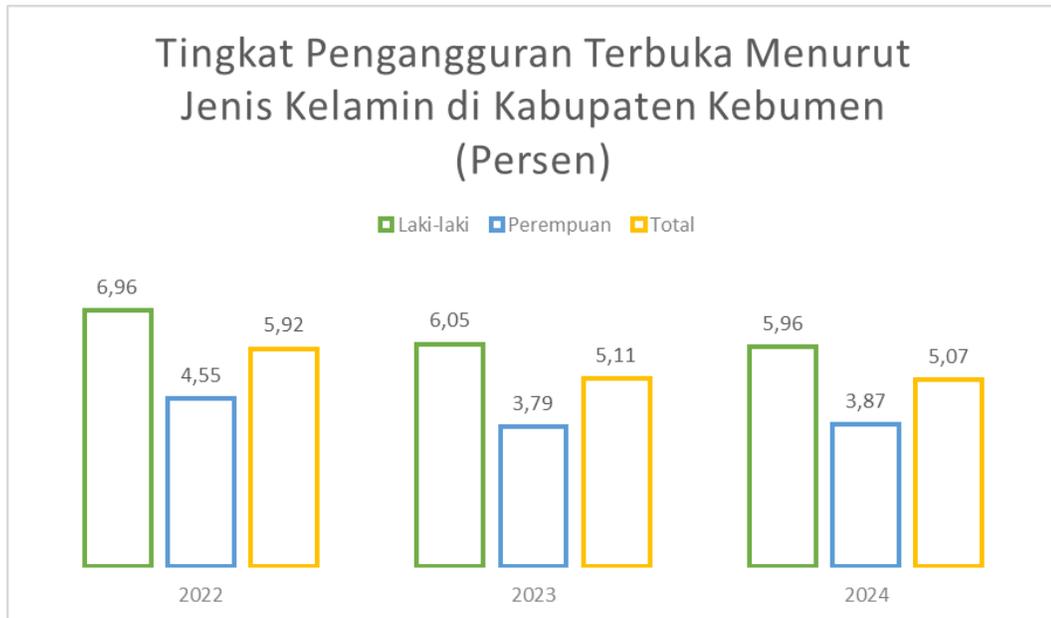
Grafik II.3 menunjukkan bahwa selama periode 2015 – 2024, indeks kedalaman dan keparahannya kemiskinan relatif berfluktuasi. Temuan yang menarik adalah selama periode 2018 – 2022, indeks kedalaman dan keparahannya kemiskinan di Kabupaten Kebumen cenderung meningkat. Indeks kedalaman kemiskinan pada 2018 sebesar 2,48 dan terus meningkat menjadi 3,41 pada 2022. Demikian pula dengan indeks keparahannya kemiskinan, walaupun pada 2020 sempat turun menjadi 0,55 tetapi pada 2022 indeks ini kembali meningkat menjadi 1,02. Kecenderungan meningkatnya indeks kedalaman dan keparahannya kemiskinan selama periode

2018 – 2022 ini mengindikasikan bahwa kesenjangan rata-rata pengeluaran penduduk miskin dengan garis kemiskinan cenderung semakin melebar dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin juga semakin tinggi. Selain itu, pandemi COVID-19 yang melanda Indonesia sejak awal 2020 diduga juga semakin memperlebar kesenjangan tersebut. Hal ini terlihat dari peningkatan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan yang relatif tajam pada 2021 dan 2022. Namun demikian seiring dengan berakhirnya status pandemi pada 2023. Indeks Kedalaman dan Keparahannya kemiskinan di Kebumen cenderung menurun. Pada 2023, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kebumen tercatat sebesar 2,89 atau menurun 0,52 poin dibandingkan tahun 2022. Adapun Indeks Keparahannya kemiskinan di Kebumen sebesar 0,75 atau menurun 0,27 poin. Sedangkan Pada 2024, Indeks Kedalaman kemiskinan di Kebumen tercatat sebesar 2,35 atau menurun 0,54 poin dibandingkan tahun 2023. Adapun Indeks Keparahannya kemiskinan di Kebumen sebesar 0,48 atau menurun 0,27 poin. Penurunan nilai indeks ini mengindikasikan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin cenderung makin mendekati garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin juga semakin menyempit. Penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan pada 2023 dan 2024 juga memberikan gambaran bahwa kondisi masyarakat miskin di Kebumen cenderung semakin homogen.

2.1.3 Tingkat Pengangguran

Dalam analisis angkatan kerja juga dikenal indikator yang digunakan untuk mengukur pengangguran yaitu Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Pengangguran Terbuka didefinisikan sebagai orang yang sedang mencari pekerjaan atau yang sedang mempersiapkan usaha atau juga yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin lagi mendapatkan pekerjaan, termasuk juga mereka yang baru mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Pengangguran Terbuka tidak termasuk orang yang masih sekolah atau mengurus rumah tangga, sehingga hanya orang yang termasuk angkatan kerja saja yang merupakan pengangguran terbuka. TPT dihitung dari perbandingan antara banyaknya jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja.

TPT menggambarkan ketidakseimbangan antara ketersediaan lapangan pekerjaan dan penduduk yang berusaha mendapatkan pekerjaan, yakni ketersediaan lapangan pekerjaan lebih kecil dari pencari kerja sehingga tidak mampu menampung pencari kerja. Pada 2020 TPT Kebumen mencapai 6,07 persen. Pada periode berikutnya. TPT Kebumen juga menurun, yakni menjadi 6,03 persen pada 2021 mencapai 5,92 pada tahun 2022 dan terus menurun menjadi 5,11 persen pada 2023. Pada tahun 2024, TPT Kebumen mencapai 5,07. Dapat disimpulkan bahwa TPT Kabupaten Kebumen terus mengalami trend penurunan.



Sumber: Badan Pusat Statistik. Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Agustus

Gambar II.4 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Kebumen. 2022 – 2024

Penurunan TPT Kebumen selama 2020 – 2024 tidak lepas dari berbagai kebijakan penanganan dampak COVID-19, dan kebijakan pemulihan ekonomi Pasca COVID-19. Berbagai kebijakan ini telah membuahkan hasil. Perlahan kegiatan ekonomi mulai aktif. Hal ini mendorong beberapa lapangan usaha membuka lapangan pekerjaan baru atau memanggil kembali pekerja yang dirumahkan sementara. Berbagai kondisi pemulihan ekonomilah yang berkontribusi dalam menekan TPT Kebumen pada 2021 menjadi 6,03 persen dan terus menurun menjadi 5,11 persen pada 2023, dan menjadi 5,07 pada tahun 2024.

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

Angka pertumbuhan ekonomi pada tahun 2023 sebesar 5,66 persen menunjukkan bahwa Kebumen masih mengalami pertumbuhan yang relatif kuat pada tahun tersebut. Faktor-faktor yang mungkin mendukung pertumbuhan ekonomi tersebut termasuk investasi yang stabil, peningkatan konsumsi rumah tangga, serta proyek pembangunan infrastruktur. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi pada tahun sebelumnya biasanya menciptakan momentum positif untuk aktivitas ekonomi di tahun berikutnya.

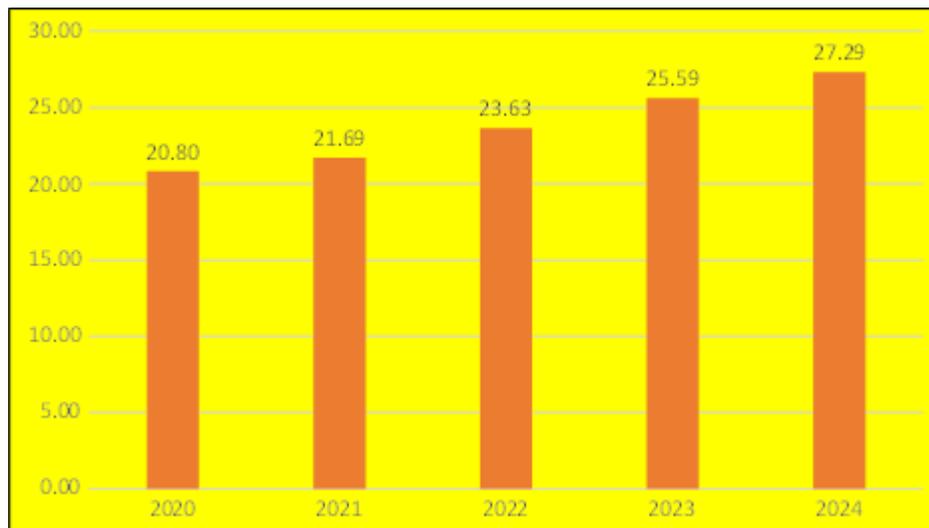
Pada tahun 2024 perekonomian Kabupaten Kebumen tetap mengalami pertumbuhan walaupun melambat yakni sebesar 5,30 persen. Hal ini didorong oleh beberapa lapangan usaha yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi tahun 2024. Lapangan usaha industri pengolahan mengalami perlambatan sebesar 6,00 persen dibandingkan 2023 sebesar 6,31 persen, lapangan usaha perdagangan tumbuh melambat sebesar 3,70 persen dibandingkan 2023 sebesar 5,75 persen, dan lapangan usaha konstruksi juga tumbuh melambat sebesar 8,54 persen dibandingkan 2023 sebesar 9,89 persen. Walaupun demikian, terdapat beberapa lapangan usaha yang mengalami percepatan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2024. Lapangan usaha pertanian mengalami pertumbuhan sebesar 2,59 persen dibandingkan 2023 sebesar 2,25 persen, lapangan usaha jasa pendidikan mengalami

pertumbuhan sebesar 7,93 persen dibandingkan 2023 sebesar 4.59 persen, serta lapangan usaha pertambangan dan penggalian mengalami pertumbuhan sebesar 4,24 persen dibandingkan 2023 sebesar -0,50 persen.

2.1.5 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Salah satu indikator tingkat kemakmuran penduduk di suatu daerah/ wilayah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapita, yang merupakan hasil bagi antara nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan jumlah penduduk. Oleh karena itu, besar kecilnya jumlah penduduk akan mempengaruhi nilai PDRB per kapita, sedangkan besar kecilnya nilai PDRB sangat tergantung pada potensi sumber daya alam dan faktor-faktor produksi yang terdapat di daerah tersebut. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk.

Nilai PDRB per kapita Kabupaten Kebumen atas dasar harga berlaku sejak tahun 2020 hingga 2024 senantiasa mengalami kenaikan. Pada tahun 2020 PDRB per kapita tercatat sebesar 20,80 juta rupiah. Secara nominal terus mengalami kenaikan hingga tahun 2024 mencapai 27,29 juta rupiah (lihat Grafik 2.5). Kenaikan angka PDRB per kapita yang cukup tinggi ini disebabkan masih dipengaruhi oleh factor inflasi.



Sumber: Badan Pusat Statistik

Gambar II.5 PDRB per Kapita Kabupaten Kebumen Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah)
Tahun 2020 – 2024

Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita merupakan ukuran penting dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat suatu wilayah. Di Kebumen, PDRB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari 25,59 juta rupiah pada tahun 2023 menjadi 27,79 juta rupiah pada tahun 2024. Peningkatan ini menunjukkan bahwa secara rata-rata, pendapatan yang diterima oleh penduduk Kebumen meningkat dari tahun ke tahun dalam periode tersebut. Peningkatan PDRB per kapita dapat disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk pertumbuhan ekonomi yang positif, peningkatan produktivitas, atau peningkatan

dalam distribusi pendapatan. Dengan PDRB per kapita yang meningkat, dapat diasumsikan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Kebumen juga meningkat seiring waktu. Namun, perlu diingat bahwa PDRB per kapita hanya memberikan gambaran umum tentang tingkat kesejahteraan dan tidak mencerminkan distribusi pendapatan yang sebenarnya di masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk terus memperhatikan upaya untuk meningkatkan kesejahteraan secara merata di seluruh lapisan Masyarakat.

2.1.6 Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio

Dalam mengukur tingkat ketimpangan, BPS menggunakan data pengeluaran sebagai proksi pendapatan yang bersumber dari Susenas. Gini rasio adalah salah satu ukuran ketimpangan pengeluaran yang digunakan. Nilai gini rasio berkisar antara 0 (nol) dan 1 (satu). Nilai gini rasio yang semakin mendekati 1 mengindikasikan tingkat ketimpangan yang semakin tinggi.

Dengan data Ketimpangan Pendapatan/Gini Rasio Kebumen yang ada kita dapat mengevaluasi hubungannya dengan PDRB per kapita dan potensi dampaknya terhadap ketimpangan pendapatan. Penurunan indeks Gini Kabupaten Kebumen dari 0,333 pada tahun 2023 menjadi 0,327 pada tahun 2024 menunjukkan adanya sedikit perbaikan dalam distribusi pendapatan. Meskipun perubahan ini kecil, namun tetap merupakan indikasi bahwa kesenjangan ekonomi sedikit berkurang, terutama jika kelompok berpenghasilan rendah mengalami peningkatan kesejahteraan

Penurunan indeks Gini yang mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan sering kali berhubungan dengan kenaikan PDRB per kapita, yang menunjukkan peningkatan output ekonomi per individu. Jika pertumbuhan ekonomi terjadi secara merata dan dinikmati oleh berbagai lapisan masyarakat, maka pendapatan kelompok berpenghasilan rendah meningkat lebih cepat dibandingkan kelompok atas, sehingga ketimpangan berkurang. Namun, jika kenaikan PDRB per kapita hanya dinikmati oleh segmen tertentu, maka ketimpangan justru bisa meningkat. Oleh karena itu, hubungan antara penurunan indeks Gini dan kenaikan PDRB per kapita sangat bergantung pada bagaimana pertumbuhan ekonomi tersebut terdistribusi di masyarakat.

Dengan demikian penting untuk memastikan bahwa tren ini berkelanjutan dan bukan hanya efek sementara dari kebijakan tertentu. Jika penurunan ini disebabkan oleh faktor musiman atau bantuan jangka pendek, maka ada risiko indeks Gini kembali meningkat di tahun berikutnya. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemantauan lebih lanjut serta kebijakan ekonomi yang konsisten agar ketimpangan pendapatan terus menurun dalam jangka panjang.

2.2 Capaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan

Capaian kinerja urusan pemerintahan merupakan gambaran dari keberhasilan daerah dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan tentang Pemerintahan Daerah. Laporan capaian kinerja urusan pemerintahan daerah memuat data/informasi kinerja setiap urusan pemerintahan sesuai dengan indikator masing-masing urusan pemerintahan dan urusan penunjang. Data/informasi setiap indikator wajib diisi oleh pemerintah daerah secara lengkap.

2.2.1 Indikator Kinerja Kunci Hasil

Tabel II.2 Indikator Kinerja Kunci Hasil

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pendidikan					
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 5-6 tahun yang berpartisipasi dalam PAUD	77,84	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-12 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan dasar	109,15	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 13-15 tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan menengah pertama	115,88	DISDIKPORA	
	Pendidikan	Tingkat partisipasi warga negara usia 7-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	57,19	DISDIKPORA	
Kesehatan					
	Kesehatan	Rasio daya tampung RS terhadap Jumlah Penduduk	0,58	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar	100	DINKES PPKB	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kesehatan	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai standar	100	DINKES PPKB	
	Kesehatan	Persentase orang dengan resiko terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	100	DINKES PPKB	
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang					
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kab/Kota	0	DPU PR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas kawasan permukiman sepanjang pantai rawan abrasi, erosi, dan akresi yang terlindungi oleh infrastruktur pengaman pantai (Pemecah Ombak) di WS Kewenangan Kab/Kota	0	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/ kota yang dilayani oleh jaringan irigasi	78,75	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi terhadap rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	100	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	78,35	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio kepatuhan IMB kab/kota	95,18	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Tingkat kemantapan Jalan Kabupaten/Kota	73,47	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio tenaga operator/teknisi/ analisis yang memiliki sertifikat kompetensi	55,14	DPU PR	
	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Rasio proyek yang menjadi kewenangan pengawasannya tanpa kecelakaan konstruksi	100	DPU PR	
Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Perumahan Rakyat	Hunian untuk Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Fasilitasi hunian penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota	100	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani	25,93	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)	6,33	DISPERKIMHUB	
	Perumahan Rakyat	Jumlah perumahan yang sudah dilengkapi PSU (Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum)	23,08	DISPERKIMHUB	
Ketentraman dan Ketertiban Umum					
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan informasi rawan bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	BPBD	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah warga negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	BPBD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	95,41	Satpol PP	
	Ketentraman dan Ketertiban Umum	Waktu tanggap (response time) penanganan kebakaran	8,15	Satpol PP	
Sosial					
	Sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM)	100	DINSOS P3A	
	Sosial	Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota	100	DINSOS P3A	
Tenaga Kerja					
	Tenaga Kerja	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja	35,71	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat Kompetensi	1,08	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	23,31	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan).	100	DISNAKER	
	Tenaga Kerja	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar Kerja dalam wilayah kabupaten/kota	26,05	DISNAKER	
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase ARG pada belanja langsung APBD	27,73	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Persentase anak korban kekerasan yang ditangani instansi terkait kabupaten	100	PMD	
	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak	Rasio kekerasan terhadap perempuan, termasuk TPPO (per 100.000 penduduk perempuan)	15,34	PMD	
Pangan					
	Pangan	Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/jagung sesuai kebutuhan)	33,42	DISTAPANG	
Pertanahan					
	Pertanahan	Persentase pemanfaatan tanah yang sesuai dengan peruntukkan tanahnya diatas izin lokasi dibandingkan dengan luas izin lokasi yang diterbitkan	97,75	DPUPR	
	Pertanahan	Persentase penetapan tanah untuk pembangunan fasilitas umum	0	DPUPR	
	Pertanahan	Tersedianya lokasi pembangunan dalam rangka penanaman modal.	8,81	DPUPR	
	Pertanahan	Tersedianya Tanah Obyek Landreform (TOL) yang siap didistribusikan yang berasal dari Tanah Kelebihan Maksimum dan Tanah Absentee	0	DPUPR	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Pertanahan	Tersedianya tanah untuk masyarakat.	0	DPUPR	
	Pertanahan	Penangan sengketa tanah garapan yang dilakukan melalui mediasi	56,66	DPUPR	
Lingkungan Hidup					
	Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/Kota	69,86	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	79,28	DISPERKIMHUB	
	Lingkungan Hidup	Ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	77,77	DISPERKIMHUB	
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil					
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Perekaman KTP elektronik	99,99	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Persentase anak usia 1-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA	62,41	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Kepemilikan akta kelahiran	98,88	DISDUKCAPIL	
	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Jumlah PD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama	76	DISDUKCAPIL	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa					
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase pengentasan desa tertinggal	0	PMD	
	Pemberdayaan Masyarakat	Persentase peningkatan status desa mandiri	60,15	PMD	
Keluarga Berencana					
	Keluarga Berencana	TFR (Angka Kelahiran Total)	2,17	DINKES PPKB	
	Keluarga Berencana	Persentase pemakaian kontrasepsi Modern (Modern Contraceptive Prevalence Rate/mCPR)	67,10	DINKES PPKB	
	Keluarga Berencana	Persentase kebutuhan ber-KB yang tidak terpenuhi (unmet need)	9,20	DINKES PPKB	
Perhubungan					
	Perhubungan	Rasio konektivitas kabupaten/kota	0,64	DISPERKIMHUB	
	Perhubungan	Kinerja lalu lintas kabupaten/kota	0,32	DISPERKIMHUB	
Kominfo					
	Kominfo	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	100	DISKOMINFO	
	Kominfo	Persentase Layanan Publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi	56,66	DISKOMINFO	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Kominfo	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik. mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	312,43	DISKOMINFO	
Koperasi Usaha Kecil dan Menengah					
	KUKM	Meningkatnya Koperasi yang berkualitas	100	DISNAKER	
	KUKM	Meningkatnya Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha	100	DISNAKER	
Penanaman Modal					
	Penanaman Modal	Persentase peningkatan investasi dikabupaten/kota	9,31	DPMPTSP	
Pemuda dan Olahraga					
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan ekonomi mandiri	0	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan	0,31	DISPARBUD	
	Pemuda dan Olahraga	Peningkatan prestasi olahraga	6	DISPARBUD	
Statistik					
	statistik	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
	statistik	Persentase OPD yang menggunakan data statistik dalam melakukan evaluasi pembangunan daerah	100	DISKOMINFO	
Persandian					

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Persandian	Tingkat keamanan informasi pemerintah	78,13	DISKOMINFO	
Kebudayaan					
	Kebudayaan	Terlestarikannya Cagar Budaya	76,15	DISDIKPORA	
Perpustakaan					
	Perpustakaan	1. Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat	80,77	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
		2. Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	78,81	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kearsipan					
	Kearsipan	Tingkat ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja. alat bukti yang sah dan pertanggungjawaban nasional) Pasal 40 dan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	78,45	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
	Kearsipan	Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat	76	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	
Kelautan dan Perikanan					
	Kelautan	Jumlah Total Produksi Perikanan (Tangkap dan Budidaya) kabupaten/kota (sumber data: one data KKP)	101,82	DLHKP	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Pariwisata					
	Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan mancanegara per kebangsaan	109,09	DISPARBUD	
	Pariwisata	Persentase peningkatan perjalanan wisatawan nusantara yang datang ke kabupaten/kota	38,69	DISPARBUD	
	Pariwisata	Tingkat hunian akomodasi	34,06	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB harga berlaku	6,63	DISPARBUD	
	Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PAD	1,76	DISPARBUD	
Energi Sumber Daya Mineral					
	ESDM	persentase perusahaan pemanfaatan panas bumi yang memiliki ijin di Kabupaten/Kota	0	DISNAKER	
Pertanian					
	Pertanian	Produktivitas pertanian per hektar per tahun	561,02	DISTAPANG	
	Pertanian	Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular	-19,16	DISTAPANG	
Perdagangan					
	Perdagangan	Persentase pelaku usaha yang memperoleh izin sesuai dengan ketentuan (IUPP/SIUP Pusat Perbelanjaan dan IUTM/IUTS/SIUP Toko Swalayan	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perdagangan	Persentase Kinerja realisasi Pupuk	34,14	DISPERINDAG KUKM	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Outcome	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
	Perdagangan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku	100	DISPERINDAG KUKM	
Perindustrian					
	Perindustrian	Pertambahan jumlah industri kecil dan menengah di Kabupaten	0,0017	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase pencapaian sasaran pembangunan industri termasuk turunan indikator pembangunan industri dalam RIPIN yang ditetapkan dalam RPIP	611,6	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	100	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Perluasan Industri (IPUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait	0	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Persentase jumlah hasil pemantauan dan pengawasan dengan jumlah Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) yang lokasinya di Daerah Kabupaten/ Kota	0	DISPERINDAG KUKM	
	Perindustrian	Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini (rumus adalah Keterkinian informasi industri + kelengkapan informasi industri) liat juknis	100	DISPERINDAG KUKM	
Transmigrasi					
	Transmigrasi	Kawasan transmigrasi yang difasilitasi penempatannya	100	DISNAKER	

2.2.2 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

Tabel II.3 Indikator Kinerja Kunci Untuk Fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
1	2	3	4	5	6
Perencanaan dan Keuangan					
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio Belanja Pegawai di luar guru dan tenaga kesehatan	8,07	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Rasio PAD	15,43	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Maturitas SPIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Tingkat Kualitas APIP (belum dinilai (0)/level 1/level 2/level 3) berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) yang dikeluarkan oleh BPKP	3	INSPEKTORAT	
	Perencanaan dan Keuangan	Jumlah belanja urusan pemerintahan – transfer Expenditures	63,58	BPKPD	
	Perencanaan dan Keuangan	Opini Laporan Keuangan	8	BPKPD	
Pengadaan					
	Pengadaan	Persentase jumlah total proyek konstruksi yang dibawa ke tahun berikutnya. Yang ditandatangani pada kuartal pertama	0	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
	Pengadaan	Persentase jumlah pengadaan yang dilakukan dengan metode kompetitif	85,58	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Rasio nilai belanja yang dilakukan melalui pengadaan	40,02	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
	Pengadaan	Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri Dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, Dan Koperasi Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah	-2,80	Bagian pengadaan Barang dan Jasa	
Kepegawaian					
	Kepegawaian	Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	77,52	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	10,76	BKPSDM	
	Kepegawaian	Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)	100	BKPSDM	
Manajemen Keuangan					
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi belanja terhadap belanja total dalam APBD	2,97	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Deviasi realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD	8,05	BPKPD	
	Manajemen Keuangan	Assets Management	4	BPKPD	

No	Urusan Pemerintahan	IKK Fungsi Penunjang	Capaian Kinerja	Sumber Data	Bobot/Ket
	Manajemen Keuangan	Rasio Anggaran Sisa Terhadap Total Belanja Dalam APBD Tahun Sebelumnya	6,12	BPKPD	
Transparansi dan Partisipasi Publik					
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Informasi tentang sumber daya yang tersedia untuk pelayanan	96,48	DISKOMINFO	
	Transparansi dan Partisipasi Publik	Akses publik terhadap informasi keuangan daerah	83,33	DISKOMINFO	

2.3 Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Target kinerja daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen selama kurun waktu jangka menengah lima tahun sesuai dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai terdiri dari Indikator Kinerja Utama (IKU) untuk mengukur keberhasilan tujuan RPJMD, dan Indikator Kinerja Daerah (IKD) untuk mengukur keberhasilan sasaran RPJMD dan Urusan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Sementara IKD secara teknis pada dasarnya dirumuskan dengan mengambil indikator dari program prioritas yang telah ditetapkan (outcome) atau komposisinya (impact). Suatu indikator kinerja daerah dapat dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (outcome) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah berkenaan setelah program dan kegiatan prioritas ditetapkan.

Pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan merupakan keberhasilan dari tujuan dan sasaran pembangunan daerah periode tahun 2021-2026 yang telah direncanakan. Hal ini menuntut adanya berbagai indikator kinerja pemerintah daerah. Ukuran keberhasilan/pencapaian suatu daerah membutuhkan indikator yang mampu menggambarkan kemajuan daerah tersebut. Indikator kinerja dimaksud juga diperlukan publik dalam rangka perwujudan transaksi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. IKD dan IKU sebagai sebuah indikator makro untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan daerah.

Berikut kami sajikan rekapitulasi hasil pencapaian indikator sasaran IKU Kabupaten Kebumen:

Tabel II.4 Pencapaian Indikator Sasaran IKU Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Misi	Jumlah Tujuan	Jumlah Sasaran	Jumlah Indikator Sasaran	Pencapaian Indikator Sasaran			
					SB	B	C	K
1	Misi 1	1	3	4	2	2		
2	Misi 2	1	3	5	2	3		
3	Misi 3	2	6	6	2	4		
4	Misi 4	1	2	2	1	1		
5	Misi 5	2	4	4	0	3	1	
	Jumlah	7	18	21	7	13	1	
Presentase (%)					33,33%	61,90%	4,76%	

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Hasil analisis bahwa dari 7 (tujuh) tujuan. 18 (delapan belas) sasaran dengan 21 (dua puluh satu) indikator kinerja/sasaran, diketahui bahwa 7 (tujuh) indikator sasaran atau 33,33% pencapaiannya dengan kriteria Sangat Baik, 13 (tiga belas) indikator sasaran atau 61,90% pencapaiannya dengan kriteria Baik dan 1 (satu) indikator atau 4,76% dengan pencapaiannya

kriteria cukup. Sehingga dapat disimpulkan rata-rata realisasi capaian kinerja Kabupaten Kebumen pada tahun 2024 sebesar 98,11% atau bermakna Baik.

2.3.1 Target Kinerja dalam Perjanjian Kinerja

Tabel II.5 Target Kinerja Dalam Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,65
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,00
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,70
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	74,98
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,94
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,74
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,45
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.969,07
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	6.427,00
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.994,28
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.657,54
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	14,00- 15,00
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05-5,15
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	64,00

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,28
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	88,07
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

2.3.2 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

Tabel II.6 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target Perjanjian Kinerja

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	88,65	90,38	101,95%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	71,00	67,54	95,13%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,70	4,07	110%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	74,98	75,22	100,32%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,94	8,85	111,46%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,74	13,39	97,45%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,45	93,37	99,9%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.969,07	5.276,70	88,40%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	6.427,00	6.856,48	106,68%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	12.994,28	11.704,65	90,08%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	4.657,54	4.381,31	94,07%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	14,00-15,00	15,71	95,7%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	5,05-5,15	5,07	101,55%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	64,00	68,65	107,26%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	74,28	69,86	94,05%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
	untuk kesejahteraan masyarakat					
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	88,07	58,71	66,66%
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100%
					Rata-Rata	98,11%

Keterangan = * Data Belum Rilis BPS

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

2.3.3 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

Tabel II.7 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Tahun Sebelumnya

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	88,65	90,38	101,95%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,18	65,49	71,00	67,54	95,13%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,70	4,07	110%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	74,98	75,22	100,32%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,94	8,85	111,46%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,74	13,39	97,45%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,45	93,37	99,9%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100	100%
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.090,09	8.143,7	5.969,07	5.276,70	88,40%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	7.101,9	6.427	6.856,48	106,68%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	17.356,4	12.994,28	11.704,65	90,08%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109	4.657,54	4.381,31	94,07%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	14,00-15,00	15,71	95,27%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,92	5,05-5,15	5,07	101,55%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	64,00	68,65	99,02%
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	68,17	74,28	69,86	94,05%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100	100	100%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30,00	34,89	88,07	58,71	66,66%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024		
						Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

2.3.4 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target dalam Pembangunan Jangka Menengah

Tabel II.8 Pengukuran Capaian Kinerja dibandingkan dengan Target RPJMD

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
1.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	indeks	84,02	87,69	88,65	90.38	101.95%	86	105,09%
2.	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	65,85	65,49	71	67.54	95.13%	77	87,71%
		Opini BPK	WTP/ WDP	WTP	WTP	WTP	WTP	100%	WTP	100%
3.	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	indeks	3,05	3,44	3,70	4.07	110%	3.6	113,06%
4.	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan	Angka Harapan Hidup	tahun	73,35	73,70	74,98	75.22	100.32%	74	101,65%
5.	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	tahun	7,55	7,85	7,94	8.85	111.46%	8.14	108,72%
		Harapan Lama Sekolah	tahun	13,35	13,36	13,74	13.39	97.45%	13.94	96,05%
6.	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	indeks	93,05	93,05	93,45	93.37	99.9%	93.65	99,70%
		Cakupan Perlindungan Anak	%	100	100	100	100.00	100.0%	100	100%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
7.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	miliar rupiah	5.090,09	8.143,7	5.969,07	5.276,70	88,40%	6.643,72	79,42%
8.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	miliar rupiah	4.339,7	7.101,9	6.427	6.856,48	106,68%	5.376,15	127,54%
9.	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	miliar rupiah	11.080,81	17.356,4	12.994,28	11.704,65	90,08%	14.462,95	80,93%
10.	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	miliar rupiah	3.971,70	4.109	4.657,54	4.381,31	94,07%	5.183,96	84,52%
11.	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	%	17,83	16,41	14,00-15,00	15,71	95,27%	13,00-13,50	83,63%
12.	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	6,03	5,92	5,05-5,15	5,07	101,55%	5,10-5,20	102,50%
13.	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	%	52,47	55,34	64	68,65	99,02%	70,69	97,11%

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Satuan	Realisasi 2022	Realisasi 2023	Tahun 2024			Target Akhir RPJMD	Tingkat Kemajuan
						Target	Realisasi	Capaian Kinerja		
14.	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	%	64,43	68,17	74,28	69,86	94,05%	74,45	93,83%
15.	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	%	100	100	100	100	100%	78,57	127,28%
16.	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	%	30	34,89	88,07	58,71	66,66%	43,05	81,04
17.	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	%	100	100	100	100	100%	100	100%
18.	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	%	100	100	100	100	100%	100	100%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

2.3.5 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dikaitkan Dengan Hasil (Kinerja) yang telah dicapai

Efisiensi berhubungan erat dengan konsep produktifitas atas penggunaan sumberdaya yang ada. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan menggunakan perbandingan antara output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan (cost of output). Proses kegiatan operasional dapat dikatakan efisien apabila suatu capaian SPM dapat dicapai dengan penggunaan sumber daya dan dana yang serendah-rendahnya.

$$E = \frac{\sum_{i=1}^n ((PAKi \times CKi) - RAKi)}{\sum_{i=1}^n (PAKi \times CKi)} \times 100\%$$

Keterangan:

E	: Efisiensi
PAKi	: Pagu anggaran keluaran i
RAKi	: Realisasi anggaran keluaran i
CKi	: Capaian keluaran i

Gambar II.6 Perhitungan Efisiensi Anggaran

Indikator efisiensi menggambarkan hubungan antara masukan sumber daya oleh suatu perangkat daerah misalnya biaya dan keluaran yang dihasilkan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga. Efisiensi Anggaran anggaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.9 Efisiensi Anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Tujuan								
A	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	107,82%						
	Sasaran								
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101,95%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	2.260.655.000	2.257.315.683	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	0,15%
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	779.681.000	779.312.283	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	0,05%
				Penataan Pendaftaran Penduduk	1.466.805.000	1.463.957.600	Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	100%	0,19%
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	14.169.000	14.045.800	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	0,87%
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	231.038.000	228.933.000	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100%	0,91%
				Pelayanan Pencatatan Sipil	220.899.000	219.343.000	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	0,70%

				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	10.139.000	9.590.000	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	5,41%
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	699.389.000	679.166.860	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100%	2,89%
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	42.079.000	41.571.110	Jumlah buku data kependudukan	100%	1,21%
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	657.310.000	637.595.750	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	3%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	55.680.000	51.013.321	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	8,38%
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	55.680.000	51.013.321	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	100%	8,38%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	38.127.840.000	34.652.249.175	Nilai IKM Setda	107.60%	15,53%

				DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	20.512.282.000	18.754.922.665	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,57%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	273.000.000	269.264.900	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	1,37%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.907.470.000	4.826.172.914	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	18,30%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	2.180.950.000	2.126.747.640	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2,49%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.576.263.000	2.328.036.020	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9,64%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3.277.716.000	3.120.123.660	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,81%
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.237.194.000	1.106.496.010	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	100%	10,56%

			Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	1.043.701.000	1.027.271.023	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	1,57%
			Penataan Organisasi	373.518.000	372.428.649	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	100%	0,29%
			Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	745.746.000	720.785.694	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	3,35%
			PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	34.158.774.800	31.446.523.018	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	110,85%	16,95%
			Administrasi Tata Pemerintahan	450.918.800	448.499.339	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	120%	17,11%
			Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	33.337.644.000	30.636.711.488	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	8,10%
			Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	343.182.000	334.626.679	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	2,49%
			Fasilitasi Kerjasama Daerah	27.030.000	26.685.512	Jumlah dokumen kerjasama daerah	260%	62,03%
			PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	1.565.899.000	1.481.852.876	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	109.09%	13,25%

				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	175.480.000	174.831.793	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	0,37%
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	160.453.000	158.197.607	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	100%	1,41%
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	848.321.000	772.483.108	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui SPSE	100%	8,94%
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	381.645.000	376.340.368	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	1,39%
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	22.101.087.000	18.436.675.297	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	-11,23%
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	4.376.851.000	2.744.123.019	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	85,71%	26,85%
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	453.000.000	327.857.047	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100%	27,63%
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	90.000.000	70.333.249	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun	100%	21,85%
				Peningkatan Kapasitas DPRD	3.499.260.000	2.897.928.248	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	100%	17,18%

				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	889.925.000	720.986.005	Jumlah kegiatan Fasilitas Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	18,98%
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	15.000.000	7.060.000	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	52,93%
				Fasilitasi Tugas DPRD	12.772.051.000	11.668.387.729	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	100%	8,64%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16.512.749.000	16.139.166.883	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,74%	0%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	25.311.000	24.846.300	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	1,84%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.989.016.000	15.648.687.060	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,13%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	125.192.000	123.693.420	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	50%	-97,61%

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	50.000.000	46.118.500	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	1900%	95,15%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	168.230.000	143.691.220	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	-13,88%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	155.000.000	152.130.383	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72,03%	-36,25%
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	1.947.171.000	1.195.890.768	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	108,65%	43,47%
				Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	1.379.086.000	697.117.534	Jumlah Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	49,45%
				Mutasi dan Promosi ASN	409.279.000	354.692.265	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	100%	13,34%
				Pengembangan Kompetensi ASN	54.506.000	50.876.910	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	100%	6,66%
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	104.300.000	93.204.059	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	10,64%
				PROGRAM PENGEMBANGAN	1.386.653.000	1.239.123.660	Prosentase pejabat struktural yang telah	79,95%	-11,76%

			SUMBER DAYA MANUSIA			mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan		
			Pengembangan Kompetensi Teknis	98.673.000	88.821.900	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	9,98%
			Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	1.287.980.000	1.150.301.760	Sertifikasi. Kelembagaan. Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	10,69%
			PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	37.000.000	36.800.645	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	0,54%
			Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	37.000.000	36.800.645	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	100%	0,54%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.328.449.000	4.094.327.387	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,20%	-8,48%
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.581.000	21.488.400	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0.43%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.791.610.000	3.563.703.468	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,01%

			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	77.524.000	77.050.691	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	0,61%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	79.879.000	78.045.000	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	100%	2,30%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	165.853.000	164.602.868	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102,50%	3,17%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	192.002.000	189.436.960	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	1,34%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	21.610.820.000	20.343.316.013	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,20%	-7,95%
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	163.923.000	161.425.331	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	1,52%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	19.867.293.000	18.627.346.111	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,24%
			Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	152.872.000	152.492.938	Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	100%	0,25%

			Administrasi Umum Perangkat Daerah	329.782.000	324.988.805	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	1,45%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	99.721.000	98.344.400	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,56%	-1,09%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	393.391.000	388.421.233	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,26%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	598.223.000	590.297.195	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	1,32%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	66.492.450.000	61.983.065.241	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,78%
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	297.920.000	290.521.768	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	2,48%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	60.448.545.000	56.206.863.670	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	7,02%

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	593.189.000	564.904.100	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	4,77%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.490.499.000	1.419.607.701	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,76%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	2.025.006.000	1.908.628.430	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,75%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	34.150.817.300	33.291.618.212	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,99%	7,15%
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	34.150.817.300	33.291.618.212	Presentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	2,52%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	517.972.000	514.263.390	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	0,72%
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	517.972.000	514.263.390	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	0,72%

				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	3.022.536.000	2.914.639.684	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,88%	3,46%
				Fasilitasi. Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	3.022.536.000	2.914.639.684	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	3,57%
2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	95.13%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	163.094.000	153.443.299	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	16,76%
		Opini BPK	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	163.094.000	153.443.299	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	113,20%	16,89%
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	16.772.000	16.684.258	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100%	0,52%
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	16.772.000	16.684.258	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	100%	0,52%

				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	348.498.000	347.562.634	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	110,54%	9,78%
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	268.498.000	267.755.597	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	0,28%
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	30.000.000	29.944.025	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	100%	0,19%
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	50.000.000	49.863.012	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	112,50%	11,35%
				PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	1.248.079.000	1.244.077.503	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	111,11%	10,29%
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.033.869.000	1.030.918.992	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	100%	0,29%
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	121.407.000	120.878.371	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	100%	0,44%

				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	92.803.000	92.280.140	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	0,56%
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	749.671.000	748.336.917	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	100%	0,18%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	249.228.000	248.407.536	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	0,33%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	231.919.000	231.706.911	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	0,09%
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	268.524.000	268.222.470	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100%	0,11%
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	710.262.827.000	704.063.434.451	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	74,41%	-33,21%
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	943.869.000	923.435.881	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	60%	-63,06%

				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	507.274.000	494.749.923	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	2,47%
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	405.806.000	399.106.081	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	75,17%	-30,84%
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	708.405.878.000	702.246.142.566	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	0,87%
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.382.346.000	1.355.435.911	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1,95%
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.382.346.000	1.355.435.911	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	1,95%
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	5.184.308.000	5.048.926.033	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	102,31%	4,81%
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	5.184.308.000	5.048.926.033	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	100%	2,61%
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	821.085.000	819.392.233	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	102,89%	3,01%
				Penelitian dan Pengembangan Bidang	603.147.000	601.911.202	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang	120%	16,84%

				Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan			Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun		
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	217.938.000	217.481.031	Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	116,67%	14,47%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.750.226.000	8.408.219.045	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106%	9,35%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	21.840.000	21.681.800	Jumlah Perencanaan. Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220%	54,87%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.302.081.000	7.967.059.943	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,04%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.000.000	24.887.200	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,25%	-1492,78%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	109.649.000	109.584.090	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,06%

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	152.439.000	150.678.763	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,15%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	139.217.000	134.327.249	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	94,12%	-2,52%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	998.543.000	993.246.682	Level Kapabilitas APIP	100%	0,53%
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	819.131.000	817.429.930	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	168,15%	40,65%
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	179.412.000	175.816.752	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	118,92%	17,59%
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	268.940.000	260.753.778	Nilai Persepsi Korupsi	108,70%	10,80%
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	16.532.000	9.257.300	Jumlah Perumpusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	44%
				Pendampingan dan Asistensi	252.408.000	251.496.478	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	216,67%	54,01%

				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.428.768.000	5.132.444.366	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,46%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	44.118.000	44.067.500	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0,11%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.336.333.000	4.068.258.841	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,18%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	10.000.000	9.888.130	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun	100%	1,12%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	520.649.000	514.303.868	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,22%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	80.000.000	71.845.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	10,19%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	199.668.000	191.465.951	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	4,11%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	238.000.000	232.615.076	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah	100%	2,26%

				Urusan Pemerintahan Daerah			penunjang urusan pemerintahan daerah		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	24.132.458.000	21.923.770.132	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	-21,13%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	86.487.000	82.790.550	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	75%	-27,63%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.519.967.000	13.575.841.080	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	75%	-16,63%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	20.760.000	14.001.798	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Semin ar	100%	32,55%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	336.000.000	328.863.373	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	-30,50%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.057.605.000	6.876.656.439	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2,56%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	589.639.000	533.642.788	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9,50%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	522.000.000	511.974.104	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,92%
3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	110%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	3.114.504.000	3.059.992.533	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,03%	14,58%
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	2.310.798.000	2.261.457.192	Jumlah paket layanan infrastruktur	52,94%	-84,86%
				Pengelolaan e-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	803.706.000	798.535.341	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	104,17%	4,62%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.533.097.000	4.246.770.101	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,32%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	24.000.000	23.698.250	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	1,26%

				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.859.113.000	2.671.488.830	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	6,56%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	195.307.000	156.962.000	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50%	-60,73%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.000.000	79.633.900	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,46%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	442.777.000	436.920.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,32%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	563.028.000	516.721.149	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	8,22%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	368.872.000	361.345.972	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	2,04%
	Tujuan								
B	Meningkatkan aksesibilitas. kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100%						
	Sasaran								

1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	120.786.404.767	118.097.574.494	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100%	2,23%
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	29.303.328.000	29.128.483.930	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100%	0,60%
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	91.187.480.767	88.699.663.127	Presentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	100%	2,73%
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	37.839.000	14.174.000	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	62,54%
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C. D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	257.757.000	255.253.437	Persentase perpanjangan izin operasional RS kls C dan D di Kab.Kebumen.	100%	0,97%
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER	2.940.049.000	2.828.608.897	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100%	3,79%

				DAYA MANUSIA KESEHATAN					
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	212.668.000	203.204.902	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDMK	100%	4,45%
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.727.381.000	2.625.403.995	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDMK Tingkat Daerah Kab/ kota	100%	3,74%
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	586.275.000	582.465.278	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100%	0,65%
				Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	90.181.000	87.585.981	Jumlah pemberian Ijin dan pengawasan apotik. toko obat. toko alat kesehatan dan optikal (UMOT)	100%	2,88%
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin	421.988.000	421.262.294	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi	100%	0,17%

				Produksi. untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga			oleh RT dan pengawasan produk PIRT		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	2.375.427.000	2.354.647.829	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	126,85%	21,86%
				Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	71.755.000	71.706.329	Persentase terlaksananya Advokasi. Pemberdayaan. Kemitraan. Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	126,85%	21,22%
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	47.289.000	46.946.750	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	0,72%
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2.256.383.000	2.235.994.750	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,90%

				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	431.690.000	424.769.500	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	1,60%
				Penyadaran. Pemberdayaan. dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota. Wirausaha Muda Pemula. dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	431.690.000	424.769.500	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	878,06%	88,79%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	13.609.191.000	13.140.702.758	Persentase Prestasi Olahraga	182,61%	47,12%
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	9.230.603.000	8.884.004.147	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	83,59%	-15,13%
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.172.817.000	1.105.293.721	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	100%	5,76%

				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	472.286.000	417.919.890	Jumlah prestasi olahraga	100%	11,51%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	2.733.485.000	2.733.485.000	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	69,23%	-44,44%
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	417.769.000	415.057.800	Cakupan Prestasi Kepramukaan	300%	66,88%
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	417.769.000	415.057.800	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	0,65%
2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	Rata-rata Lama Sekolah	111%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	272.878.673.424	269.401.625.676	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	1,27%
		Harapan Lama Sekolah	97%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	141.152.394.424	139.421.912.882	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	103,71%	4,76%
				Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	91.968.161.000	90.840.979.334	APK SMP/MTs/Paket B	87,01%	-13,52%
				Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	35.436.003.000	34.887.576.266	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	107,54%	8,45%
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	4.322.115.000	4.251.157.194	Persentase Pendidikan Non Formal yang dikelola	100%	1,64%

				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	418.283.000	412.168.312	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	130,38%	24,42%
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	325.269.000	319.673.884	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	121,17%	18,89%
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	93.014.000	92.494.428	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	159,81%	37,77%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	838.312.335.851	796.151.655.270	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	1,07%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	216.957.000	215.972.546	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	0,45%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	835.753.497.851	793.783.650.074	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,02%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	55.896.000	55.743.200	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	100%	0,27%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	998.329.000	875.852.350	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	12,27%

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	919.676.000	868.910.354	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,52%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	367.980.000	351.526.746	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,47%
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.608.214.000	3.335.969.888	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7,55%
			Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	28.750.000	28.253.125	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	1,73%
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.626.122.000	2.413.015.138	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	8,11%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	132.840.000	132.102.967	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,55%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	76.552.000	76.259.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0,38%

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	560.350.000	506.099.158	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	9,68%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	183.600.000	180.240.500	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,83%
3	Meningkatnya perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pembangunan Gender	100%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	499.153.000	486.321.232	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	92,29%	-5,57%
		Cakupan Perlindungan Anak	100%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	54.063.000	52.607.800	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2,69%
				Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	445.090.000	433.713.432	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	2,56%

				PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	106.707.000	105.164.897	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	1,45%
				Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	35.067.000	34.077.997	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	2,82%
				Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	71.640.000	71.086.900	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100%	0,77%
				PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	11.095.000	10.952.400	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	147,03%	32,86%
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	11.095.000	10.952.400	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	1,29%

				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	32.369.000	32.068.800	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100%	0,93%
				Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	32.369.000	32.068.800	Jumlah dokumen Pengumpulan. Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,93%
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	247.092.000	242.976.754	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) 1. Pratama. 2.Madya 3.Nindya 4.Utama	100%	1,67%
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	107.886.000	106.613.750	Jumlah Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah. Nonpemerintah. dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	1,18%
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas	139.206.000	136.363.004	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan	100%	2,04%

				Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota			Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota		
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	53.213.000	51.535.000	Cakupan Perlindungan Anak	100%	3,15%
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	53.213.000	51.535.000	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	3,15%
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	1.035.341.000	1.004.489.211	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	183,51%	47,13%
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	50.188.000	49.715.151	Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan	100%	0,94%
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk	985.153.000	954.774.060	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian	100%	3,08%

			Cakupan Daerah Kabupaten/Kota			Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten		
			PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	9.364.103.000	8.337.933.675	Cakupan Peserta KB Aktif	104,05%	14,42%
			Pelaksanaan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	1.953.461.000	1.903.713.499	Jumlah Kegiatan Advokasi. Komunikasi. Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	2,55%
			Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	2.183.297.000	2.172.982.996	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	100%	0,47%
			Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	3.951.906.000	2.985.912.280	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	24,44%
			Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	1.275.439.000	1.275.324.900	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten	100%	0,01%

				dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB			dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7.072.043.000	6.900.839.728	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	119,63%	18,43%
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	493.749.000	484.458.478	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	133,33%	26,41%
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	6.578.294.000	6.416.381.250	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100%	2,46%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	225.337.192.612	216.450.552.947	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	3,94%

				DAERAH KABUPATEN/KOTA					
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	56.145.000	54.257.908	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	3,36%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	142.783.224.000	139.206.436.510	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	2,51%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	25.702.000	25.700.000	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	0,01%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	278.100.000	271.155.129	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,50%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	149.867.000	140.544.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	6,22%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	818.084.000	754.348.666	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	7,79%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	385.992.000	379.239.297	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,75%

				Peningkatan Pelayanan BLUD	80.840.078.612	75.618.871.437	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	100%	6,46%
	Tujuan								
C	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil. berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	101%						
	Sasaran								
1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	88.4%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	2.189.321.000	2.165.073.361	Persentase Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.131,47%	91,26%
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Dusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	797.794.000	777.532.104	jumlah produksi perikanan tangkap	139,49%	30,13%
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	126.729.000	125.938.900	jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan.	88,57%	-12,20%

							pendidikan. pelatihan dan pemantauan		
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	1.201.025.000	1.198.296.182	jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	100%	0,23%
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	63.773.000	63.306.175	presentase kapal perikanan yang berijin	103,19%	3,80%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	1.997.478.000	1.912.697.358	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,93%	13,68%
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	30.973.000	30.945.200	jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang ditertibkan	120%	16,74%
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	1.966.505.000	1.881.752.158	Jumlah Peningkatan produksi perikanan budidaya	138,38%	30,85%

				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	47.127.000	46.402.517	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	122,73%	19,77%
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai. Danau. Waduk. Rawa. dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	47.127.000	46.402.517	jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100%	1,54%
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	353.061.000	342.960.888	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	1.215,94%	92,01%
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	45.005.000	43.828.265	jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapatkan pembinaan	100%	2,61%
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	308.056.000	299.132.623	Jumlah Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	22,17%	-337,95%

				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	2.739.133.500	2.654.421.622	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,33%	7,12%
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	1.850.534.000	1.804.654.208	Persentase penyediaan sarana pertanian	105,42%	7,49%
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan. Tumbuhan. dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	689.612.250	654.078.312	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	10,34%	-816,86%
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	66.692.000	65.648.377	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	101,76%	3,27%
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecur	15.308.000	14.823.500	Persentase tingkat pengecur obat hewan yang diawasi	100%	3,17%
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak. dan Hijauan	116.987.250	115.217.225	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	100%	1,51%

				Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	20.896.180.000	19.981.012.305	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	87,08%	-9,80%
				Pengembangan Prasarana Pertanian	1.510.471.000	1.394.897.822	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	100%	7,65%
				Pembangunan Prasarana Pertanian	14.866.727.000	14.247.978.667	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	4,16%
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	4.518.982.000	4.338.135.816	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100%	4%
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	2.317.768.500	2.283.826.447	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	642,95%	84,67%

				Penjaminan Kesehatan Hewan. Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	290.288.250	280.902.247	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	88,55%	-9,27%
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	147.706.500	144.731.800	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	3.081,25%	96,82%
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.578.341.000	1.562.106.800	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	3.784,14%	97,38%
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	283.266.250	278.143.100	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	1,81%
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	18.166.500	17.942.500	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	100%	1,23%
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN	403.649.000	394.283.700	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.538,46%	93,65%

				PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN					
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	403.649.000	394.283.700	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	10.022,25%	99,03%
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	39.299.000	38.644.200	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100%	1,67%
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	19.203.000	18.884.100	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	100%	1,66%
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan. Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	20.096.000	19.760.100	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	100%	1,67%
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	2.164.320.000	1.967.740.095	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	100%	9,08%
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	2.164.320.000	1.967.740.095	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	100%	9,08%

2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	106%	PROGRAM PENATAAN DESA	44.736.000	44.608.794	Persentase Desa Tertata	190,82%	47,74%
				Penyelenggaraan Penataan Desa	44.736.000	44.608.794	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	150%	33,52%
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	2.235.815.600	2.220.155.010	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	0,70%
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	2.235.815.600	2.220.155.010	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	100%	0,70%
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	6.068.698.000	5.839.727.026	Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya	100%	3,77%
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	6.068.698.000	5.839.727.026	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	3,77%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN	1.058.443.000	1.057.894.433	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100%	0,05%

				MASYARAKAT HUKUM ADAT					
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.058.443.000	1.057.894.433	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terasilitasi	100%	0,05%
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	16.072.000	16.008.223	Persentase Koperasi Sehat	165,76%	39,91%
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	16.072.000	16.008.223	Jumlah koperasi akuntabel	188,89%	47,27%

				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	166.797.000	147.510.662	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	100%	11,56%
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	166.797.000	147.510.662	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	100%	11,56%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	936.543.000	936.281.000	Persentase Advokasi kepada Koperasi	413,33%	75,81%
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	936.543.000	936.281.000	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	104,17%	4,03%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	111.700.000	110.435.803	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	108,82%	9,14%
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan. Kemitraan. Kemudahan Perizinan. Penguatan	111.700.000	110.435.803	Jumlah usaha mikro yang terbina	720,89%	86,29%

				Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	3.950.334.000	3.899.299.535	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	611,11%	83,85%
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	3.950.334.000	3.899.299.535	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	100%	1,29%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.390.858.000	4.092.607.050	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,07%	-0,15%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	94.473.000	93.343.000	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,20%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.394.000	20.290.900	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0,51%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.826.493.000	3.534.987.496	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7,62%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	78.539.000	75.950.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	400%	75,82%

				Urusan Pemerintah Daerah			penunjang utusan pemerintah daerah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.500.000	155.542.992	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	0,61%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	214.459.000	212.492.662	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0,92%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	11.273.106.000	10.178.272.497	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	9,71%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	57.787.000	57.618.530	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100%	0,29%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10.138.292.000	9.131.790.539	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	116,67%	22,80%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	206.010.000	205.378.756	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	0,31%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang	31.439.000	28.793.000	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah	100%	8,42%

				Urusan Pemerintah Daerah			penunjang urusan pemerintah daerah		
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	599.578.000	516.196.899	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	-14,79%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	240.000.000	238.494.773	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	100%	0,63%
3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	90%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	6.725.227.040	6.546.329.085	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	100,39%	3,04%
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	1.127.108.040	1.125.188.670	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	0,17%
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	5.545.420.000	5.368.545.465	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	100%	3,19%
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	52.699.000	52.594.950	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100%	0,20%
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	2.028.931.000	2.003.003.918	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	154,76%	36,21%

				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik. Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	2.028.931.000	2.003.003.918	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	153,63%	35,74%
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	73.452.000	73.179.942	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	100%	0,37%
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	73.452.000	73.179.942	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	0,37%
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	16.095.784.670	15.231.044.425	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	88,50%	-6,92%
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	14.734.804.670	14.038.878.851	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100%	4,72%
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	1.360.980.000	1.192.165.574	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap	100%	12,40%

			Masyarakat di Wilayah Kerjanya			Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		
			PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	166.762.000	166.530.321	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	-200,67%	149,76%
			Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	88.256.000	88.138.641	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100%	0,13%
			Pengendalian Harga. dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	78.506.000	78.391.680	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100%	0,15%
			PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	88.108.000	88.068.400	Nilai Ekspor Perdagangan	1.988%	94,97%
			Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	88.108.000	88.068.400	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	100%	0,04%

				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	163.543.000	160.461.367	Persentase UTTP yang Tertera	213,41%	54,03%
				Pelaksanaan Metrologi Legal. Berupa Tera. Tera Ulang. dan Pengawasan	163.543.000	160.461.367	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	213,44%	54,03%
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	1.031.470.000	1.026.642.517	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	111,79%	10,96%
				Pelaksanaan Promosi. Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	1.031.470.000	1.026.642.517	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	100,29%	0,75%
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	1.278.454.000	1.270.313.684	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	152,62%	34,89%
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	1.278.454.000	1.270.313.684	Jumlah Industri yang terbina	100%	0,64%
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	86.156.000	85.748.500	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	100%	0,47%

				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI). Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI). Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	86.156.000	85.748.500	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	100%	0,47%
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	36.116.000	35.166.200	Jumlah Dokumen Informasi Industri	100%	2,63%
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI. IPUI. IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	36.116.000	35.166.200	Jumlah dokumen Data Industri	100%	2,63%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.883.050.000	6.637.387.975	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	3,57%
				Perencanaan. Penganggaran. dan	81.310.000	81.120.300	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi	100%	0,23%

				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			kinerja perangkat daerah yang tersusun		
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.672.299.000	5.452.732.200	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	3,87%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	370.000.000	362.758.995	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun	100%	1,96%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	213.692.000	213.356.372	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,16%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	105.000.000	99.730.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,76%	-73,44%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	300.642.000	288.212.578	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,13%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	140.107.000	139.477.530	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0,45%
4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	94%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	92.504.000	90.426.260	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	169,57%	42,35%

				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	73.259.000	71.886.810	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	100%	1,87%
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	19.245.000	18.539.450	Jumlah dokumen potensi investasi	100%	3,67%
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	439.485.000	304.087.429	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	50%	-38,38%
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	439.485.000	304.087.429	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	100%	30,81%
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	344.389.000	326.979.419	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	5,06%
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi	344.389.000	326.979.419	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100%	5,06%

				Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota					
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	604.104.000	566.080.590	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	100%	6,29%
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	604.104.000	566.080.590	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	6,29%
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	21.571.000	21.357.700	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	100%	0,99%
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	21.571.000	21.357.700	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	0,99%
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	31.459.000	30.755.750	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100%	2,24%
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung	31.459.000	30.755.750	Jumlah dokumen penatausahaan izin	100%	2,24%

				Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota			pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota		
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	118.638.000	111.578.435	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	50%	-88,10%
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	118.638.000	111.578.435	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	50%	-88,10%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.486.405.000	3.546.556.851	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20,95%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	19.153.000	18.994.000	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	250%	60,33%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.520.591.000	2.592.908.048	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	141,67%	48,01%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	162.833.000	162.337.535	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	116,67%	14,55%

				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	53.559.000	51.393.500	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	4,04%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	420.711.000	414.384.284	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	1,50%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	309.558.000	306.539.484	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	-98,05%
	Tujuan								
D	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	102%						
	Sasaran								
1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	95%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.033.695.500	4.311.065.495	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	14,36%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	97.588.000	96.768.300	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0,84%

			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.837.035.000	3.162.106.716	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	17,59%
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.558.000	147.333.300	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	2,79%
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	112.420.000	105.332.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41,67%	-124,87%
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	355.464.500	323.809.717	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	8,91%
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	479.630.000	475.715.462	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0,82%
			PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	241.043.000	233.214.002	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	112,85%	14,26%
			Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	241.043.000	233.214.002	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerah kabupaten/kota	100%	3,25%
			PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN	2.810.000	2.803.500	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	0,23%

				KORBAN TINDAK KEKERASAN					
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	2.810.000	2.803.500	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	100%	0,23%
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	3.361.523.000	3.331.565.207	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	104,15%	4,84%
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar. Anak Terlantar. Lanjut Usia Terlantar. serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	2.775.574.000	2.763.443.875	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	102,75%	3,10%
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	585.949.000	568.121.332	Jumlah Migran yang diberikan fasilitas pemulangan	100%	3,04%

				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	4.748.486.000	4.633.765.218	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	113,07%	13,69%
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	4.748.486.000	4.633.765.218	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	100%	2,42%
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	859.764.000	857.487.223	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	0,26%
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	580.635.000	578.787.329	jumlah kegiatan perlindunan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	100%	0,32%
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	279.129.000	278.699.894	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100%	0,15%
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	155.451.500	144.135.900	Persentase TMP yang Dikelola	100%	7,28%

				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	155.451.500	144.135.900	Persentase TMP yang Dikelola	100%	7,28%
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	52.611.000	52.297.175	Persentase Desa yang Tertangani Kedaulatan dan Kemandirian Pangan	93,01%	-6,88%
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	52.611.000	52.297.175	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	93,01%	-6,88%
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	626.697.000	611.360.467	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100,92%	3,33%
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi	113.464.000	112.738.420	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100%	0,64%

				Pasokan dan Harga Pangan					
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	331.000.000	319.767.047	Persentase cadangan pangan yang dikelola	141,60%	31,78%
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	182.233.000	178.855.000	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan. bantuan bibit atau benih tanaman. saprotan untuk pemanfaatan pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal	101,17%	2,99%
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	476.620.000	466.959.909	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	98,72%	0,76%
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	10.971.000	10.877.300	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	100%	0,85%
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	465.649.000	456.082.609	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	100%	2,05%
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	88.936.000	86.912.000	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,95%	3,19%

				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	88.936.000	86.912.000	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	100%	2,28%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	19.767.359.000	18.671.350.330	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,54%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	138.581.000	129.210.200	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	6,76%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	18.383.155.000	17.336.752.544	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	5,69%
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	28.814.000	28.712.800	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	100%	0,35%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	227.529.000	223.412.361	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	1,81%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	170.220.000	166.513.000	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,55%	-79,34%

				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	407.176.000	379.537.578	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,79%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	411.884.000	407.211.847	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	1,13%
2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	102%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	760.653.876	757.679.450	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	96,42%	-3,31%
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	743.044.876	740.102.102	Jumlah Paket Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	120%	17%
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	17.609.000	17.577.348	Jumlah LPKS yang dibina	100%	0,18%
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	506.938.000	497.799.699	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	91,30%	-7,56%
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	253.232.000	252.942.086	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	136,31%	26,72%
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	253.706.000	244.857.613	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	112,72%	14,38%

				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	145.345.000	144.233.650	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	130%	23,67%
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	145.345.000	144.233.650	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan	130%	23,67%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.240.999.000	5.976.828.662	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	-283,07%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.254.000	92.416.026	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	0,90%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	22.000.000	20.450.000	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	7,05%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	378.168.000	366.684.209	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	3,04%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	156.519.000	155.779.638	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	0,47%
	Tujuan								
E	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan yang berkelanjutan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	106%						
	Sasaran								
1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	107%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	7.586.305.000	7.282.890.924	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	95,45%	-0,57%
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	211.876.000	209.647.287	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	100%	1,05%
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan	7.374.429.000	7.073.243.637	Jumlah areal irigasi yang terlayani	71,43%	-34,28%

				Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	10.967.274.000	10.601.090.314	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	110,04%	12,16%
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	10.967.274.000	10.601.090.314	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	124,69%	22,48%
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	1.663.642.000	1.653.867.333	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	90,01%	-10,45%
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	1.663.642.000	1.653.867.333	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	78,57%	-26,52%

				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	13.856.340.000	13.562.355.313	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100,41%	2,53%
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota. Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	13.856.340.000	13.562.355.313	Presentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	100,41%	2,53%
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	2.802.878.000	2.615.062.979	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100%	6,70%
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	2.802.878.000	2.615.062.979	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	280%	66,68%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	83.141.972.000	81.326.977.366	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	92,45%	-5,80%
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	83.141.972.000	81.326.977.366	Jumlah panjang jalan yang tertangani	136,80%	28,50%
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	101.114.000	95.532.360	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100%	5,52%

				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	50.360.000	47.416.750	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	50%	-88,31%
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	50.754.000	48.115.610	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	1,61%	-5.777,70%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	433.565.000	429.589.114	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100%	0,92%
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	246.780.000	243.680.104	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	100%	1,26%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	58.357.000	58.238.442	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	55,56%	-79,63%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	96.928.000	96.369.448	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	277,69%	64,20%
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian	31.500.000	31.301.120	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	108,33%	8,28%

				Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota					
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	498.787.000	497.945.417	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	0,17%
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	29.999.000	29.987.000	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	300%	66,68%
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	468.788.000	467.958.417	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dir elokasi	40%	-149,56%
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	1.211.660.000	1.199.449.762	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	230,26%	57,01%
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	683.825.000	681.322.680	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1.012,75%	90,16%
				PROGRAM PERUMAHAN DAN	804.717.000	727.378.224	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	84,59%	-6,85%

				KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH					
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	804.717.000	727.378.224	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	84,85%	-6,53%
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA. SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	10.413.071.000	10.383.899.562	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	313,68%	68,21%
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	10.413.071.000	10.383.899.562	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	111,11%	10,25%
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	37.559.496.000	35.986.259.505	Indeks Infrastruktur Perhubungan	95,79%	-0,02%
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	31.263.164.000	29.936.906.979	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	108,34%	11,61%
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C			Pesentase ketersediaan Terminal Tipe C (Jumlah terminal yang terbangun dibagi jumlah terminal yang seharusnya	80,01%	

				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	168.568.000	138.275.708	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	100%	17,97%
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	375.668.000	367.329.665	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik (yaitu Jumlah alat uji KIR yang baik dibagi jumlah alat uji KIR yang ada)=9 unit 100% baik	100%	2,22%
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	544.385.000	481.090.007	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	100%	11,63%
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	13.425.000	12.780.700	Jumlah rakor penilaian andalalin	83%	-14,70%
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	2.387.332.000	2.386.508.319	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	100%	0,03%

				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	2.740.437.000	2.597.300.127	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	100%	5,22%
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	66.517.000	66.068.000	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	100%	0,68%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	7.745.532.000	6.849.003.117	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	11,57%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	46.706.000	46.543.000	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	85,71%	-16,26%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.339.981.000	5.480.255.309	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	75%	-15,25%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	16.081.000	15.699.500	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	2,37%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	230.060.000	229.619.300	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	75%	-33,08%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	44.879.000	44.068.500	jumlah unit pengadaan barang milik daerah	800%	87,73%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	137.470.000	134.277.900	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	-30,24%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	930.355.000	898.539.608	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	75%	-28,77%
2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	79.863.000	79.178.220	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	110%	9,87%
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	79.863.000	79.178.220	jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	150%	33,90%
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN	767.912.000	757.858.518	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,52%	-9,02%

				DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP					
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	280.521.000	278.812.866	jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	0,61%
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	68.881.000	67.564.685	jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	54,55%	-79,83%
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	418.510.000	411.480.967	jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	126,67%	22,38%
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	2.564.569.000	2.550.329.754	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	110,02%	9,61%
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	2.564.569.000	2.550.329.754	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	100%	0,56%
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN	29.677.000	29.454.405	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	100,43%	1,17%

				BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)					
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	29.677.000	29.454.405	jumlah fasilitasi dan verifikasi limbah B3 dan LB3	103,33%	3,95%
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	58.055.000	57.870.881	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	82,84%	-20,33%
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	58.055.000	57.870.881	jumlah unit usaha yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan. ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	55,20%	-80,58%
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN. PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	64.201.000	63.683.650	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	98,59%	-0,61%

				Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	64.201.000	63.683.650	jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	840%	88,19%
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	37.306.000	36.902.610	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	102,04%	3,06%
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	37.306.000	36.902.610	jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	112,50%	12,07%
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	10.297.000	10.182.359	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	113,33%	12,74%
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	10.297.000	10.182.359	Jumlah fasilitasai pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	113,33%	12,75%
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	10.972.281.000	10.869.485.547	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	184,22%	46,23%

				Pengelolaan Sampah	10.972.281.000	10.869.485.547	jumlah kegiatan pengelolaan sampah	100%	0,94%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	12.626.412.000	11.836.084.193	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	-24,99%
					12.626.412.000	11.836.084.193	Peningkatan Nilai IKM	101,19%	7,36%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	143.988.000	143.596.753	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0,27%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.522.604.000	10.737.367.208	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	6,81%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	27.000.000	24.324.324	jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	9,91%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	141.463.000	141.385.950	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,05%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	66.630.000	66.346.000	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0,43%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	463.724.000	462.080.807	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	0,35%

				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	261.003.000	260.983.151	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,33%	-19,99%
	Tujuan								
F	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	100%						
	Sasaran								
1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100%	PROGRAM Penguatan IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	568.417.000	568.319.522	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	680,26%	85,30%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	568.417.000	568.319.522	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	0,02%
				PROGRAM Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan	39.263.803.000	39.072.218.615	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	109,33%	8,98%

				MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK					
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	39.263.803.000	39.072.218.615	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik. Etika Budaya Politik. Peningkatan Demokrasi. Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan. Perwakilan dan Partai Politik. Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah. serta Pemantauan Situasi Politik	100%	0,49%
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	76.108.000	75.885.540	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	0,29%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	76.108.000	75.885.540	Jumlah Pengurus Orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti	100%	0,29%

				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			Pembinaan dan Jumlah Dokumen data base Ormas/LSM dan Partai Politik		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI. SOSIAL. DAN BUDAYA	159.908.000	152.823.600	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	714,73%	86,63%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi. Sosial dan Budaya	159.908.000	152.823.600	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100%	4,43%
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	2.706.422.000	1.553.809.375	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA. Ideologi. Politik. Radikal dan Sumber Daya	140%	58,99%
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional	2.706.422.000	1.553.809.375	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan	100%	42,59%

				dan Penanganan Konflik Sosial			Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.500.835.000	3.338.367.122	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,64%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	6.972.000	6.971.700	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.177.391.000	3.021.669.755	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	4,90%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	90.713.000	90.112.532	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,66%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.300.000	25.175.000	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	0,49%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	116.760.000	110.958.055	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	4,97%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	83.699.000	83.480.080	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah	55,56%	-79,53%

				Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		
2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	67%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	2.546.220.000	2.533.074.055	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	101,55%	2,04%
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	116.409.000	116.260.250	Presentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	101,29%	1,40%
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	2.429.811.000	2.416.813.805	Presentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	50%	-98,93%
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	1.494.719.960	1.470.143.910	Persentase Benda. Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	323,01%	69,55%
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	1.494.719.960	1.470.143.910	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	305,97%	67,85%
	Tujuan								
G	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100%						
	Sasaran								

1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	12.980.594.000	12.815.025.076	Persentase Penegakan Perda	100%	1,28%
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	12.431.759.000	12.269.445.506	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	80%	-23,37%
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	541.560.000	538.682.370	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	100%	0,53%
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	7.275.000	6.897.200	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	100%	5,19%
				PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN. PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	2.368.778.000	2.337.400.341	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100%	1,32%
				Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman.	2.317.811.000	2.288.775.171	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan. Pengendalian. Pemadaman.	100%	1,25%

				Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			Penyelamatan. dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota		
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	17.954.000	17.899.950	Presentase pendataan sarpras proteksi	100%	0,30%
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	33.013.000	30.725.220	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	6,93%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	6.462.389.900	6.069.467.534	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,08%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	20.247.000	20.183.400	Jumlah dokumen perencanaan. penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	0,31%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5.295.974.000	4.921.001.669	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	7,08%
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	189.018.000	183.551.400	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	2,89%

				Administrasi Umum Perangkat Daerah	80.658.000	80.300.494	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0,44%
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	39.891.000	39.698.000	Presentase terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100%	0,48%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	143.900.000	135.189.203	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	6,05%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	692.701.900	689.543.368	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	0,46%
2	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	5.636.760.000	5.366.652.416	Persentase Desa Tangguh Bencana	200%	52,40%
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	292.446.000	290.995.200	Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	0,50%
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	1.196.342.000	1.183.373.014	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	1,08%

				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	2.412.300.000	2.274.605.169	Presentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	5,71%
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	1.735.672.000	1.617.679.033	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	6,80%
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	3.736.442.000	3.487.114.715	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	6,67%
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	16.000.000	15.974.700	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	0,16%
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	2.947.510.000	2.720.112.190	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	7,71%
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	210.295.000	209.308.331	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	0,47%
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	239.687.000	227.427.911	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	5,11%
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang	322.950.000	314.291.583	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah	100%	2,68%

				Urusan Pemerintahan Daerah			Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		
Rata-rata Tujuan dan Sasaran			99,31%	Total Efisiensi					4,66%

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Dari tabel di atas dapat disimpulkan efisiensi anggaran Pemerintah Kabupaten Kebumen mempunyai nilai baik berada pada angka 4,66% dari pagu anggaran neto (dari rentang nilai efisiensi antara – 20% sampai dengan 20%)

Ditinjau dari aspek efisiensi, Pemerintah Kabupaten Kebumen telah melaksanakan program dan kegiatan dengan baik. Adapun permasalahan yang perlu ditindaklanjuti adalah dalam pelaksanaan anggaran kedepan untuk membuat daftar pelaksanaan anggaran sampai dengan akhir tahun dan memastikan seluruh perencanaan penganggaran dapat dilaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan.

2.3.6 Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target Kinerja

Keterkaitan Sasaran dengan Program/ Kegiatan pendukung dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel II.10 Program dan Kegiatan yang menunjang pencapaian Target kinerja

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
	Tujuan						
1	Mewujudkan reformasi tata kelola pemerintahan yang bersih dan baik	Indeks Reformasi Birokrasi	107.82%				
	Sasaran						
1.1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	101.95%	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Cakupan Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	Menunjang
				Pelayanan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Layanan Pendaftaran Penduduk	100%	Menunjang
				Penataan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penataan Administrasi Kependudukan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Administrasi Kependudukan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Cakupan Layanan Pencatatan Sipil	100%	Menunjang
				Pelayanan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Pelayanan Pencatatan Sipil	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	Persentase Penggunaan Data Informasi Administrasi Kependudukan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan	Jumlah buku data kependudukan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Jumlah Kegiatan Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase OPD yang Mengisi Website Satu Data Sesuai SOP	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen statistik sektoral yang tersedia	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Nilai IKM Setda	107,60%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan dan operasional KDH dan WKDH	100%	Menunjang
				Fasilitasi Kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	Jumlah bulan penyediaan fasilitasi kerumahtanggaan Sekretariat Daerah	100%	Menunjang
				Penataan Organisasi	Jumlah dokumen kegiatan Penataan Organisasi	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Jumlah layanan Fasilitasi Protokol dan Komunikasi Pimpinan	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	Nilai Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD)	110,85%	Menunjang
				Administrasi Tata Pemerintahan	Jumlah kegiatan Administrasi Tata Pemerintahan	120%	Menunjang
				Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	100%	Menunjang
				Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Jumlah kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	Menunjang
				Fasilitasi Kerjasama Daerah	Jumlah dokumen kerjasama daerah	260%	Menunjang
				PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Indeks Kualitas Kebijakan Pembangunan	109,09%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Jumlah dokumen fasilitasi pelaksanaan kebijakan perekonomian	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Jumlah dokumen pengendalian pembangunan dan laporan pelaksanaan pembangunan	100%	Menunjang
				Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengadaan melalui SPSE	100%	Menunjang
				Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	Jumlah Dokumen Fasilitasi Kebijakan Sumber Daya Alam	100%	Menunjang
				PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD	75%	Menunjang
				Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Jumlah Dokumen Peraturan Daerah yang terbentuk	85,71%	Menunjang
				Pembahasan Kebijakan Anggaran	Jumlah Dokumen Kebijakan Anggaran yang dibahas	100%	Menunjang
				Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Bidang Perekonomian yang tersusun	100%	Menunjang
				Peningkatan Kapasitas DPRD	Jumlah kegiatan Fasilitasi Peningkatan Kapasitas yang diberikan kepada DPRD	100%	Menunjang
				Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	Jumlah kegiatan Fasilitasi Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	Jumlah dokumen Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Fasilitasi Tugas DPRD	Jumlah kegiatan Pemenuhan Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi 6 Alat Kelengkapan DPRD	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	97,74%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum Perangkat Daerah	50%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit barang milik daerah yang diadakan	1.900%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	75%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	72,03%	Menunjang
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Persentase Penempatan PNS dalam Jabatan	108,65%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Jumlah Kegiatan Pengadaan. Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	100%	Menunjang
				Mutasi dan Promosi ASN	jumlah kegiatan Mutasi dan promosi yang dilaksanakan	100%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi ASN	Jumlah ASN yang meningkat Kompetensinya	100%	Menunjang
				Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Proasentase pejabat struktural yang telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kepemimpinan	79,95%	Menunjang
				Pengembangan Kompetensi Teknis	Pengembangan Kompetensi Teknis	100%	Menunjang
				Sertifikasi. Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Sertifikasi. Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Penanganan Sengketa Lahan	100%	Menunjang
				Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penyelesaian Penanganan Sengketa Lahan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	87,20%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	102,50%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	87,20%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah aset/barang daerah yang dikelola dan diamankan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	97,56%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase terlaksananya kegiatan administrasi keuangan	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Publik Kecamatan	104,99%	Menunjang
				Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase terlaksananya urusan pemerintahan yang dilimpahkan kepada camat	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Indeks Kondusivitas Kecamatan	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah	Persentase terselenggaranya urusan pemerintahan umum sesuai penugasan kepala daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	Persentase Desa dengan Indeks Desa Membangun Kategori Maju dan Mandiri	99,88%	Menunjang
				Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Persentase desa yang terfasilitasi mendapat rekomendasi dan terawasi	100%	Menunjang
1.2	Terwujudnya birokrasi bersih dan akuntabel	Nilai SAKIP	95,13%	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Desa dan Kelurahan yang Menerapkan Tanda Tangan Elektronik dalam Layanan Administrasi Desa dan Kelurahan	113,02%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
		Opini BPK	100%	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Desa dan Kelurahan yang menerapkan tanda tangan elektronik dalam layanan administrasi desa dan kelurahan	113,20%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	Persentase Pelestarian Koleksi dan Naskah Kuno	100%	Menunjang
				Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah naskah kuno yang didaftarkan ke Perpustakaan Nasional	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Jumlah Pencipta Arsip yang Menerapkan Arsip Baku	110,54%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku	100%	Menunjang
				Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten	100%	Menunjang
				Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah berkas arsip yang diunggah melalui JIKN	112,50%	Menunjang
				PROGRAM PERENCANAAN. PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Konsistensi Program RPJMD kedalam RKPD	111,11%	Menunjang
				Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah dokumen perencanaan dan pendanaan yang ditetapkan sesuai aturan perundangan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen analisis perencanaan pembangunan daerah	100%	Menunjang
				Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah dokumen monitoring, evaluasi dan pelaporan berkala pelaksanaan pembangunan daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	Cakupan Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Urusan Pembangunan Daerah	100%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Urusan Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	100%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah urusan pembangunan daerah bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	100%	Menunjang
				Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Urusan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Capaian Pengelolaan Keuangan Daerah	74,41%	Menunjang
				Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Tersedianya Dokumen Anggaran dan Regulasi	60%	Menunjang
				Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Jumlah Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Jumlah Dokumen Penyampaian Pelaporan Keuangan SKPD Tepat Waktu	75,17%	Menunjang
				Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Paket Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Cakupan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Capaian Pendapatan Daerah	102,31%	Menunjang
				Kegiatan Pengelolaan pendapatan Daerah	Jumlah jenis pengelolaan pendapatan daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Pemanfaatan Hasil Penelitian dan Pengembangan	102,89%	Menunjang
				Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang disusun	120%	Menunjang
				Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah produk pengembangan Inovasi dan Teknologi yang dimanfaatkan untuk pembangunan daerah	116,67%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	106%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	220%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	6,25%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	94,12%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	Level Kapabilitas APIP	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan Internal	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan Internal	168,15%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	Jumlah Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu	118,92%	Menunjang
				PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN. PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	Nilai Persepsi Korupsi	108,70%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	Jumlah Perumpusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan	100%	Menunjang
				Pendampingan dan Asistensi	Jumlah Pendampingan dan Asistensi	216,67%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Diklat dalam satu tahun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	75%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	75%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Paket Pelaksanaan Bimtek/Workshop/Semin ar	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
1.3	Terwujudnya birokrasi yang kapabel	Indeks SPBE	110%	PROGRAM APLIKASI INFORMATIKA	Nilai Domain Layanan SPBE dalam Penilaian Indeks SPBE	115,03%	Menunjang
				Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub	Jumlah paket layanan infrastruktur	52,94%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			
				Pengelolaan e- government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah aplikasi pendukung SPBE	104,17%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	50%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
	Tujuan						
2	Meningkatkan aksesibilitas, kualitas dan daya saing sumber daya manusia	Indeks Pembangunan Manusia	100%				
	Sasaran						
2.1	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan jangkauan pelayanan kesehatan	Angka Harapan Hidup	100%	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Capaian SPM Kesehatan	100%	Menunjang
				Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah paket penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan tersedia dan terpelihara	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase capaian layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah kab/kota	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Persentase Sistem Informasi Kesehatan terintegrasi	100%	Menunjang
				Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase perpanjangan izin operasional RS kls C dan D di Kab.Kebumen.	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan yang Lulus Uji Kompetensi	100%	Menunjang
				Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen perencanaan kebutuhan dan pendayagunaan SDM	100%	Menunjang
				Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah SDM Yang mengikuti pengembangan mutu dan peningkatan kompetensi SDM Tingkat Daerah Kab/ kota	100%	Menunjang
				PROGRAM SEDIAAN FARMASI. ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Produk Pangan PIRT yang Tersertifikasi	100%	Menunjang
				Pemberian Izin Apotek. Toko Obat. Toko Alat Kesehatan dan Optikal. Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah pemberian ljin dan pengawasan apotik. toko obat. toko alat kesehatn dan optikal (UMOT)	100%	Menunjang
				Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Jumlah penerbitan sertifikat PIRT sbagai izin Produksi untuk makanan minuman tertentu yg dapat diproduksi oleh RT dan pengawasan produk PIRT	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase Capaian PHBS Tingkat Kabupaten	126,85%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	126,85%	Menunjang
				Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pelaksanaan Sehat dalam Rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	100%	Menunjang
				Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase terlaksananya Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif	100%	Menunjang
				Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Jumlah organisasi kepemudaan yang aktif	878,06%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Prestasi Olahraga	182,61%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang	
1	2	3	5	6	7	8	9	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana olahraga dalam kondisi baik	83,59%	Menunjang	
				Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan kejuaraan olahraga tingkat daerah kabupaten	100%	Menunjang	
				Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah prestasi olahraga	100%	Menunjang	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Jumlah kegiatan pembinaan organisasi olahraga	69,23%	Menunjang	
				PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN	Cakupan Prestasi Kepramukaan	300%	Menunjang	
				Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100%	Menunjang	
2.2	Meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan	1	Rata-rata Lama Sekolah	111%	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Angka Partisipasi Kasar (APK)	100%	Menunjang
		2	Harapan Lama Sekolah	97%	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI/ Paket A	103,71%	Menunjang
					Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	APK SMP/MTs/Paket B	87,01%	Menunjang
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	107,54%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pendidikan Non Formal yang terkelola	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	130,38%	Menunjang
				Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten	121,17%	Menunjang
				Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase jumlah pengunjung ke perpustakaan	159,81%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	96%	Menunjang
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen Administrasi Barang Milik Daerah Perangkat Daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang	
1	2	3	5	6	7	8	9	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang	
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang	
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang	
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang	
2.3	Meningkatnya perlindungan	1	Indeks Pembangunan Gender	100%	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Cakupan Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	92,29%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang	
1	2	3	5	6	7	8	9	
	perempuan dan anak							
		2	Cakupan Perlindungan Anak	100%	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
					Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial. dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik. Hukum. Sosial dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
					PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Cakupan Perlindungan Perempuan	100%	Menunjang
					Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pencegahan Kekerasan terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
					Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Penyediaan layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan	100%	Menunjang
					PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Cakupan Program Peningkatan Kualitas Keluarga	147,03%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Cakupan Program Pengelolaan Sistem Data Pilah Gender dan Anak	100%	Menunjang
				Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Kategori Kabupaten Layak Anak (KLA) 1. Pratama 2.Madya 3.Nindya 4.Utama	100%	Menunjang
				Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pelebagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumah Kegiatan Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Cakupan Perlindungan Anak	100%	Menunjang
				Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan layanan rujukan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK	Persentase Perangkat Daerah yang Menyusun dan Memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	183,51%	Menunjang
				Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Jumlah lembaga pendidikan formal dan nonformal yang mengimplementasikan pendidikan kependudukan	100%	Menunjang
				Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)	Cakupan Peserta KB Aktif	104,05%	Menunjang
				Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	Jumlah Kegiatan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB sesuai Kearifan Budaya Lokal	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	Jumlah Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB) dan Kader IMP yang diberdayakan	100%	Menunjang
				Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	Jumlah Kegiatan Pemberdayaan dan Peningkatan Peran serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	Cakupan Pemberdayaan Keluarga Sejahtera	119,63%	Menunjang
				Pelaksanaan Pembangunan Keluarga melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah kegiatan pelaksanaan pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan	133,33%	Menunjang
				Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui	Jumlah mitra kerja yang mendapatkan Promosi dan Sosialisasi Program Ketahanan dan Kesejahteraan keluarga	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga			
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah SDM yang memperoleh Pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Peningkatan Pelayanan BLUD	Jumlah Kegiatan pelayanan BLUD	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
	Tujuan						
3	Mewujudkan pertumbuhan ekonomi daerah yang stabil, berkualitas dan merata dengan mengoptimalkan potensi unggulan daerah	Pertumbuhan Ekonomi	101%				
	Sasaran						
3.1	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor primer	PDRB ADHK Sektor Primer	88,4%	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	Persentase Nilai Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	1.131,47%	Menunjang
				Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	jumlah produksi perikanan tangkap	139,49%	Menunjang
				Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	jumlah kelompok usaha bersama (KUB) yang mendapatkan pembinaan, pendidikan, pelatihan dan pemantauan	88,57%	Menunjang
				Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	jumlah tempat pelelangan ikan (TPI) yang mendapatkan sarana operasional	100%	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa,	presentase kapal perikanan yang berijin	103,19%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			
				PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Perikanan Budidaya	110,93%	Menunjang
				Penerbitan Tanda Daftar bagi Pembudi Daya Ikan Kecil (TDPIK) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	jumlah tanda daftar usaha perikanan budidaya yang ditertibkan	120%	Menunjang
				Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Peningkatan produksi perikanan budidaya	138,38%	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	Cakupan Wilayah Perairan Umum Daratan yang Mendapatkan Pelestarian Sumberdaya Perikanan	122,73%	Menunjang
				Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	jumlah perairan umum daratan (PUD) yang mendapatkan pelestarian sumberdaya perikanan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	Persentase Peningkatan Nilai Produksi Usaha Perikanan	1.215,94%	Menunjang
				Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	jumlah kelompok usaha garam (KUGAR) serta kelompok pengolah dan pemasaran (POKLAHSAR) yang mendapatkan pembinaan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Peningkatan produksi hasil pengolahan perikanan dan garam	22,17%	Menunjang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian	104,33%	Menunjang
				Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase penyediaan sarana pertanian	105,42%	Menunjang
				Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase luas area tanaman pertanian/perkebunan yang difasilitasi	10,34%	Menunjang
				Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan pemenuhan pakan ternak	101,76%	Menunjang
				Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	Persentase tingkat pengecer obat hewan yang diawasi	100%	Menunjang
				Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase ternak sapi yang mendapatkan kartu ternak dan surat keterangan layak bibit	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Ketersediaan Prasarana Pertanian yang Layak	87,08%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah kegiatan pengembangan prasarana pendukung pertanian lainnya	100%	Menunjang
				Pembangunan Prasarana Pertanian	Jumlah Pembangunan Prasarana Pertanian	100%	Menunjang
				Pengelolaan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kecamatan yang mendapatkan pendampingan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Penurunan Kejadian dan Kasus Penyakit Hewan Menular	642,95%	Menunjang
				Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Penurunan kasus Penyakit Hewan Menular (PHM)	88,55%	Menunjang
				Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pemeriksaan hewan dan produk hewan	3.081,25%	Menunjang
				Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelayanan jasa medik veteriner yang tersedia	3.784,14%	Menunjang
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah unit usaha produk hewan yang menerapkan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesejahteraan Hewan	Jumlah unit usaha yang memperoleh pendampingan dalam penerapan kesejahteraan hewan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Persentase Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian	1.538,46%	Menunjang
				Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	Luas area pengendalian dan penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota	10.022,25%	Menunjang
				PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Persentase Rekomendasi Izin Usaha Pertanian	100%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase rekomendasi izin usaha pertanian	100%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak dan Pakan, Fasilitas Pemeliharaan Hewan. Rumah Sakit Hewan/Pasar Hewan. Rumah Potong Hewan	Persentase rekomendasi izin usaha peternakan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Persentase Skor Evaluasi Kinerja Penyuluhan Pertanian	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian	Skor rata-rata kategori nilai prestasi kerja penyuluh dan kategori penilaian kelas kelompok tani	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
3.2	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor sekunder	PDRB ADHK Sektor Sekunder	106%	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase Desa Tertata	190,82%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Kegiatan Penyusunan Perda penataan desa dan Jumlah Kegiatan perubahan Perda Pilkades	150%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Cakupan Fasilitasi Kerjasama Desa	100%	Menunjang
				Fasilitasi Kerja sama antar Desa	Jumlah kegiatan fasilitasi kerjasama antar Desa	100%	Menunjang
				PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Jumlah BUM Desa yang Meningkatkan Klasifikasinya	100%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN. LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Persentase PKK Desa/Kelurahan Tertib Administrasi	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	Jumlah Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi		
				PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI	Persentase Koperasi Sehat	165,76%	Menunjang
				Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi. Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah koperasi akuntabel	188,89%	Menunjang
				PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN	Persentase SDM Koperasi yang Kompeten	100%	Menunjang
				Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pendidikan dan pelatihan perkoperasian yang diselenggarakan	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI	Persentase Advokasi kepada Koperasi	413,33%	Menunjang
				Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koperasi yang mengikuti kegiatan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	104,17%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH. USAHA KECIL. DAN USAHA MIKRO (UMKM)	Persentase Peningkatan UMKM yang Berkualitas	108,82%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan	Jumlah usaha mikro yang terbina	720,89%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM	Jumlah Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya	611,11%	Menunjang
				Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil	Jumlah UKM yang meningkat skala usahanya	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	93,07%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	400%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa pelayanan umum kantor	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan pemeliharaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun + jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	116,67%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit kendaraan dinas/ operasional atau lapangan + jumlah unit peralatan dan mesin lainnya terpelihara	100%	Menunjang
3.3	Meningkatnya kegiatan ekonomi sektor tersier	PDRB ADHK Sektor Tersier	90%	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Penyediaan Sarana Prasarana Pariwisata	100,39%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah sarana prasarana destinasi pariwisata yang dikelola	100%	Menunjang
				Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Rekomendasi Jumlah TDUP yang diterbitkan terhadap TDUP yg diajukan	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	Persentase Peningkatan Kunjungan Wisatawan	154,76%	Menunjang
				Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah kunjungan wisatawan mancanegara dan Nusantara	153,63%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dibina	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah Kegiatan Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	100%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Nilai Pendapatan Retribusi Pasar	88,50%	Menunjang
				Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah sarana distribusi perdagangan yang dikelola	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Jumlah Pembinaan dan pemberdayaan terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	100%	Menunjang
				PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Inflasi Barang Kebutuhan Pokok pada Pasar	-200,67%	Menunjang
				Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah kegiatan pengawasan Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100%	Menunjang
				Pengendalian Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota	Jumlah hari pemantauan harga dan stok Barang Kebutuhan Pokok dan barang Penting	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Perdagangan	1.988%	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Dagang melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang terdapat pada 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pembinaan dan Promosi Pengembangan Usaha Produk Ekspor	100%	Menunjang
				PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase UTTP yang Tertera	213,41%	Menunjang
				Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang dan Pengawasan	Jumlah pelaksanaan dan pengawasan metrologi legal	213,44%	Menunjang
				PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Cakupan Pemasaran Produk UMKM	111,79%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Jumlah kegiatan Pemasaran Produk dalam negeri	100,29%	Menunjang
				PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Persentase Pertumbuhan Produksi Gula Kelapa dan Rokok Bercukai	152,62%	Menunjang
				Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota	Jumlah Industri yang terbina	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI KABUPATEN/KOTA	Persentase Dokumen Perijinan yang Terfasilitasi	100%	Menunjang
				Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perijinan industri yang terfasilitasi	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Jumlah Dokumen Informasi Industri	100%	Menunjang
				Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen Data Industri	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan diklat dalam 1 tahun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,76%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
							Menunjang
3.4	Meningkatnya peranan investasi terhadap perekonomian daerah	Pembentukan Modal Tetap Bruto ADHK	94%	PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)	169,57%	Menunjang
				Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemberian fasilitas/insentif dan kemudahan penanaman modal	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen potensi investasi	100%	Menunjang
				PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Jumlah Dokumen Kepeminatan Investasi Daerah	50%	Menunjang
				Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan promosi penanaman modal	100%	Menunjang
				PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	100%	Menunjang
				Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah dokumen pelayanan perizinan dan nonperizinan berbasis layanan perizinan terintegrasi secara elektronik	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Kegiatan Usaha yang Sesuai dengan Standar Pelaksanaan Kegiatan Usaha yang Berlaku	100%	Menunjang
				Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengendalian pelaksanaan penanaman modal	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Pengelolaan Data dan Informasi Perijinan dan Non Perijinan yang Terintegrasi	100%	Menunjang
				Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data dan informasi perizinan dan nonperizinan yang terintegrasi secara elektronik	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN ENERGI BARU TERBARUKAN	Persentase Pengelolaan Energi Baru Terbarukan	100%	Menunjang
				Penatausahaan Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen penatausahaan izin pemanfaatan langsung panas bumi dalam daerah kabupaten/kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI	Persentase Transmigran yang Ditempatkan	50%	Menunjang
				Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah KK Transmigrasi yang ditempatkan	50%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun dan dokumen evaluasi perangkat daerah yang tersusun	250%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	141,67%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan administrasi umum perangkat daerah	116,67%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	50%	Menunjang
	Tujuan						
4	Meningkatkan pemerataan pembangunan	Ketimpangan Pendapatan (ukuran Bank Dunia)	102%				
	Sasaran						
4.1	Berkurangnya penduduk miskin	Tingkat Kemiskinan	95%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	41,67%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Peningkatan Kemampuan SDM Kesejahteraan Sosial	112,85%	Menunjang
				Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pengembangan potensi sumber kesejahteraan sosial daerahkabupaten/kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN WARGA NEGARA MIGRAN KORBAN TINDAK KEKERASAN	Persentase Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	100%	Menunjang
				Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Kabupaten/Kota untuk Dipulangkan ke Desa/Kelurahan Asal	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase PMKS di Luar Panti Kewenangan Kabupaten yang Tertangani	104,15%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	102,75%	Menunjang
				Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Jumlah Migran yang diberikan fasilitasi pemulangan	100%	Menunjang
				PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Cakupan Perlindungan Jaminan Sosial	113,07%	Menunjang
				Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sosialisasi bantuan sosial	100%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN BENCANA	Persentase Korban Bencana Alam dan Sosial yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan perlindungan sosial korban bencana alam dan sosial kabupaten/ kota	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan pemberdayaan masyarakat terhadap kesiapsiagaan Bencana	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN	Persentase TMP yang Dikelola	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota	Persentase TMP yang Dikelola	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kedaualatan dan Kemandirian Pangan	93,01%	Menunjang
				Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Desa/Kelurahan yang mendapat kegiatan penyediaan infrastruktur dan seluruh pendukung kemandirian pangan	93,01%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Persentase Diversifikasi dan Ketahanan Pangan	100.92%	Menunjang
				Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Persentase Kelompok sasaran Pengembangan Kelembagaan dan Jaringan Distribusi Pangan	100%	Menunjang
				Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	Persentase cadangan pangan yang dikelola	141,60%	Menunjang
				Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Persentase Desa yang mendapatkan pembinaan. bantuan bibit atau benih tanaman. saprotan untuk pemanfaatan	101,17%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
					pekarangan dan bantuan alat pengembangan pangan lokal		
				PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Persentase Desa yang Tertangani Kerawanan Pangannya	98,72%	Menunjang
				Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	Jumlah Dokumen Peta Katahanan dan Kerentanan Pangan Kabupaten Kebumen	100%	Menunjang
				Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah desa yang tertangani kerawanan pangannya	100%	Menunjang
				PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	Persentase Hasil Pengawasan dan Pembinaan Keamanan Pangan	100,95%	Menunjang
				Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pengawasan keamanan pangan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah dokumen penatausahaan barang milik daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	54,55%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
4.2	Berkurangnya pengangguran	Tingkat Pengangguran Terbuka	102%	PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Persentase Tenaga Kerja yang Dilatih Bernilai "A"	96,42%	Menunjang
				Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah Paket Pelatihan Berdasarkan Unit Kompetensi	120%	Menunjang
				Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah LPKS yang dibina	100%	Menunjang
				PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Penempatan Pencari Kerja Terdaftar	91,30%	Menunjang
				Pelayanan Antarkerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap	136,31%	Menunjang
				Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI atau PMI yang terlindungi	112,72%	Menunjang
				PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Kasus yang Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama	130%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial. Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang terselesaikan	130%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	25%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Tersusun	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
	Tujuan						
5	Mewujudkan percepatan pertumbuhan dan pemerataan	Indeks Infrastruktur dan Lingkungan Hidup	106%				

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
	pembangunan yang berkelanjutan						
	Sasaran						
5.1	Meningkatnya infrastruktur wilayah yang mendukung pertumbuhan ekonomi daerah	Indeks Kualitas Infrastruktur Daerah	107%	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Infrastuktur Sumber Daya Air Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Baik	95,45%	Menunjang
				Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan konservasi SDA yang terbangun dan terpelihara	100%	Menunjang
				Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah areal irigasi yang terlayani	71,43%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Pelayanan Air Bersih Perpipaan	110,04%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sambungan rumah yang terlayani	124,69%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Saluran Drainase dalam Kondisi Baik	90,01%	Menunjang
				Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah saluran drainase yang dipelihara/direhabilitasi/ dibangun	78,57%	Menunjang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Bangunan Gedung Pemerintah dalam Kondisi Baik	100,41%	Menunjang
				Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Presentase bangunan gedung pemerintah dalam kondisi baik	100,41%	Menunjang
				PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase Bangunan dan Lingkungan yang Tertangani	100%	Menunjang
				Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen perencanaan yang tersusun	280%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Jalan Kewenangan Kabupaten dalam Kondisi Mantap	92,45%	Menunjang
				Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah panjang jalan yang tertangani	136,80%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Penyedia Jasa Konstruksi yang Telah Dibina dan Nilainya Baik	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah kegiatan penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi	50%	Menunjang
				Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan daerah kabupaten/kota	1,61%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Kesesuaian Lahan dengan Pola Ruang RTRW	100%	Menunjang
				Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen rekomendasi RRRW dan RRTR Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan koordinasi penyusunan RTRW dan RRTR yang dilaksanakan	55,56%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemanfaatan ruang yang tersusun	277,69%	Menunjang
				Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan koordinasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah kabupaten/kota	108,33%	Menunjang
				PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	100%	Menunjang
				Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah pendataan dan identifikasi lokasi rawan bencana atau relokasi	300%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah rumah korban bencana yang direhabilitasi/dir elokasi	40%	Menunjang
				PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Persentase Penanganan Kawasan Kumuh di bawah 10 Ha	230,26%	Menunjang
				Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (sepuluh) Ha	Jumlah permukiman kumuh yang ditangani	1.012,75%	Menunjang
				PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tidak Layak Huni Tertangani	84,59%	Menunjang
				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah perbaikan rumah tidak layak huni	84,85%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan Akses Air Limbah Aman	313,68%	Menunjang
				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah pelayanan pengolahan air limbah domestik	111,11%	Menunjang
				PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Indeks Infrastruktur Perhubungan	95,79%	Menunjang
				Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Peresentase ketersediaan perlengkapan jalan	108,34%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Pesentase ketersediaan Terminal Tipe C (Jumlah terminal yang terbangun dibagi jumlah terminal yang seharusnya)	80,01%	Menunjang
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Jumlah Koordinasi Pengawasan Parkir	100%	Menunjang
				Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase alat uji KIR dalam keadaan baik (yaitu Jumlah alat uji KIR yang baik dibagi jumlah alat uji KIR yang ada)=9 unit 100% baik	100%	Menunjang
				Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah bulan pengamanan dan koordinasi lintas sektoral	100%	Menunjang
				Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah rakor penilaian andalalin	83%	Menunjang
				Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan	Rasio cakupan kebijakan pelaksanaan audit dan inspeksi keselamatan LLAJ dan Pengawasan Pengendalian Terhadap Sarpras Keselatan Transportasi	100%	Menunjang
				Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan dan pengendalian angkutan umum	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen pemenuhan persyaratan perolehan ijin penyelenggaraan angkutan orang dalam tarayek lintas daerah Kab/Kota dalam satu daerah Kab/Kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	85,71%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	75%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan pelaksanaan kegiatan administrasi umum perangkat daerah	75%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah	800%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah bulan pemeliharaan barang milik daerah	75%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
5.2	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	94%	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup	110%	Menunjang
				Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	jumlah dokumen lingkungan hidup yang disusun	150%	Menunjang
				PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	90,52%	Menunjang
				Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	100%	Menunjang
				Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	54,55%	Menunjang
				Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	jumlah kegiatan pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	126,67%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase Penanganan Keanekaragaman Hayati Daerah	110,02%	Menunjang
				Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	jumlah dokumen perencanaan pengelolaan Kehati	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Kegiatan Usaha yang Memiliki Ijin Pengelolaan LB3	100,43%	Menunjang
				Penyimpanan Sementara Limbah B3	jumlah fasilitasi dan verifikasi limbah B3 dan LB3	103,33%	Menunjang
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Pengawasan Kegiatan Usaha dan Penanganan Ijin Lingkungan	82,84%	Menunjang
				Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	jumlah unit usaha yang mendapatkan rekomendasi ijin lingkungan, ijin PPLH dan pengawasan kegiatan usaha	55,20%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Desa dan Kelurahan yang Memiliki Peraturan Lingkungan Hidup	98,59%	Menunjang
				Penyelenggaraan Pendidikan. Pelatihan. dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah lokasi yang memperoleh pendampingan penyusunan perdes dan sekolah adiwiyata	840%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Fasilitasi Penghargaan Lingkungan Hidup	102,04%	Menunjang
				Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	jumlah titik pantau dan penghargaan lingkungan hidup	112,50%	Menunjang
				PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase penanganan Pengaduan masyarakat	113,33%	Menunjang
				Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah fasilitasai pengelolaan pengaduan masyarakat terhadap PPLH	113,33%	Menunjang
				PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Jumlah Sampah yang Terkurangi melalui 3R	184,22%	Menunjang
				Pengelolaan Sampah	jumlah kegiatan pengelolaan sampah	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75%	Menunjang
					Peningkatan Nilai IKM	101,19%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah bulan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	jumlah kegiatan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah bulan penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	jumlah unit pengadaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	jumlah bulan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83,33%	Menunjang
	Tujuan						
6	Mewujudkan kesalehan sosial di dalam masyarakat	Indeks Kesalehan Sosial	100%				
	Sasaran						
6.1	Meningkatnya nilai-nilai luhur kebangsaan	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya Ekonomi	100%	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	680,26%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Jumlah Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	100%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Capaian Partisipasi Masyarakat/Penduduk dalam Proses Pemilihan Umum	109,33%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Jumlah Kegiatan Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	100%	Menunjang
				PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Cakupan Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	100%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang	Jumlah Pengurus Orkesmas baru di Kabupaten Kebumen yang mengikuti	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Pembinaan dan Jumlah Dokumen data base Ormas/LSM dan Partai Politik		
				PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL. DAN BUDAYA	Rasio Elemen Masyarakat yang Mendapatkan Pembinaan Wawasan Kebangsaan	714,73%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Jumlah Lokasi Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya	100%	Menunjang
				PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Penanganan Konflik Berlatar Belakang SARA, Ideologi, Politik, Radikal dan Sumber Daya	140%	Menunjang
				Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Jumlah Dokumen Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan. Penganggaran. dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Unit Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Unit Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	55,56%	Menunjang
6.2	Meningkatnya pembangunan kebudayaan	Persentase budaya yang dilestarikan	67%	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase Kesenian yang Dikembangkan	101,55%	Menunjang
				Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan pengembangan kebudayaan Kebumen	101,29%	Menunjang
				Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase kegiatan pelestarian kesenian tradisional	50%	Menunjang
				PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan	323,01%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Presentase cagar budaya yang dilestarikan	305,97%	Menunjang
	Tujuan						
7	Mewujudkan kondusivitas wilayah	Indeks Kondusivitas Wilayah	100%				
	Sasaran						
7.1	Meningkatnya ketertiban masyarakat	Persentase Penegakan Perda	100%	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda	100%	Menunjang
				Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam 1 (satu) kabupaten/ kota	80%	Menunjang
				Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	terlaksananya kegiatan upaya pencegahan tindak kriminal	100%	Menunjang
				Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Jumlah kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/kota	100%	Menunjang
				PROGRAM PENCEGAHAN. PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	Persentase Kesiapsiagaan Damkar	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Presentase terlaksananya kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah/kota	100%	Menunjang
				Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran	Presentase pendataan sarpras proteksi	100%	Menunjang
				Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Presentase terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang tersusun	100%	Menunjang
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan pengadaan kendaraan dinas/ operasional	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Presentase terlaksananya kegiatan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	Menunjang
7.3	Terwujudnya wilayah tangguh bencana	Persentase Desa Tangguh Bencana	100%	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Persentase Desa Tangguh Bencana	200%	Menunjang
				Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Presentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana	100%	Menunjang
				Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana	100%	Menunjang
				Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Presentase Cakupan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	100%	Menunjang
				Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	100%	Menunjang
				PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Cakupan Pelayanan Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	Menunjang

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator	Capaian Tujuan/ Sasaran	Program/ Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan	Capaian Program/ Kegiatan	Menunjang/ Tidak Menunjang
1	2	3	5	6	7	8	9
				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	Menunjang
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	Menunjang
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Bulan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	Menunjang
Rata-rata Capaian Tujuan/Sasaran			99,31%	Rata-rata Capaian Program/ Kegiatan		155,45%	

Sumber: Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Dari tabel keterkaitan Sasaran dan Program Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat disimpulkan bahwa 125 (seratus dua puluh lima) Program dengan rata-rata capaian kinerja 155,45%% menunjang tercapainya 28 (dua puluh delapan) indikator tujuan/ sasaran dengan rata-rata capaian indikator kinerja tujuan/sasaran sebesar 99,31% atau Kategori Kinerja Baik.

BAB III

CAPAIAN KINERJA PELAKSANAAN TUGAS PEMBANTUAN

3.1 Tugas Pembantuan Pusat yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Penyelenggaraan asas tugas pembantuan adalah cerminan dari sistem dan prosedur penugasan pemerintah pusat maupun provinsi kepada daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dan pembangunan yang disertai dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggungjawabkan kepada yang memberi penugasan. Tugas pembantuan diselenggarakan karena tidak semua wewenang dan tugas pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi dan asas dekonsentrasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelayanan umum. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, mengamanatkan bahwa Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

3.1.1 Target Kinerja

Dasar hukum yang melandasi penyelenggaraan dan pelaporan pelaksanaan tugas pembantuan di Kabupaten Kebumen adalah DIPA-090.02.039600/2024 tanggal 14 Mei 2024 diterima dari Kementerian Perdagangan Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Perdagangan melalui Program Perdagangan Dalam Negeri, Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan. Rincian Pembangunan Revitalisasi Pasar Rakyat dengan jumlah anggaran sebesar Rp.3.000.000.000.- (tiga milyar rupiah) untuk pembangunan Pasar Rakyat Pagi Kebumen di Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Provinsi Jawa Tengah.

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000.- terealisasi Rp. 2.821.343.000.- atau sebesar 94.04%.

3.1.2 Realisasi

Adapun capaian kinerja pelaksanaan Tugas Pembantuan adalah 100% dengan realisasi keuangan dari target Rp. 3.000.000.000.00 terealisasi Rp. 2.838.039.699.00 atau sebesar 94.60%.

Tabel III.1 Matrik Capaian Kinerja Pelaksanaan Tugas Pembantuan Tahun 2024

NO	K/LPNK	DASAR PELAKSANAAN PENUGASAN	PROGRAM, KEGIATAN, OUTPUT, DAN RINCIAN KEGIATAN	LOKASI	SKPD PELAKSANAAN TP	ALOKASI ANGGARAN (Rp)	REALISASI ANGGARAN (%)	REALISASI CAPAIAN KEGIATAN (%)	KET
1	Kementerian Perdagangan RI	SP DIPA-090.02.039600/2024	Program Perdagangan Dalam Negeri / Kegiatan Pengembangan Sarana Distribusi Perdagangan dan Kapasitas Logistik Perdagangan / Output Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat	Kabupaten Kebumen	Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kab. Kebumen	3.000.000.000	2.821.343.000 94,04%	1 100%	

Sumber: Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kebumen Tahun 2024

3.2 Tugas Pembantuan Provinsi yang dilaksanakan oleh daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Kebumen tidak menerima tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

3.2.1 Target Kinerja

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

3.2.2 Realisasi

Tidak ada tugas pembantuan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun 2024.

3.3 Permasalahan dan Kendala

Tidak ada permasalahan dan kendala.

3.4 Saran dan Tindak Lanjut

Tidak ada.

BAB IV

PENERAPAN DAN PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL

4.1 Urusan Pendidikan

4.1.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pendidikan Kabupaten Kebumen terdiri atas:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini;
- b. Pendidikan Dasar; dan
- c. Pendidikan Kesetaraan.

4.1.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan dan Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Penerapan Pencapaian Target Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan Dasar ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.1 Target Capaian SPM Pendidikan Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PENDIDIKAN								
1.	Pendidikan Anak Usia Dini	Jumlah warga negara usia 5-6 Tahun yang berpartisipasi dalam pendidikan PAUD	33.454	12 bulan	Perlengkapan dasar peserta didik	33.454	12 bulan	35.436.003.000
					Kepala Sekolah	560	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	916	12 bulan	
2.	Pendidikan Dasar	Jumlah warga negara usia 7-15 Tahun yang berpartisipasi dalam	144.345	12 bulan	Perlengkapan dasar peserta didik	144.345	12 bulan	233.120.555.424

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		pendidikan dasar (SD/Mi, SMP/MTs)						
					Pendidik/ Guru	8.371	12 bulan	
					Kepala Sekolah	735	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	1977	12 bulan	
4.	Pendidikan Kesetaraan	Jumlah warga negara usia 7-18 Tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar dan atau menengah yang berpartisipasi dalam pendidikan kesetaraan	2.365	12 bulan	Perlengkapan Dasar Peserta Didik	2.365	12 bulan	4.322.115.000
					Kepala Satuan Pendidik	25	12 bulan	
					Tenaga Penunjang	64	12 bulan	

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Tahun 2024

4.1.3 Anggaran

Tabel IV.2 Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	1.127.291.299.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	1.387.543.916.000
	APBD	1.387.543.916.000
	A. APBD MURNI	1.127.291.299.000
	B. APBD DAU	82.447.631.000
	C. APBD DAK FISIK	10.435.986.000
	D. APBD DAK NON FISIK	167.369.000.000
	E. DANA BAGI HASIL	0

NO	PENDANAAN	PAGU (Rp)
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	A. APBN-DEKONSENTRASI	0
	B. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.3 Rincian Alokasi Anggaran Penerapan SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				272.878.673.424	269.402.625.676	98,73%
1	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN				272.878.673.424	269.402.625.676	98,73%
	1	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar			141.152.394.424	139.422.912.882	98,77%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	27.189.869.424	26.892.835.371	98,91%
		2	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	160.000.000	157.110.703	98,19%
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Peserta didik	948.400.000	943.380.300	99,47%
		4	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	280.000.000	273.622.871	97,72%
		5	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	15.159.904.000	14.288.469.110	94,25%
		6	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Orang	72.154.000	66.222.500	91,78%
		7	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	137.381.000	128.051.000	93,21%
		8	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Satuan Pendidikan	95.295.385.000	94.892.107.125	99,58%
		9	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	139.940.000	125.128.800	89,42%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		10	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	1.569.361.000	1.459.329.024	92,99%
		11	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	200.000.000	196.656.078	98,33%
JUMLAH INDIKATOR					141.152.394.424	139.422.912.882	98,77%
	2	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama			91.968.161.000	90.840.979.334	98,77%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	2.125.171.000	2.095.089.985	98,58%
		2	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	Ruang	17.983.184.000	17.844.805.835	99,23%
		3	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama	Peserta didik	2.182.818.000	2.110.700.325	96,70%
		5	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa	Paket	14.387.451.000	14.258.159.705	99,10%
		6	Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Peserta didik	165.121.000	163.356.775	98,93%
		7	Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	4.897.449.000	4.883.834.590	99,72%
		8	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Orang	84.285.000	84.227.738	99,93%
		9	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Satuan Pendidikan	1.069.211.000	1.059.562.208	99,10%
		10	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Satuan Pendidikan	48.906.004.000	48.174.161.122	98,50%
		11	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	15.000.000	14.973.000	99,82%
		12	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Satuan Pendidikan	152.467.000	152.108.051	99,76%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	JUMLAH INDIKATOR				91.968.161.000	90.840.979.334	98,77%
	3	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)			35.436.003.000	34.887.576.266	98,45%
		1	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD	Unit	467.813.000	458.147.600	97,93%
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD	Paket	924.584.000	883.596.000	95,57%
		3	Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD	Peserta didik	213.583.000	204.944.816	95,96%
		4	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	Orang	12.287.552.000	11.983.071.100	97,52%
		5	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD	Satuan Pendidikan	107.541.000	104.139.950	96,84%
		6	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Satuan Pendidikan	20.818.800.000	20.794.778.000	99,88%
		7	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	9.630.000	9.398.800	97,60%
		8	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	606.500.000	449.500.000	74,11%
	JUMLAH INDIKATOR				35.436.003.000	34.887.576.266	98,45%
	4	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			4.322.115.000	4.251.157.194	98,36%
		1	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan	Peserta didik	80.286.000	75.645.700	94,22%
		2	Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan	Paket	1.129.760.000	1.117.672.111	98,93%
		3	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	141.800.000	140.977.173	99,42%
		4	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Satuan Pendidikan	2.696.600.000	2.649.312.500	98,25%
		5	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan	Dokumen	187.025.000	184.840.810	98,83%
		6	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Paket	740	740	100%

NO	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		7	Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik	Peserta didik	79.404.000	75.476.400	95,05%
		8	Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Unit	6.500.000	6.492.500	99,88%
JUMLAH INDIKATOR					4.322.115.000	4.251.157.194	98,36%
JUMLAH PROGRAM					272.878.673.424	269.402.625.676	98,73%

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.1.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.4 Dukungan Personel Penerapan SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG PENDIDIKAN		
1	Pendidikan Anak Usia Dini	1.444
2	Pendidikan Dasar	11.083
3	Pendidikan Kesetaraan	150

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.1.5 Hasil Capaian

Tabel IV.5 Realisasi Capaian SPM Bidang Pendidikan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pendidikan Anak Usia Dini	33.454	33.454	100	35.436.003.000	34.887.576.266	98,45
2	Pendidikan Dasar	144.345	144.345	100	233.120.555.424	230.262.892.216	98,77
	a. Sekolah Dasar				141.152.394.424	139.421.912.882	98,77

	b. Sekolah Menengah Pertama				91.968.161.000	90.840.979.334	98,77
3	Pendidikan Kesetaraan	2.365	2.365	100	4.322.115.000	4.251.157.000	98,36

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.6 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Anak Usia Dini) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Pendidikan Anak Usia Dini	33.454	33.454	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	33.454	33.454	100%	20
2	Kepala Sekolah	560	560	100%	20
3	Tenaga Penunjang	916	916	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.7 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Dasar) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Dasar	144.345	144.345	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	144.345	144.345	100%	20
2	Pendidik/Guru	8.371	8.371	100%	20
3	Kepala Sekolah	735	735	100%	20
4	Tenaga Penunjang	1.977	1.977	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.8 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pendidikan (Pendidikan Kesetaraan) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pendidikan Kesetaraan	2.365	2.365	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Perlengkapan dasar peserta didik	2.365	2.365	100%	20
2	Kepala Satuan Pendidik	25	25	100%	20
3	Tenaga Penunjang	64	64	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.9 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pendidikan Anak Usia Dini	100	Tuntas Paripurna
2	Pendidikan Dasar	100	Tuntas Paripurna
3	Pendidikan Kesetaraan	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.1.6 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dan solusi yang diberikan dalam pelaksanaan penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen tahun 2024 sebagai berikut:

Tabel IV.10 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pendidikan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	Anak usia 5-6 tahun	APS Paud masih rendah karena kesadaran masyarakat menyekolahkan pada jenjang PAUD masih kurang. Sebagian peserta didik kelas I jenjang SD/MI masih berusia di bawah 7 tahun (5-6 tahun)	Sosialisasi memfasilitasi Bunda dan Pokja Bunda PAUD untuk sosialisasi pentingnya mengenalkan pendidikan anak sejak dini melalui PAUD Dilakukan Assesment oleh dokter pemerintah (RSDS) untuk mengetahui kemampuan anak mengikuti belajar mengajar di bawah usia SD
2	Anak usia 12-15 tahun	Terdapat anak usia sekolah 12-15 tahun di Ponpes tanpa mengikuti pendidikan SMP/MTs/Sederajat dan anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan	Dilakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait penanganan anak putus sekolah dan anak tidak sekolah untuk kembali ke sekolah baik ke sekolah formal maupun non formal dan untuk anak berkebutuhan khusus telah disediakan sekolah yang inklusif. Sosialisasi Gerakan Kembali Bersekolah
3	Masyarakat	Faktor kemiskinan	Beasiswa Kurang Mampu (BKM), Program Indonesia Pintar (PIP)
4	Anak usia sekolah	Anak Putus Sekolah (Pernikahan di usia dini, bekerja dll)	Melaksanakan program pendidikan kesetaraan melalui penguatan PKBM

Sumber: Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.2 Urusan Kesehatan

4.2.1 Jenis Pelayanan Dasar

Pelaksanaan urusan kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 56 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Kesehatan Kabupaten Kebumen sesuai Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan terdiri atas:

- a. Pelayanan kesehatan ibu hamil
- b. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

- c. Pelayanan kesehatan bayi baru lahir
- d. Pelayanan kesehatan balita
- e. Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
- f. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
- g. Pelayanan kesehatan pada usia lanjut
- h. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
- i. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus
- j. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
- k. Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan
- l. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV).

4.2.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.11 Target Capaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG KESEHATAN								
1.	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Persentase ibu Hamil mendapatkan Pelayanan kesehatan ibu hamil	13.845	12 bulan	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA	13.845	12 bulan	1.940.020.000
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan	13.845	12 bulan	Kartu Ibu/ Rekam Medis Ibu, Buku KIA, Formulir Photography	13.845	12 bulan	768.725.000
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.767	12 bulan	Formulir Bayi Baru Lahir, Formulir MTBM, Buku KIA	13.767	12 bulan	316.231.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
4	Pelayanan kesehatan balita	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita sesuai Standar	69.321	12 bulan	Kuesioner Pra Skrining Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standar lain yang berlaku, Formulir DDTK, Buku KIA	69.321	12 bulan	33.384.000
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standard	184.515	12 bulan	Buku Rapor Kesehatanku Buku Pemantauan Kesehatan, Kuesioner Skrining Kesehatan, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Dalam Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah, Formulir Rekapitulasi Hasil Pelayanan Kesehatan Usia Sekolah dan Remaja di Luar Sekolah	184.515	12 bulan	265.341.000
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persentase orang usia 15–59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar	587.315	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular (SIPTM)	587.315	12 bulan	29.964.000
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Persentase warga Negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan	174.506	12 bulan	Buku Kesehatan lansia	174.506	12 bulan	21.902.000.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
		sesuai Standard						
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Persentase penderita Hipertensi yang Mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	64.187	12 bulan	Pedoman Pengendalian Hipertensi dan Media KIE, Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi Sistem Informasi PTM	64.187	12 bulan	25.774.000
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	11.128	12 bulan	Formulir Pencatatan dan Pelaporan Aplikasi SI PTM, Pedoman dan Media KIE	11.128	12 bulan	2.270.638.000
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	4.655	12 bulan	Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku Pedoman Diagnosis Penggolongan Gangguan Jiwa terbaru (bila sudah tersedia), Penyediaan Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Media KIE	4.655	12 bulan	29.676.000
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis; dan	Persentase Orang terduga TBC mendapatkan pelayanan TBC sesuai	18.604	12 bulan	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Poster, Banner), Formulir Pencatatan dan Pelaporan, Pedoman/Standar Operasional Prosedur	18.604	12 bulan	450.911.500.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
1 2	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus=HIV)	Persentase orang dengan risiko terinfeksi HIV Mendapatkan pelayanan deteksi dini HIV sesuai standar	18.422	12 bulan	Media KIE Berupa Lembar Balik, Leaflet, Poster, Banner	18.422	12 bulan	391.337.000

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.2.3 Anggaran

Tabel IV.12 Alokasi Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	369.496.835.379
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	10.602.107.000
	APBD	10.602.107.000
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	10.602.107.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.13 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar Penerapan SPM Bidang Kesehatan

Tahun 2024

N o	PROGRA M	KEGIAT AN	SUB KEGIATA N	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAP AN
	KAB. KEBUMEN				10.602.107.0 00	10.496.804.7 23	99,01%
1	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				10.602.107.0 00	10.496.804.7 23	99,01%
	1	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			10.602.107.0 00	10.496.804.7 23	99,01%
		1	Pengelola an pelayanan kesehatan Ibu Hamil	Orang	1.940.020.00 0	1.924.277.25 0	99,19%
		2	Pengelola an pelayanan kesehatan Ibu Bersalin	Orang	768.725.000	754.868.750	98,20%
		3	Pengelola an pelayanan kesehatan Bayi Baru Lahir	Orang	316.231.000	313.365.933	99,09%
		4	Pengelola an pelayanan kesehatan Balita	Orang	33.384.000	30.867.950	92,46%
		5	Pengelola an pelayanan kesehatan pada Usia	Orang	265.341.000	259.383.300	97,75%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
			Pendidikan Dasar				
		6	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Produktif	Orang	29.964.000	29.942.700	99,93%
		7	Pengelolaan pelayanan kesehatan pada Usia Lanjut	Orang	21.902.000	21.732.880	99,23%
		8	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Hipertensi	Orang	25.774.000	25.772.580	99,99%
		9	Pengelolaan pelayanan kesehatan penderita Diabetes Melitus	Orang	2.270.638.000	2.258.615.600	99,47%
		10	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Orang	29.676.000	29.655.196	99,93%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		11	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Orang	4.509.115.000	4.461.068.750	98,93%
		12	Pengelolaan pelayanan kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Orang	391.337.000	387.253.834	98,96%
JUMLAH INDIKATOR					10.602.107.000	10.496.804.723	99,01%
JUMLAH PROGRAM					10.602.107.000	10.496.804.723	99,01%

4.2.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.14 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
1	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	86	1.348
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Gizi	48	
2	Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis kebidanan	86	1.348
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Gizi	48	
3	Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis Anak	82	1.337
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	67	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	
4	Pelayanan Kesehatan Balita	Tenaga kesehatan: Dokter	71	1.259
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
5	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar	Tenaga kesehatan: Dokter/Dokter gigi	107	1436

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
6	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Tenaga kesehatan: Dokter	71	1326
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
7	Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Tenaga kesehatan: Dokter	71	1326
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
8	Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Tenaga kesehatan: Dokter	71	1467
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
		Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	67	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
9	Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Tenaga kesehatan: Dokter	71	1448
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga Kesehatan: Masyarakat	67	
		Tenaga kesehatan: Ahli Gizi	48	
		Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	48	
10	Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar	Tenaga kesehatan: Dokter	71	137
		Tenaga kesehatan: Perawat Terlatih Jiwa	66	
11	Pelayanan Kesehatan Orang Terduga tuberkulosis	Dokter/ dokter spesialis penyakit dalam/ dokter spesialis paru	97	689
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	

NO	JENIS LAYANAN DASAR	JENIS SDM KESEHATAN	JUMLAH TENAGA	TOTAL
		Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	
		Tenaga kesehatan masyarakat	67	
		Tenaga kesehatan: Analisis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	48	
		Tenaga kesehatan: Penata Rontgen	12	
12	Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Virus Yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Tenaga kesehatan: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	96	1351
		Tenaga kesehatan: Bidan	749	
		Tenaga kesehatan: Perawat	391	
		Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	48	
		Tenaga kesehatan masyarakat	67	

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.2.5 Hasil Capaian

Tabel IV.15 Realisasi Capaian SPM Bidang Kesehatan Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	13.845	13.845	100	19.400.200.000	1.924.277.250	99,19
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	13.845	13.845	100	768.725.000	754.868.750	98,2
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.767	13.767	100	316.231.000	313.365.933	99,09

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
4	Pelayanan kesehatan balita	69.321	69.321	100	33.384.000	30.867.950	92,46
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	184.515	184.515	100	265.341.000	259.383.300	97,75
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	587.315	587.315	100	29.964.000	29.942.700	99,93
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	174.506	174.506	100	21.902.000	21.732.880	99,23
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	64.187	64.187	100	25.774.000	25.772.580	99,99
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	11.128	11.128	100	2.270.638.000	2.258.615.600	99,47
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.655	4.655	100	29.676.000	29.655.196	99,93
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	18.604	18.604	100	4.509.115.000	4.461.068.750	98,93
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HumanImmunodeficiency Virus = HIV)	18.422	18.422	100	391.337.000	387.253.834	98,96

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.16 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		

1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	13.845	13.845	100	80
---	-------------------------------	--------	--------	-----	----

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Vaksin Tetanus Difteri (Td)	13.845	13.845	100%	20
2	Tablet tambah darah (180 tablet x jumlah ibu hamil)	2.492.100	2.492.100	100%	20
3	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Test Kehamilan	13.845	13.845	100%	20
4	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan HB	13.845	13.845	100%	20
5	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Golongan Darah	13.845	13.845	100%	20
6	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Pemeriksaan Glukoprotein Urin (proyeksi pengadaan 15% dari jumlah ibu hamil)	13.845	13.845	100%	20
7	Alat deteksi resiko Ibu Hamil: Skrining triple eliminasi dengan tes cepat Hepatitis	13.845	13.845	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	B dan Sifilis dan HIV				
8	Kartu ibu/rekam medis ibu	13.845	13.845	100%	20
9	Buku kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13.845	13.845	100%	20
10	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2.111	2.111	100%	20
11	Gel USG (untuk Puskesmas yang memiliki alat USG) (proyeksi pengadaan 1/15 dari jumlah ibu hamil)	11	11	100%	20
12	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi; (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk dokter spesialis kebidanan)”	88	88	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Perawat (angka	391	391	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	ideal dengan rasio 1:885 penduduk)				
14	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	749	749	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
17	Kunjungan 6 kali ibu hamil selama periode kehamilan (K6) (Satu kali pada trimester pertama, Dua kali pada trimester kedua, Tiga kali pada trimester ketiga)	13.845	13.845	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.17 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Indeks Pencapaian
----	-----------------------	--------------------------	--	-------------------

		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	Persentase (4:3 x 100%)	Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	13.845	13.845	100	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Formulir partograf	13.845	13.845	100%	20
2	Kartu ibu/rekam medis ibu	13845	13845	100%	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA) (Terintegrasi dengan ibu hamil, sesuai kebutuhan bila belum dapat pada masa kehamilan)	13845	13845	100%	20
4	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2111	2111	100%	20
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis obstetri dan ginekologi (angka ideal: dengan rasio 1:2500 penduduk untuk dokter umum dan rasio 1:16000 untuk	88	88	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	dokter spesialis kebidanan)				
6	Tenaga kesehatan: Bidan (angka ideal: dengan rasio 1:1000 penduduk)	749	749	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Perawat (angka ideal: dengan rasio 1:885 penduduk)	391	391	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.18 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		

1	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	13.767	13.767	100%	80
---	-------------------------------------	--------	--------	------	----

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Vaksin hepatitis B dosis tunggal (prefilled syringe)	13.767	13.767	100%	20
2	Vitamin K1 injeksi	13767	13767	100%	20
3	Salep/tetes mata antibiotik	13767	13767	100%	20
4	Formulir bayi baru lahir	13767	13767	100%	20
5	Formulir Manajemen Terpadu Balita Muda (MTBM)	13767	13767	100%	20
6	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	13767	13767	100%	20
7	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	2111	2111	100%	20
8	Tenaga medis: Dokter/Dokter Spesialis Anak	82	82	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
11	Tenaga kesehatan:	74	74	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Tenaga Kefarmasian				
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku	67	67	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
14	.Kader Kesehatan	10.635	10.635	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.19 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Balita) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan balita	69.321	69.321	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Kuisisioner Pra Skrining	69.321	69.321	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Perkembangan (KPSP) atau Instrumen Standard lain yang berlaku.				
2	Formulir Deteksi Dini Tumbuh Kembang (DDTK)	69.321	69.321	100%	20
3	Buku Kesehatan Ibu dan Anak (KIA)	69.321	69.321	100%	20
4	Vitamin A Biru (sesuai standar 6-11 bulan)	69.321	69.321	100%	20
5	Vitamin A Merah (sesuai standar 12-59 bulan)	69321	69321	100%	20
6	Vaksin imunisasi dasar: BCG	3.466	3.466	100%	20
7	Vaksin imunisasi dasar: Polio Tetes	6.932	6.932	100%	20
8	Vaksin imunisasi dasar: IPV	6.932	6.932	100%	20
9	Vaksin imunisasi dasar: DPT -HB- Hib	6.932	6.932	100%	20
10	Vaksin imunisasi dasar: Campak- Rubella	13.864	13.864	100%	20
11	Vaksin imunisasi lanjutan: DPT-HB -Hib	6.932	6.932	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
12	Vaksin imunisasi lanjutan: Campak-Rubella	13.864	13.864	100%	20
13	Jarum suntik dan Bahan Habis Pakai (BHP)	6.932	6.932	100%	20
14	Peralatan Anafilaktik	69.321	69.321	100%	20
15	Formula Terapi Gizi Buruk	35	35	100%	20
16	Tenaga medis: Dokter	71	71	100%	20
17	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
18	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
19	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
20	Guru PAUD	0	0	100%	20
21	Kader Kesehatan	10.635	10.635	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.20 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima
		Jumlah yang harus	Jumlah yang terlayani		

		dilayani (Orang)	(Orang)		Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	184.515	184.515	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Form pencatatan/buku rapor kesehatanku (Sesuai jumlah peserta didik di sekolah/madrasah/pesantren)	184.515	184.515	100%	20
2	Form pencatatan/buku pemantauan kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar di luar satuan pendidikan dasar seperti di panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja)	184.515	184.515	100%	20
3	Kuesioner skrining kesehatan (Sesuai jumlah anak usia pendidikan dasar)	184.515	184.515	100%	20
4	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di dalam sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah anak usia pendidikan dasar per	184.515	184.515	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	sekolah/madrasah/pesantren)				
5	Formulir rekapitulasi hasil pelayanan kesehatan usia sekolah dan remaja di luar sekolah (Sesuai kebutuhan dengan mempertimbangkan jumlah panti/LKSA, lapas/LPKA dan Posyandu remaja per Puskesmas)	460	460	100%	20
6	Tablet Tambah Darah pada remaja putri kelas 7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah (Jumlah remaja putri kelas7-9 dan usia 12-17 tahun diluar sekolah dikalikan 52 tablet dan mempertimbangkan ketersediaan stok opname yang ada di Gudang farmasi kabupaten/kota)	1.845.150	1.845.150	100%	20
7	Alat Pemeriksaan Hb (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining anemia di sekolah SMP/ sederajat)	35	35	100%	20
8	Strip Hb sasaran remaja putri kelas 7 (Hematologi analyzer di Puskesmas dan Hb meter untuk skrining	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	anemia di sekolah SMP/ sederajat)				
9	Media promosi kesehatan (Media khusus remaja sehat)	495	495	100%	20
10	Vaksin Campak Rubela, DT, Td untuk pelaksanaan Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) (sesuai standar kebutuhan bagi seluruh sasaran kelas 1 SD, kelas 2 SD dan kelas 5 SD dan anak dengan usia setara)	36.903	36.903	100%	20
11	Tenaga medis: Dokter/Dokter gigi	107	107	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
14	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
17	Tenaga non kesehatan terlatih atau mempunyai kualifikasi tertentu: Guru	175	175	100%	20
18	Tenaga non kesehatan terlatih atau Mempunyai Kualifikasi tertentu: Kader Kesehatan/dokter kecil/peer conselor	175	175	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.21 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	587.315	587.315	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	460	460	100%	20
2	Alat: Alat Ukur Lingkar Lengan Atas (LILA)	460	460	100%	20
3	Alat: Tensimeter	460	460	100%	20
4	Alat: Glukometer	460	460	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
5	Alat: Alat Pemeriksa Hb	460	460	100%	20
6	Alat: Tes strip gula darah, Lancet, Kapas alkohol	587315	587315	100%	20
7	Alat: KIT IVA Tes	35	35	100%	20
8	Strip dan Reagen pemeriksaan Hb	35	35	100%	20
9	Kit Ophthalmologi Komunitas	35	35	100%	20
10	Kuesioner PUMA (Deteksi dini Penyakit Paru Obstrusif Kronis/PPOK)	35	35	100%	20
11	Alat Pelayanan KB	105	105	100%	20
	a. Set Pemasangan dan Pencabutan Alat Kontrasepsi Dalam Rahim (AKDR)	35	35	100%	20
	b. Set Pemasangan dan Pencabutan Implan	35	35	100%	20
	c. Vasectomi Set	35	35	100%	20
12	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi Sistem Informasi	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Penyakit Tidak Menular (SIPTM)				
13	Vaksin Tetanus Difteri (td)	97.463	97.463	100%	20
14	Tenaga medis: Dokter	71	71	100%	20
15	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
16	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
17	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
18	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	87	87	100%	20
19	Kader kesehatan terlatih dan mempunyai kualifikasi tertentu	175	175	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.22 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar	Indeks Pencapaian
----	-----------------------	--------------------------	-------------------

		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)	Persentase (4:3 x 100%)	Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	174.506	174.506	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Alat pemeriksaan deteksi dini: alat ukur berat badan, alat ukur tinggi badan, alat ukur lingkar perut, lingkar lengan atas, dan tensimeter	460	460	100%	20
2	Glukometer/alat pemeriksaan gula darah	460	460	100%	20
3	Alat pemeriksaan kolesterol	460	460	100%	20
4	Bahan medis Habis Pakai: strip uji pemeriksaan gula darah dan kolesterol, lancet, kapas alkohol	174.506	174.506	100%	20
5	Instrumen Skrining Lansia Sederhana (SKILAS), instrumen	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Aktivitas Kehidupan Sehari-hari (AKS)/Activity Daily Living (ADL Barthel)				
6	Buku kesehatan lansia atau aplikasi pencatatan terkait lainnya	174.506	174.506	100%	20
7	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
8	Tenaga medis: Dokter	71	71	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
13	Kader kesehatan terlatih dan	175	175	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	mempunyai kualifikasi tertentu				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.23 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Hipertensi) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	64.187	64.187	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pedoman pengendalian hipertensi dan media Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) (panduan dalam	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	melakukan penatalaksanaan dan edukasi sesuai standar, minimal 2)				
2	Obat Hipertensi	64.187	64.187	100%	20
3	Tensimeter (mengukur tekanan darah)	460	460	100%	20
4	Formulir pencatatan dan pelaporan Aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK)	35	35	100%	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (peningkatan pengetahuan masyarakat)	35	35	100%	20
6	Tenaga medis: Dokter	71	71	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Tenaga promosi kesehatan dan ilmu perilaku	67	67	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tanaga Kefarmasian	74	74	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.24 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Pada Penderita Diabetes Melitus) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	11.128	11.128	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Obat Diabetes Melitus	11.128	11.128	100%	20
2	Fotometer atau Glukometer (melakukan pemeriksaan gula darah, minimal 1 di setiap fasyankes sesuai kebutuhan)	460	460	100%	20
3	BMHP (Bahan Medis Habis Pakai) gula darah dalam pemantauan kadar gula dalam darah: reagen glukosa atau strip tes gula darah,	11.128	11.128	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	kapas alkohol, lancet				
4	Formulir pencatatan dan pelaporan aplikasi SI PTM (Sistem Informasi Penyakit Tidak Menular), ASIK (Aplikasi Sehat Indonesiaku), Simpus (Sistem Informasi Manajemen Puskesmas)	35	35	100%	20
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) (minimal 3 di setiap fasyankes terdiri dari: 1 (satu) Panduan Praktik Klinis (PPK) bagi dokter di FKTP; 1 (satu) media KIE tentang diabetes melitus; dan 1 (satu) media KIE tentang penyakit tidak menular)	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
6	Tenaga medis: Dokter	71	71	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Gizi	48	48	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Teknis Medis Ahli Teknologi Laboratorium Medik (ATLM)	48	48	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.25 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan ODGJ) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	4.655	4.655	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Buku Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa (PPDGJ III) atau Buku PPDGJ terbaru (bila sudah tersedia) bentuk fisik atau elektronik)	35	35	100%	20
2	Penyediaan Psikofarmaka (pengobatan/medikasi)	35	35	100%	20
3	Penyediaan formulir skrining kesehatan jiwa dan/ atau penyediaan melalui aplikasi (instrumen untuk skrining masalah kesehatan jiwa/risiko gangguan jiwa pada caregiver)	4.656	4.656	100%	20
4	Penyediaan formulir pencatatan dan	35	35	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	pelaporan melalui sistem informasi kesehatan (pencatatan dan pelaporan)				
5	Media Promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
6	Tenaga kesehatan: Dokter	71	71	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan di bidang kesehatan jiwa (contoh: Psikolog klinis, perawat jiwa, perawat terlatih)	66	66	100%	20
8	Tenaga lain yang terlatih di bidang kesehatan jiwa.	35	35	100%	20
9	Tenaga profesional lainnya	35	35	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.26 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima
		Jumlah yang harus	Jumlah yang terlayani		

		dilayani (Orang)	(Orang)		Layanan Dasar (5 x 80%)
1	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	18.604	18.604	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Media KIE (Leaflet, Lembar Balik, Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	47	47	100%	20
2	Reagen Zn TB	6.201	6.201	100%	20
3	Masker bedah dan Masker N95	18.604	18.604	100%	20
4	Pot dahak, Kaca slide, Bahan Habis Pakai (Oil Emersi, Ether Alkohol Lampu Spirtus/Bunsen, Ose/Lidi), Rak pengering.	18.604	18.604	100%	20
5	Katrid tes cepat molekuler	18.604	18.604	100%	20
6	Formulir pencatatan dan pelaporan	47	47	100%	20
7	Pedoman/Standar Operasional Prosedur (SOP)	47	47	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
8	Tuberkulin	1.860	1.860	100%	20
9	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis paru	97	97	100%	20
10	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
11	Tenaga kesehatan: Tenaga Kefarmasian	74	74	100%	20
12	Tenaga kesehatan: Tenaga Kesehatan Masyarakat	67	67	100%	20
13	Tenaga kesehatan: Analis Teknik Laboratorium Medik (ATLM)	48	48	100%	20
14	Tenaga kesehatan: Radiografer	12	12	100%	20
15	Kader Kesehatan	175	175	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.27 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Kesehatan (Pelayanan Kesehatan Orang dengan Resiko Terinfeksi Virus HIV) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (<i>Human Immunodeficiency Virus</i>)	18.422	18.422	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Yang Tersedia		
1	Media promosi Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE)	35	35	100%	20
2	Tes cepat HIV/Rapid Diagnostic Test (RDT) pertama	18.422	18.422	100%	20
3	Bahan Medis Habis Pakai, Handschoen, Alkohol Swab, Plester, Lancet/Jarum Steril, Jarum S spuit yang sesuai/Vacutainer dan Jarum Sesuai	18.422	18.422	100%	20
4	Alat tulis, rekam medis yang berisi nomor rekam medis, nomor fasilitas pelayanan	18.422	18.422	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	kesehatan pelaksana, nomor KTP/NIK				
5	Tenaga medis: Dokter/dokter spesialis penyakit dalam/dokter spesialis kulit dan kelamin	96	96	100%	20
6	Tenaga kesehatan: Bidan	749	749	100%	20
7	Tenaga kesehatan: Perawat	391	391	100%	20
8	Tenaga kesehatan: Ahli Teknologi Laboratorium Medis (ATLM)	48	48	100%	20
9	Tenaga kesehatan: Tenaga kesehatan masyarakat	67	67	100%	20
10	Tenaga non kesehatan Terlatih/Mempunyai Kualifikasi tertentu: pendamping dan penjangkauan	0	0	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.28 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan kesehatan balita	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100	Tuntas Paripurna
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100	Tuntas Paripurna
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	100	Tuntas Paripurna
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	100	Tuntas Paripurna
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	100	Tuntas Paripurna
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	100	Tuntas Paripurna
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	100	Tuntas Paripurna
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.2.6 Kendala yang Dihadapi

Tabel IV.29 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
1	SDM	Beban Petugas yang tinggi	Pemerataan beban kerja, Peningkatan kompetensi
2	Anggaran	Kebijakan juknis penggunaan anggaran khususnya DAK yang belum bisa sinkron dengan aturan di Daerah	Koordinasi kebijakan penggunaan anggaran dengan Instansi Induk
II	EKSTERNAL		
1	Pelayanan kesehatan ibu hamil	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
2	Pelayanan kesehatan ibu bersalin	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
3	Pelayanan kesehatan bayi baru lahir	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
4	Pelayanan kesehatan balita	Target dan capaian terpenuhi	Melakukan evaluasi rencana kegiatan untuk Meningkatkan serapan anggaran
5	Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
6	Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
7	Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
8	Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
9	Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
10	Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
11	Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran
12	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Target dan capaian terpenuhi	Mempertahankan dan Meningkatkan serapan anggaran

Sumber: Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.3 Urusan Pekerjaan Umum

4.3.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen dan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen Nomor 113 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Pekerjaan Umum di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari (Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen)
- b. Penyediaan pelayanan pengolahan Air Limbah Domestik (Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen)

4.3.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.30 Target Capaian SPM Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PEKERJAAN UMUM								
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Persentase jumlah rumah tangga yang telah memiliki akses terhadap air minum melalui SPAM jaringan perpipaan dan SPAM bukan jaringan perpipaan terlindungi pada akhir pencapaian SPM terhadap total rumah tangga di seluruh kabupaten/kota	476.112	12 bulan	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	89.210	12 bulan	10.966.524.000
					Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	389.902	12 bulan	
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	Jumlah Total yang terlayani	5068	12 bulan	Ukuran Kuantitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik , setiap rumah memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik	1267	12 bulan	10.413.071.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dan/atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	350	12 bulan	780.216.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar	917	12 bulan	9.632.855.000

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen 2024

4.3.3 Anggaran

Tabel IV.31 Alokasi Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	127.561.466.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	10.966.524.000
	APBD	10.966.524.000

NO	PENDANAAN	PAGU
	A. APBD MURNI	0
	B. APBD DAU	394.943.000
	C. APBD DAK FISIK	10.571.581.000
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.32 Rincian Kegiatan Anggaran SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				20.484.524.000	20.073.412.415	97,99%
1	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM				10.966.524.000	10.582.630.406	96,50%
	1	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			10.966.524.000	10.582.630.406	96,50%
		1	Pembangunan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	SR	10.571.581.000	10.223.771.048	96,71%
		2	Peningkatan SPAM jaringan perpipaan di kawasan Perdesaan	Liter/Detik	100.000.000	97.596.000	97,60%
		3	Operasi dan pemeliharaan SPAM di kawasan Perdesaan	Unit	200.000.000	193.599.358	96,80%
		4	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Orang	94.943.000	67.664.000	71,27%
	JUMLAH INDIKATOR				10.966.524.000	10.582.630.406	96,50%
	JUMLAH PROGRAM				10.966.524.000	10.582.630.406	96,50%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
2	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH				9.518.000.000	9.490.782.009	99,71%
	2	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota			9.518.000.000	9.490.782.009	99,71%
		1	Pembangunan/penyediaan sub sistem pengolahan setempat	Rumah Tangga	8.657.500.000	8.652.500.000	99,94%
		2	Operasi dan pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik	Unit	25.000.000	24.669.011	98,68%
		3	Penyediaan sarana pengangkutan lumpur tinja	Unit	629.500.000	629.400.000	99,98%
		4	Penyediaan jasa penyedotan lumpur tinja	Rumah Tangga	91.000.000	90.826.123	99,81%
		5	Rehabilitasi/peningkatan/perluasan sarana dan prasarana IPLT	M ³ /Hari	115.000.000	93.386.875	81,21%
	JUMLAH INDIKATOR				9.518.000.000	9.490.782.009	99,71%
	JUMLAH PROGRAM				9.518.000.000	9.490.782.009	99,71%

4.3.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.33 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	502 rang yang terdiri dari: DPUPR 10 orang PDAM 79 orang Dinkes 35 orang KPSPAMS 378 orang
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	25 orang yang terdiri atas: - 9 orang Tim Kantor -14 orang operator sedot tinja -12 TFL

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.3.5 Hasil Capaian

Tabel IV.34 Realisasi Capaian SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.112	476.112	100	10.967.274.000	10.582.630.406	96,49
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	5068	5068	100	10.413.071.000	10.383.899.562	99,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.35 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Pemenuhan Kebutuhan Pokok Air Minum Sehari-hari) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	476.112	476.112	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pelayanan SPAM Bukan Jaringan Perpipaan	386.902	386.902	100%	20
2	Pelayanan SPAM Jaringan Perpipaan	89.210	89.210	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.36 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum (Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani	Jumlah yang terlayani		
1	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	5.068	5.068	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Ukuran Kuantitas Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik , setiap rumah	1.267	1.267	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	memiliki minimal 1 (satu) akses pengolahan air limbah domestik				
2	Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses aman terhadap fasilitas buang air besar individual bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk minimal 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar atau di seluruh wilayah perkotaan dimana bangunan atas dilengkapi kloset leher angsa dan bangunan bawah dilengkapi tangki septik sesuai standar dengan lumpur tinja disedot secara berkala minimal tiga tahun sekali, serta dibuang dan diolah ke IPLT; dan sambungan rumah yang terkoneksi ke SPALD-T	350	350	100%	20
3	Ukuran Kualitas penyediaan pelayanan akses layak merupakan	917	917	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	fasilitas buang air besar bagi masyarakat yang bermukim di wilayah pedesaan dengan kepadatan penduduk kurang dari 25 (dua puluh lima) jiwa per hektar dimana bangunan atas dilengkapi dengan kloset leher angsa dan bangunan bawah dapat menggunakan tangki septik sesuai standar maupun lubang tanah atau cubluk kembar				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.37 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	100	Tuntas Utama
2	Penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik	100	Tuntas Utama

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.3.6 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV.38 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Pekerjaan Umum Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Sumber daya alam	Terbatasnya sumber mata air bersih	Penyediaan SPAM regional bersama
2	Sumber daya alam	Sumber akses air minum belum layak	Pembentukan kelembagaan pengelolaan SPAM regional bersama
3	Sumber daya alam	Masih terdapat warga yang belum mendapatkan pelayanan akses air minum layak.	Peningkatan kualitas akses air minum layak secara berkala.
4	Sarana dan prasarana	Masih banyak masyarakat yang belum punya tangki septik yang standar/SNI (+/- 25%) sehingga pengolahan lumpur tinja belum maksimal	Lewat program DAK Sanitasi masyarakat akan membuat Tangki septik yang sesuai standart SNI

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.4 Urusan Perumahan Rakyat

4.4.1 Jenis Pelayanan Dasar

Secara umum pelaksanaan urusan Perumahan Rakyat dilaksanakan oleh Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Hal ini mendasari Peraturan Bupati Kebumen nomor 114 tahun 2021 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen. Jenis Pelayanan dasar pada SPM Perumahan Rakyat di Kabupaten Kebumen mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdiri atas:

- a. Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota

- b. Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten/kota

4.4.2 Target Pencapaian SPM

Mendasari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Nomor 29/PRT/M/2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.39 Target Capaian SPM Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG PERUMAHAN RAKYAT								
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni	100%	12 bulan	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	468.788.000
					Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	12 bulan	
					Pembangunan Baru Di Lokasi Baru / Relokasi Bagi Korban Bencana	9	12 bulan	
					Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Presentase jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program pemerintah daerah Kabupaten/Kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah layak huni	6	12 bulan	Fasilitasi Penggantian Hak Atas Penguasaan Tanah dan/Atau Bangunan Penyediaan Rumah Layak Huni	-	-	-

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Tahun 2024

4.4.3 Anggaran

Tabel IV.40 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen

Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	54.780.844.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	498.787.000
	APBD	498.787.000
	A. APBD MURNI	498.787.000
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.41 Alokasi Anggaran SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen

Tahun 2024

N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN	SERAPA N	
	KABUPATEN KEBUMEN				498.787.000	493.188.825	98,88%
1	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN				498.787.000	493.188.825	98,88%
	1	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			29.999.000	29.987.000	99,96%
		1	Identifikasi perumahan di	Dokume n	29.999.000	29.987.000	99,96%

N o	PROGRA M	KEGIATA N	SUB KEGIATAN	SATUA N	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPA N
			lokasi rawan bencana atau terkena relokasi program Kabupaten/K ota				
	JUMLAH INDIKATOR				29.999.00 0	29.987.00 0	99,96%
2		Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota			468.788.0 00	463.201.8 25	98,81%
		1	Rehabilitasi rumah bagi korban bencana	Unit Rumah	431.288.0 00	426.194.4 25	98,82%
		2	Penyusunan Site Plan atau Detail Engineering Design (DED) bagi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/K ota	Dokume n	37.500.00 0	37.007.40 0	98,69%
	JUMLAH INDIKATOR				468.788.0 00	463.201.8 25	98,81%
	JUMLAH PROGRAM				498.787.0 00	493.188.8 25	98,88%

4.4.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.42 Dukungan Personel Penerpan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	Personel yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM bidang Perumahan Rakyat secara umum berasal dari pegawai Bidang Perumahan Dinas DISPERKIMUB Kab.Kebumen dimana pada tahun 2024 jumlah personil sebanyak 15 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 3 orang.
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	Jumlah personil sebanyak 15 orang dengan jumlah laki-laki sebanyak 12 orang dan perempuan 3 orang.

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.4.5 Hasil Capaian

Hasil Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.43 Realisasi Capaian SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	1	1	100	15.000.000	15.000.000	100
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah kabupaten	9	9	100	453.788.000	452.958.417	100

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.44 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	4	4	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Bantuan Akses Rumah Sewa Layak Huni Bagi Korban Bencana	-	-	-	-
2	Rehabilitasi Rumah Bagi Korban Bencana	1	1	100%	20
3	Pembangunan Baru Di Lokasi Baru/Relokasi Bagi Korban Bencana	9	9	100%	20
4	Pembangunan Kembali Rumah Bagi Korban Bencana	-	-	-	-
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2024

Tabel IV.45 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat (Fasilitasi penyediaan rumah yang layak

huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten)
Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	36	36	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Fasilitasi Penggantian Hak atas Penguasaan Tanah atau Bangunan	-	-	-	-
2	Penyediaan Rumah Layak Huni	9	9	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2024

Tabel IV.46 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
----	-----------------------	-----------------------------------	---------------------

1	Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna
2	Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah daerah daerah kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen 2024

4.4.6 Kendala yang Dihadapi

Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV.47 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Perumahan Rakyat Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	Perencanaan	Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan SPM perumahan rakyat adalah Penanganan rumah korban bencana tidak dapat segera dilaksanakan setelah terjadi bencana.	Penanganan rumah korban bencana dilakukan pada tahun N+1 melalui proses Perencanaan dalam dokumen perencanaan daerah dan penganggaran dalam APBD.
2	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
3	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Dari beberapa masyarakat korban bencana tidak memiliki lahan yang lebih aman untuk relokasi	Sosialisasi dan pendekatan persuasive kepada masyarakat korban bencana agar bersedia direlokasi dan mengusulkan ke pemerintah pusat untuk disediakan rumah susun bagi korban bencana yang tidak punya lahan

Sumber: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.5 Urusan Trantibumlinmas

4.5.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mendasari Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 121 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat sebagai berikut:

- a. Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
- b. Pelayanan informasi rawan bencana;
- c. Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
- d. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
- e. Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

4.5.2 Target Pencapaian SPM

Tabel IV.48 Target Capaian SPM Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG TRANTIBUMLINMAS								
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	Presentase jumlah penduduk yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan Perkada	1	12 bulan	Penegakan Perda sesuai SOP	1	12 bulan	12.980.594.000
					Pelaksanaan penegakan perda menggunakan Sarpras sesuai standar	100%	12 bulan	
					Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	100%	12 bulan	
2	Pelayanan informasi rawan bencana	Presentase jumlah penduduk dikawasan rawan bencana yang memperoleh informasi rawan bencana sesuai jenis ancaman bencana	726.453	12 bulan	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per	726.453	12 bulan	292.446.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					jenis bencana			
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Persentase (%) jumlah warga negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2902	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	12 bulan	1.196.342.000
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Persentase (%) jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.402	12 bulan	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.402	12 bulan	24.123.000.000
					Melakukan respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	5 SK darurat bencana	12 bulan	
					Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	56.402	12 bulan	
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	Presentase Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100%	12 bulan	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	100%	12 bulan	2.368.778.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	26 kecamatan	12 bulan	

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.5.3 Anggaran

Tabel IV.49 Alokasi Anggaran SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KAB. KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	24.708.324.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	36.232.504.000
	APBD	36.232.504.000
	A. APBD MURNI	20.934.632.000
	B. APBD DAU	15.297.872.000
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	0
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	0
	B. APBN-DEKONSENTRASI	0

NO	PENDANAAN	PAGU
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				20.986.132.000	20.519.077.833	97,77%
1	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM (TRANTIBUM)				12.980.594.000	12.815.025.076	98,72%
	1	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			12.431.759.000	12.269.445.506	98,69%
		1	Pemberdayaan perlindungan masyarakat dalam rangka ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	5.075.270.000	5.000.913.673	98,53%
		2	Peningkatan kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa Hak Asasi Manusia	Orang	157.861.000	147.620.313	93,51%
		3	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam teknik pencegahan dan penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum	Dokumen	1.375.219.000	1.374.393.328	99,94%
		4	Pencegahan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan dan penyuluhan, pelaksanaan patroli, pengamanan, dan pengawalan	Kasus	5.823.409.000	5.746.518.192	98,68%
	JUMLAH INDIKATOR				12.431.759.000	12.269.445.506	98,69%
	2	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota			541.560.000	538.682.370	99,47%
		1	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	38.782.000	38.708.778	99,81%
		2	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah	Laporan	480.307.000	477.537.917	99,42%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		3	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	22.471.000	22.435.675	99,84%
JUMLAH INDIKATOR					541.560.000	538.682.370	99,47%
	3	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota			7.275.000	6.897.200	94,81%
		1	Pengembangan kapasitas dan karier PPNS	Laporan	7.275.000	6.897.200	94,81%
JUMLAH INDIKATOR					7.275.000	6.897.200	94,81%
JUMLAH PROGRAM					12.980.594.000	12.815.025.076	98,72%
2	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA (KEBENCANAAN)				5.636.760.000	5.366.652.416	95,21%
	4	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota			292.446.000	290.995.200	99,50%
		1	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana Kabupaten/Kota (per jenis bencana)	Orang	292.446.000	290.995.200	99,50%
JUMLAH INDIKATOR					292.446.000	290.995.200	99,50%
	5	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana K20240401115443			1.196.342.000	1.183.373.014	98,92%
		1	Penguatan kapasitas kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	Kawasan	225.423.000	224.898.614	99,77%
		2	Penanganan pasca bencana Kabupaten/Kota	-	0	0	0%
		3	Pengembangan kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) bencana Kabupaten/Kota	Orang	47.822.000	47.577.200	99,49%
		4	Penyusunan rencana kontijensi	Dokumen	13.879.000	13.823.100	99,60%
		5	Gladi kesiapsiagaan terhadap bencana	Orang	153.815.000	152.514.500	99,15%
		6	Penyusunan rencana penanggulangan kedaruratan bencana	Dokumen	16.461.000	16.338.400	99,26%
		7	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota	Unit	350.000.000	341.363.500	97,53%
		8	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Kawasan	55.466.000	55.236.800	99,59%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		9	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Laporan	333.476.000	331.620.900	99,44%
JUMLAH INDIKATOR					1.196.342.000	1.183.373.014	98,92%
	6	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana			2.412.300.000	2.274.605.169	94,29%
		1	Respon cepat darurat bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	2.129.237.000	2.018.749.410	94,81%
		2	Pencarian, pertolongan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	183.063.000	157.404.759	85,98%
		3	Penyediaan logistik penyelamatan dan evakuasi korban bencana Kabupaten/Kota	Orang	100.000.000	98.451.000	98,45%
JUMLAH INDIKATOR					2.412.300.000	2.274.605.169	94,29%
	7	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana			1.735.672.000	1.617.679.033	93,20%
		1	Penguatan kelembagaan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	40.384.000	40.365.600	99,95%
		2	Kerja sama antar lembaga dan kemitraan dalam penanggulangan bencana Kabupaten/Kota	Dokumen	36.439.000	36.142.700	99,19%
		3	Pengelolaan dan pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Dokumen	31.950.000	31.906.600	99,86%
		4	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota	Dokumen	1.626.899.000	1.509.264.133	92,77%
JUMLAH INDIKATOR					1.735.672.000	1.617.679.033	93,20%
JUMLAH PROGRAM					5.636.760.000	5.366.652.416	95,21%
3	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN (DAMKAR)				2.368.778.000	2.337.400.341	98,68%
	8	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			2.317.811.000	2.288.775.171	98,75%
		1	Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah Kabupaten/Kota	Dokumen	2.264.119.000	2.235.106.921	98,72%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		2	Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran	Laporan	53.692.000	53.668.250	99,96%
JUMLAH INDIKATOR					2.317.811.000	2.288.775.171	98,75%
	9	Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran			17.954.000	17.899.950	99,70%
		1	Pendataan sarana prasarana proteksi kebakaran	Dokumen	17.954.000	17.899.950	99,70%
JUMLAH INDIKATOR					17.954.000	17.899.950	99,70%
	10	Investigasi Kejadian Kebakaran			0	0	0%
		1	Investigasi kejadian kebakaran, meliputi penelitian dan pengujian penyebab kejadian kebakaran	Dokumen	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR					0	0	0%
	11	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran			33.013.000	30.725.220	93,07%
		1	Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat	Orang	33.013.000	30.725.220	93,07%
JUMLAH INDIKATOR					33.013.000	30.725.220	93,07%
	12	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia			0	0	0%
		1	Penyelenggaraan operasi pencarian dan pertolongan pada peristiwa yang penimpa, membahayakan, atau mengancam keselamatan manusia	Laporan	0	0	0%
		2	Standarisasi sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Dokumen	0	0	0%
		3	Pembinaan aparaturnya pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Laporan	0	0	0%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
		4	Pengadaan sarana dan prasarana pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia/penyelamatan dan evakuasi	Unit	0	0	0%
JUMLAH INDIKATOR						0	0%
JUMLAH PROGRAM						2.368.778.000	2.337.400.341 98,68%

4.5.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.50 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
BIDANG TRANTIBUMLINMAS		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	21 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kabupaten Kebumen
2	Pelayanan informasi rawan bencana	43 orang (karyawan BPBD)
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	43 orang (karyawan BPBD)
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	578 orang (relawan)
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	210 orang dibawah koordinasi Satpol PP Kabupaten Kebumen

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.5.5 Hasil Capaian

Tabel IV.51 Realisasi Capaian SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	1	1	100	12.980.594.000	12.815.025.076	98,72

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
2	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100	292.446.000	290.995.200	99,5
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100	1.196.342.000	1.183.373.014	98,92
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.402	56.402	100	2.412.300.00	2.274.605.169	94,29

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.52 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	29.969	29.969	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Penegakan Perda sesuai SOP	20	20	100%	20
2	Pelaksanaan penegakan perda menggunakan	35.969	35.969	100%	20

	Sarpras sesuai standar				
3	Pelaksanaan penegakan Perda sesuai dengan standar jumlah SDM Pol PP dan Linmas yang sesuai standar	35.969	35.969	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.53 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan informasi rawan bencana) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan informasi rawan bencana	726.453	726.453	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Pemetaan terhadap lokasi/daerah rawan bencana melalui penyusunan dokumen Kajian	726.453	726.453	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	Risiko Bencana, Identifikasi dan pemetaan terhadap warga negara di kawasan rawan bencana, Identifikasi warga yang berpotensi menjadi korban bencana				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.54 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Melakukan sosialisasi, Komunikasi, informasi dan Edukasi (KIE) rawan bencana, Pengadaan dan pemasangan rambu evakuasi dan papan informasi publik per jenis bencana	726.453	726.453	100%	20
2	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	2.902	2.902	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.55 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan	56.402	56.402	100%	80

	evakuasi korban bencana				
--	-------------------------	--	--	--	--

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	56.402	56.402	100%	20
2	Melakukan respon cepat darurat bencana, Aktivasi sistem komando penanganan darurat bencana	5	5	100%	20
3	Pelaksanaan pencarian, pertolongan evakuasi korban bencana	56.402	56.402	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.56 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas (Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	109	109	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan penyelamatan dan evakuasi melalui pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran atau terdampak	90	90	100%	20
2	Layanan Pendataan, Inspeksi dan Investigasi dengan mengeluarkan surat keterangan korban kebakaran yang diperuntukkan bagi pengurusan surat berharga dan identitas kependudukan	26 kec	26 kec	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					100

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.57 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Pelayanan ketentraman dan ketertiban umum	100	Tuntas Paripurna
2	Pelayanan informasi rawan bencana	100	Tuntas Paripurna
3	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	100	Tuntas Paripurna
4	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	100	Tuntas Paripurna
5	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.5.6 Kendala yang Dihadapi

Tabel IV.58 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Trantibumlinmas Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Masyarakat	Belum semua warga masyarakat memahami terhadap pelayanan ganti rugi akibat penegakan perda/perkada	Sosialisasi
2	Wilayah risiko tinggi bencana	Masih terbatasnya pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap risiko tinggi bencana	Peningkatan kapasitas destana dan pemasangan rambu/ informasi bencana
3	Warga dan aparat	Masih terbatasnya pemahaman warga dan aparat terhadap bencana	Melaksanakan sosialisasi atau pelatihan mitigasi bencana

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
4	Petugas/relawan	Masih terbatasnya kompetensi teknis para petugas/ relawan	Melaksanakan pelatihan dan kompetensi petugas/relawan
5	Kondisi geografis	Belum seluruh wilayah Kabupaten Kebumen terjangkau <i>respon time</i> 15 menit	Menggalakkan partisipasi masyarakat dalam penanganan kebakaran

Sumber: Satpol PP Kabupaten Kebumen dan BPBD Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.6 Urusan Sosial

4.6.1 Jenis Pelayanan Dasar

Mendasari Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota, jenis pelayanan dasar bidang urusan sosial sebagai berikut:

- Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial;
- Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial; dan
- Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten/kota.

4.6.2 Target Pencapaian SPM

Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Penerapan Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan target sebagai berikut:

Tabel IV.59 Target Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
BIDANG SOSIAL								
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	639	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	45	12 bulan	14.722.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	3	12 bulan	4.148.500
					Penyediaan permakanan	150	12 bulan	261.166.000
					Penyediaan sandang	50	12 bulan	75.459.500
					Penyediaan alat bantu	100	12 bulan	137.444.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	12 bulan	12.000.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	100	12 bulan	1.800.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	10	12 bulan	1.800.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.662.800
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	140	12 bulan	1.820.000.000
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	12 bulan	7.855.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	12 bulan	7.855.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Layanan rujukan	10	12 bulan	7.855.000
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) anak terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	361	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	10	12 bulan	9.314.000
					Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	5	12 bulan	4.148.500
					Penyediaan permakanan	100	12 bulan	160.500.000
					Penyediaan sandang	100	12 bulan	20.150.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	12 bulan	1.800.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	10	12 bulan	2.662.800
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	10	12 bulan	1.800.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan	5	12 bulan	2.662.800
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100	12 bulan	2.662.800
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	12 bulan	7.855.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	7.855.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	7.855.000
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	Persentase (%) lanjut usia terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	1254	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	30	12 bulan	9.314.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	20	12 bulan	4.148.500
					Penyediaan permakanan	1054	12 bulan	1.584.480.000
					Penyediaan sandang	100	12 bulan	31.330.500
					Penyediaan alat bantu	10	12 bulan	15.470.000
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	12 bulan	2.662.000
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	12 bulan	1.800.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	12 bulan	1.800.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah / Bukti dokumen kependudukan	3	12 bulan	2.662.800
					Akses ke layanan kesehatan dasar / fasilitasi	3	12 bulan	2.662.800

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					layanan kesehatan			
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	12 bulan	7.855.000
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	7.855.000
					Layanan rujukan	3	12 bulan	7.855.000
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	Persentase (%) gelandangan dan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti	126	12 bulan	Layanan data dan pengaduan	10	12 bulan	9.314.000
					Penyediaan layanan kedaruratan / layanan reaksi cepat	50	12 bulan	4.148.500
					Penyediaan permakanan	20	12 bulan	232.100.000
					Penyediaan sandang	20	12 bulan	5.922.500
					Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	3	12 bulan	2.662.800
					Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	12 bulan	1.800.000
					Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	3	12 bulan	1.800.000
					Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Kartu	3	12 bulan	2.662.800

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Identitas Anak / Bukti dokumen kependudukan			
					Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar / fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	3	12 bulan	2.662.800
					Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	12 bulan	7.855.800
					Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	12 bulan	7.855.800
					Layanan rujukan	3	12 bulan	7.855.000
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	Persentase%) korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten	947	12 bulan	Penyediaan Permakanan	500	12 bulan	226.321.000
					Penyediaan Sandang	115	12 bulan	79.313.000
					Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	12 bulan	125.733.000
					Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)	92	12 bulan	109.926.000

No	JENIS PELAYANAN DASAR	Indikator Kinerja Pencapaian						Anggaran
		Penerima Layanan Dasar			Mutu Minimal Layanan Dasar			
		Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	Indikator	Target	Batas Waktu Capaian	
					Pelayanan Dukungan Psikososial (Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan dan/atau rujukan)	240	12 bulan	39.342.000

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2024

4.6.3 Anggaran

Tabel IV.60 Alokasi Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

NO	PENDANAAN	PAGU
1	APBD KABUPATEN KEBUMEN	3.062.696.919.000
2	ALOKASI ANGGARAN SATKER PERANGKAT DAERAH	15.352.402.000
3	ALOKASI ANGGARAN PENERAPAN SPM PADA SATKER PD	3.365.226.700
	APBD	3.165.226.700
	A. APBD MURNI	3.165.226.700
	B. APBD DAU	0
	C. APBD DAK FISIK	0
	D. APBD DAK NON FISIK	0
	E. DANA BAGI HASIL	0
	F. KERJASAMA	0
	G. OTONOMI KHUSUS	0
	NON APBD	200.000.000
	A. CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR)	0
	APBN	200.000.000
	B. APBN-DEKONSENTRASI	200.000.000
	C. APBN-TUGAS PEMBANTUAN	0
	DANA LAINNYA	0

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.61 Rincian Kegiatan Anggaran Dasar SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
	KAB. KEBUMEN				3.165.226.700	3.165.226.700	100%

No	PROGRAM	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	SATUAN	PERANCANAAN DAN PELAKSANAAN		SERAPAN
1	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL				3.165.226.700	3.165.226.700	100%
	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial			2.584.591.700	2.584.591.700	100%
		1	Penyediaan permakanan	Orang	2.038.246.000	2.038.246.000	100%
		2	Penyediaan sandang	Orang	132.862.500	132.862.500	100%
		3	Penyediaan alat bantu	Orang	52.914.000	52.914.000	100%
		4	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	Orang	31.420.000	31.420.000	100%
		5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual, dan sosial	Orang	7.200.000	7.200.000	100%
		6	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar, serta gelandangan pengemis dan masyarakat	Orang	7.200.000	7.200.000	100%
		7	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak	Orang	10.651.200	10.651.200	100%
		8	Pemberian akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar	Orang	182.000.000	182.000.000	100%
		9	Pemberian layanan data dan pengaduan	Orang	42.664.000	42.664.000	100%
		10	Pemberian layanan kedaruratan	Orang	16.594.000	16.594.000	100%
		11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	Orang	31.420.000	31.420.000	100%
		12	Pemberian layanan rujukan	Dokumen	31.420.000	31.420.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				2.584.591.700	2.584.591.700	100%
	2	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota			580.635.000	580.635.000	100%
		1	Penyediaan makanan	Orang	226.321.000	226.321.000	100%
		2	Penyediaan sandang	Orang	79.313.000	79.313.000	100%
		3	Penyediaan tempat penampungan pengungsi	Unit	125.733.000	125.733.000	100%
		4	Penanganan khusus bagi kelompok rentan	Orang	109.926.000	109.926.000	100%
		5	Pelayanan dukungan Psikososial	Orang	39.342.000	39.342.000	100%
	JUMLAH INDIKATOR				580.635.000	580.635.000	100%
	JUMLAH PROGRAM				3.165.226.700	3.165.226.700	100%

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.6.4 Dukungan Personil

Jumlah personil atau pegawai yang terlibat dalam proses penerapan dan pencapaian SPM Kabupaten Kebumen Tahun 2024 dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel IV.62 Dukungan Personel Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Jumlah (Orang)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	280
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	280
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	280
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	280
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	401

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.6.5 Hasil Capaian

Tabel IV.63 Realisasi Capaian SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	639	639	100	616.767.800	616.767.800	100
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	361	361	100	229.265.900	229.265.900	100
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	1254	1254	100	1.679.896.400	1.679.896.400	100
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	126	126	100	86.638.400	86.638.400	100

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar			Anggaran (Rp.)		
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	947	947	100	580.635.000	580.635.000	100

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.64 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	2	3	4	5	6
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	639	639	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	2	3	4	5	6
1	Layanan data dan pengaduan	45	45	100%	20
2	penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	3	3	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
3	penyediaan permakanan	150	150	100%	20
4	penyediaan sandang	50	50	100%	20
5	penyediaan alat bantu	100	100	100%	20
6	penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	100%	20
7	pemberian bimbingan firik, mental, priritual dan sosial	100	100	100%	20
8	pemberian bimbingan sosial kepada keluarga penyandang disabilitas terlantar	10	10	100%	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20
	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/ fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	140	140	100%	20
	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100%	20
	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	20	20	100%	20
	Layanan rujukan	10	10	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.65 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	361	361	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	10	10	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/ layanan reaksi cepat	5	5	100%	20
3	Penyediaan permakanan	100	100	100%	20
4	Penyediaan sandang	100	100	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
5	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	10	100%	20
6	Penyediaan perbekalan k	10	10	100%	20
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga anak terlantar	10	10	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	5	5	100%	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	100	100	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100%	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
12	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.66 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	1254	1254	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	30	30	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	20	30	100%	20
3	Penyediaan permakanan	1054	1054	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
4	Penyediaan sandang	100	100	100%	20
5	Penyediaan alat bantu	10	10	100%	20
6	Penyediaan perbekalan kesehatan (Penyediaan P3K)	5	5	100%	20
7	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	10	10	100%	20
8	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga Penyandang Disabilitas Lanjut Usia terlantar	10	10	100%	20
9	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20
10	Akses ke layanan kesehatan dasar/fasilitasi layanan kesehatan	3	3	100%	20
11	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	3	3	100%	20
12	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
13	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.67 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	126	126	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Layanan data dan pengaduan	10	10	100%	20
2	Penyediaan layanan kedaruratan/layanan reaksi cepat	50	50	100%	20
3	penyediaan permakanan	20	20	100%	20
4	Penyediaan sandang	20	20	100%	20
5	Penyediaan perbekalan kesehatan	3	3	100%	20
6	Pemberian bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial	3	3	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
7	Pemberian bimbingan sosial kepada keluarga gelandangan dan pengemis	3	3	100%	20
8	Fasilitasi pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, atau Kartu Identitas Anak/Bukti dokumen kependudukan	3	3	100%	20
9	Akses ke layanan pendidikan dan kesehatan dasar/fasilitasi layanan pendidikan dan kesehatan	3	3	100%	20
10	Pemberian pelayanan penelusuran keluarga	5	5	100%	20
11	Pemberian pelayanan reunifikasi keluarga	3	3	100%	20
12	Layanan rujukan	3	3	100%	20
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.68 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Pelayanan Dasar dan Indeks Pencapaian (IP) Mutu Penerapan SPM Bidang Sosial (Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten) Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Penerima Layanan Dasar (5 x 80%)
		Jumlah yang harus dilayani (Orang)	Jumlah yang terlayani (Orang)		
1	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	947	947	100%	80

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
1	Penyediaan Permakanan	500	500	100%	20
2	Penyediaan Sandang	115	115	100%	20
3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	1	1	100%	20
4	Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan (ibu hamil, Penyandang Disabilitas, Anak, dan Lanjut Usia)	92	92	100%	20
5	Pelayanan Dukungan Psikososial	240	240	100%	20

No	Mutu Minimal Pelayanan Dasar	Penerima Pelayanan Dasar		Persentase (4:3 x 100%)	Indeks Pencapaian Mutu Minimal layanan Dasar (5 x 20%)
		Jumlah Mutu Barang/Jasa yang dibutuhkan	Jumlah Mutu Barang/Jasa Yang Tersedia		
	(Bimbingan konsultasi, konseling, pendampingan atau rujukan)				
TOTAL INDEKS MUTU PELAYANAN DASAR (Total Kolom 6/jumlah mutu)					20

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

Tabel IV.69 Capaian Indeks Pencapaian (IP) Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Jenis Pelayanan Dasar	Indeks SPM (IP Layanan + IP Mutu)	Kategori Indeks SPM
1	Rehabilitasi sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
2	Rehabilitasi sosial dasar anak terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
3	Rehabilitasi sosial dasar lanjut usia terlantar di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
4	Rehabilitasi sosial dasar tuna sosial khususnya gelandangan dan pengemis di luar panti sosial	100	Tuntas Paripurna
5	Perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana kabupaten	100	Tuntas Paripurna

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.6.6 Kendala yang Dihadapi

Tabel IV.70 Kendala yang dihadapi dalam Penerapan SPM Bidang Sosial Kabupaten Kebumen Tahun 2024

No	Sumber	Permasalahan	Solusi
I	INTERNAL		
1	SDM	Keterbatasan SDM	Menambah SDM
2	Anggaran	Keterbatasan Anggaran	Menambah Alokasi Anggaran
II	EKSTERNAL		
1	Penyandang disabilitas	Verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan SPM, penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus disabilitas mental)	Memaksimalkan verifikasi dan validasi data penerima sasaran pelayanan, berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak keluarga, desa, dan puskesmas saling memonitor
2	Modal usaha dan pemasaran	masih terhambatnya pemasaran produk hasil pelatihan terkendala faktor permodalan	mempromosikan produk hasil pelatihan mencari mitra usaha/pemberi modal
3	Lansia	Tidak terpenuhi kebutuhan dasar tidak memiliki rumah layak huni, tidak memiliki anggota keluarga, di terlantarkan oleh keluarga dan tidak mampu mengurus dirinya	Dirujuk ke panti khusus lansia, permohonan bedah rumah (jika memiliki hak tanah), pemberian permakanan
4	Penyandang disabilitas	penyandang disabilitas mental rentan kambuh (khusus untuk disabilitas mental), rendahnya akses lapangan kerja, rendahnya tingkat keterampilan	Pemenuhan kebutuhan dasar, pemberian pelatihan, peningkatan keterampilan, bimbingan rohani/spiritual, pemeriksaan kesehatan rutin

Sumber: Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Kebumen Tahun 2024

4.7 Program dan Kegiatan

Capaian SPM di Kabupaten Kebumen tahun 2024 didukung dengan beberapa program dan kegiatan sebagai berikut:

A. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pendidikan

Program Pengelolaan Pendidikan

1. Pendidikan Anak Usia Dini. dengan kegiatan pendukung:

a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini

- Sub Kegiatan Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD
- Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa PAUD
- Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar PAUD
- Sub Kegiatan Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan PAUD

- Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD
 - Sub Kegiatan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOP PAUD
2. Pendidikan Dasar dengan kegiatan pendukung:
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Pengadaan Mebel Sekolah
 - Pengadaan Perlengkapan Sekolah
 - Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Dasar
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar
- b) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
- Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah
 - Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama
 - Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa
 - Penyelenggaraan Proses Belajar dan Ujian bagi Peserta Didik
 - Penyiapan dan Tindak Lanjut Evaluasi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa
 - Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama
 - Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah
 - Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama
3. Pendidikan Kesetaraan dengan kegiatan pendukung:
- a) Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan

- Pemeliharaan Rutin Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengadaan Mebel Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pengadaan Perlengkapan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan
- Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Nonformal/Kesetaraan
- Penyelenggaraan Proses Belajar Nonformal/Kesetaraan
- Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan
- Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan
- Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan

B. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Kesehatan

Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat

1. Kegiatan Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - a) Pelayanan Kesehatan Ibu hamil
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
 - b) Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
 - c) Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
 - d) Pelayanan Kesehatan Balita
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
 - e) Pelayanan Kesehatan pada Usia pendidikan dasar
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
 - f) Pelayanan Kesehatan Usia Lansia
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
 - g) Pelayanan Kesehatan Usia Produktif
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
 - h) Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 - i) Pelayanan Kesehatan Penderita DM
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 - j) Pelayanan Kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) Berat

- Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
- k) Pelayanan kesehatan terduga tuberkulosis
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
- l) Pelayanan Kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (HIV)
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV

C. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Pekerjaan Umum

1. Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum

Penyediaan air minum Untuk memenuhi kebutuhan pokok air sehari-hari

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota
 - Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis SPAM
 - Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan
 - Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perdesaan

2. Program Kawasan Permukiman

Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik

- a) Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik di Daerah Kabupaten/Kota
 - Pembangunan/Penyediaan Sarana dan Prasarana IPLT
 - Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat
 - Operasi dan Pemeliharaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penataan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh

D. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Perumahan dan Permukiman

1. Program Pengembangan Perumahan

- a) Penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana kabupaten
 - Kegiatan Pembangunan dan Rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program kab/kota
 - 1) Rehabilitasi rumah bagi korban bencana
- b) Fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah daerah Kab/Kota

E. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Trantibum

1. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum

- a) Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
 - Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
 - Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam Rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
 - Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia
 - Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
- b) Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
 - Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
- c) Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota
 - Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

2. Program Penanggulangan Bencana

- a) Kegiatan Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota
 - Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)
- b) Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana
 - Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan
- c) Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana
 - Sub Kegiatan Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran

- a) Kegiatan Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota
 - Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota

F. Program dan Kegiatan yang mendukung SPM Sosial

1. Program Rehabilitasi Sosial

- a. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Alat bantu
 - Pemberian Akses Ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar
- b. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
- c. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial
 - Penyediaan Permakanan
 - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

2. Program Penanganan Bencana

- a) Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota
 - Penyediaan Permakanan
 - Penyediaan Makanan
 - Penyediaan sandang
 - Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi
 - Penanganan Khusus Bagi Kelompok Rentan
 - Pelayanan Dukungan Psikososia

BAB V

PENUTUP

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini merupakan wujud akuntabilitas kinerja dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang otonom untuk menciptakan *clean governance* serta mampu menjawab tuntutan perubahan secara efektif dan efisien. Pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan program dan kegiatan di semua urusan dapat dilaksanakan dengan baik dengan mengacu pada perencanaan pembangunan daerah yang dijabarkan dalam RKPD Tahun 2024.

LPPD Kabupaten Kebumen Tahun 2024 ini diharapkan akan menjadi titik tolak untuk mengarahkan cara pandang bagi perbaikan pembangunan di Kabupaten Kebumen kedepan. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Kebumen dituntut untuk bisa menjadi lebih baik khususnya dalam menjawab permasalahan demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Diharapkan LPPD ini di pandang bukan hanya sekedar pemenuhan formalitas belaka tetapi juga harus bisa menjadi semacam upaya moral agar penyelenggaraan pemerintah tetap memberikan perhatian lebih dalam mengidentifikasi keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan pembangunan.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) Tahun 2024 yang dapat kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya serta memberikan kekuatan, kesehatan dan kebersihan hati bagi kita semua dalam melaksanakan tugas pengabdian demi percepatan pembangunan di Kabupaten Kebumen di masa yang akan datang.

LAMPIRAN

1.1. Inovasi Daerah Tahun 2024

Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah menyebutkan bahwa inovasi daerah ditujukan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Adapun bentuk inovasi daerah antara lain inovasi tata kelola pemerintahan daerah, inovasi pelayanan publik dan/atau inovasi daerah lainnya sesuai dengan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Penyelenggaraan Inovasi Daerah diwujudkan dalam sebuah sistem inovasi daerah dan jaringan inovasi daerah. Dalam rangka mendukung iklim riset dan inovasi daerah dibentuk jejaring riset dan inovasi daerah melibatkan lembaga penelitian, bisnis, masyarakat dan media sebagai perwujudan sinergi pentahelix. Beberapa inovasi daerah di Kabupaten Kebumen antara lain:

1. Pengembangan Sistem Perlindungan Pekerja Migran, Keluarga dan Masyarakat melalui “SIPEMIKAT”

Masalah ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang menjadi perhatian. Tingginya angka pengangguran Kabupaten Kebumen sebesar 5,11% pada tahun 2023 dengan total pencari kerja yang tercatat sebesar 10.654 orang dengan persentase pencari kerja yang ditempatkan sebesar 53,54%. Kondisi ini menjadikan sebagian tenaga kerja di Kabupaten Kebumen memilih bekerja sebagai pekerja migran atau bekerja di luar negeri. Jumlah pekerja migran yang ditempatkan selama tiga tahun terakhir (2019-2023) terus meningkat menjadi sebesar 9.082 orang. Kabupaten Kebumen merupakan salah satu kantong pekerja migran yaitu tertinggi ke 8 di Jawa Tengah dan 25 di tingkat nasional. Kondisi ini memicu berbagai permasalahan terkait pekerja migran. Setidaknya terdapat 12 kasus pada Tahun 2023 yang ditangani Balai Pelayanan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP3MI) dengan aduan mayoritas adalah gagal berangkat/mundur karena tidak ada penempatan.

Upaya peningkatan perlindungan pada PMI Pemerintah Kabupaten Kebumen melalui Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Kebumen membangun sistem kolaborasi yang terintegrasi atau “SIPEMIKAT” SINERGI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN, KELUARGA DAN MASYARAKAT. Inovasi ini bertujuan agar upaya perlindungan PMI lebih komprehensif merupakan sinergi pentahelix berkomitmen untuk memaksimalkan upaya perlindungan serta pemberdayaan PMI. Dalam pelaksanaannya terdapat pilar SI PEMIKAT sebagai pengembangan Desa Migran Produktif/DESMIGRATIF yang bertujuan meningkatkan pelayanan dan perlindungan bagi Calon PMI. PMI dan PMI purna penempatan beserta anggota keluarganya secara terintegrasi, terpadu dan berkelanjutan. Inovasi ini melibatkan stakeholder termasuk perangkat daerah terkait seperti Disdukcapil, Dinas Kesehatan, dan melibatkan

instansi vertikal seperti imigrasi, kepolisian, BPJS Ketenagakerjaan dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), serta pengadilan agama.

SI PEMIKAT, Sinergi Pelindungan Pekerja Migran Keluarga dan Masyarakat bertujuan agar upaya pelindungan PMI lebih komprehensif, terbit peraturan desa, replikasi Desa Migran Produktif di 26 kecamatan, terbangun database PMI pada semua desa/kelurahan, pelibatan PMI dan keluarganya dalam kegiatan pembangunan dengan anggaran desa, community parenting untuk anak PMI yang ditinggalkan, serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Hingga saat ini telah dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama oleh Camat dan Kades, dan telah tersusun regulasi berupa Peraturan Desa tentang Pelindungan dan Pemberdayaan PMI sebanyak 295 Perdes dan 340 database calon PMI. PMI maupun PMI purna penempatan dari jumlah total 460 desa/kelurahan di Kabupaten Kebumen, 14 Pokja Bina TKI, Terbentuk Tim Psikososial community parenting, sosialisasi intensif melalui media cetak dan elektronik serta tersedia hotline layanan pengaduan PMI. Melalui Perbup Nomor 5/2023 teralokasi dana desa untuk kegiatan pelindungan PMI serta kolaborasi kegiatan antar perangkat daerah.

Kebaruan inovasi SI PEMIKAT adalah tersedianya layanan luar gedung dalam bentuk mobil keliling yang diberi nama PATRIOT yang dilaksanakan di minggu ke III setiap bulan bertempat di Alun-Alun Pancasila Kebumen atau di event-event insidental jika diperlukan. Atas inovasi tersebut Pemerintah Kabupaten Kebumen mendapatkan penghargaan Hassan Wirajuda Award (HWWA) yaitu penghargaan kepada perorangan lembaga, instansi pemerintah baik di perwakilan maupun pemerintah daerah yang memberikan upaya perlindungan kepada WNI dengan sungguh-sungguh.

2. Pengembangan Puskesmas SLRT “Rumah Harapan”

Kemiskinan merupakan salah satu isu strategis daerah Kabupaten Kebumen yang akan menjadi mainstreaming dalam penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan. Berbagai upaya Pemerintah Daerah dalam rangka penanggulangan kemiskinan dan kerentanan telah dilakukan. Pada level penanganan kemiskinan mikro masih terdapat kasus masyarakat miskin yang belum menerima layanan perlindungan sosial secara komprehensif dan banyak yang belum menerima manfaat dari program penanggulangan pemerintah meskipun kondisinya layak menerima. Sebagai langkah tindak lanjut pada September 2015 telah diluncurkan Unit Pelayanan Terpadu Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (UPT-P2K) “RUMAH HARAPAN” Kabupaten Kebumen dengan payung hukum Peraturan Bupati Kebumen Nomor 47 tahun 2015. Saat itu UPT P2K memberikan 4 (empat) jenis layanan bagi warga miskin yaitu pendidikan, kesehatan, sosial ekonomi serta data dan pelaporan.

Sejak Tahun 2017 Rumah Harapan telah berkembang menjadi Pusat Kesejahteraan Sosial (PUSKESOS) sebagai pusat informasi tentang program perlindungan sosial dan

penanggulangan kemiskinan. Puskesmas dibentuk melalui Surat Keputusan Kadinsos P3A Nomor 460/340 Tahun 2021 tentang Pembentukan Sekretariat dan Penunjukkan Sumber Daya Manusia Pelaksana Pusat Kesejahteraan Sosial Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu “Rumah Harapan”. Puskesmas juga berfungsi untuk membangun wadah aduan masyarakat tentang program bantuan sosial, juga menerima berbagai keluhan mulai dari pendidikan, kesehatan, kependudukan, sosial dan ekonomi, mengetahui kepesertaan dan kebutuhan program melalui penjangkauan oleh fasilitator di lapangan dan menjadi pusat penanganan keluhan dan rujukan, dan menghubungkan masyarakat miskin dengan multi layanan dan lintas sektoral sesuai dengan kebutuhan. Saat ini PUSKESOS memiliki 11 (sebelas) jenis layanan yaitu rekomendasi kartu indonesia sehat PBI dan badan amal zakat nasional, data terpadu (1) Rekomendasi Kartu Indonesia Sehat (KIS), (2) Pelayanan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), (3) Rekomendasi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), (4) Rekomendasi bantuan biaya pelayanan kesehatan, (5) Konsultasi bantuan sosial, PKH dan Sembako, (6) Rekomendasi adopsi anak, (7) Rehabilitasi PGOT dan ODGJ, (8) Rekomendasi layanan rujukan bagi ODGJ, disabilitas terlantar, lansia terlantar, anak terlantar dan Gepeng, (9) Rekomendasi perpanjangan dan pendirian LKS, (10) Layanan Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak (KKBGA), dan (11) Dispensasi Kawin.

Puskesmas berfungsi sebagai wadah pengaduan persoalan kemiskinan yang akan dirujuk ke berbagai pengelola program yang berwenang dan dipastikan dapat ditangani dengan baik dan terpantau proses penanganannya. Salah satu strategi perluasan dan keberlanjutan PUSKESOS antara lain dengan advokasi dan sosialisasi pada seluruh stakeholder, menyusun rencana aksi pengembangan Puskesmas SLRT, dan membangun pentahelix partisipasi sektor non pemerintah seperti yang sudah dilakukan selama ini yaitu berkolaborasi dengan: Perguruan Tinggi, pihak swasta, organisasi masyarakat sipil, BUMN, dan perangkat daerah lainnya. Saat ini Puskesmas Rumah Harapan telah dikembangkan di 130 puskesmas di tingkat desa.

Pada Tahun 2022 Rumah Harapan ditetapkan sebagai program Quick Win Smart City Kabupaten Kebumen. Selain itu Puskesmas merupakan salah satu inisiatif dalam penanggulangan kemiskinan. Keberadaan Puskesmas diharapkan dapat memberikan pelayanan yang terintegrasi, saling terkoneksi dengan seluruh pemangku kepentingan, membantu validasi data penerima bansos dan adanya puskesmas pada tingkat desa dapat mendekatkan layanan kesejahteraan sosial dengan masyarakat. PUSKESOS harapan berusaha terus mendekatkan layanan bagi masyarakat miskin, dalam menyampaikan keluhan atau aduan terkait dengan layanan kebutuhan program dan bantuan jaminan sosial melalui aplikasi Sistem Informasi Rumah Harapan (SIRAMAH).

3. MIE KERITING (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting)

Inovasi yang diusung oleh Kabupaten Kebumen melalui UPTD Puskesmas Kebumen 2 sebagai salah satu upaya mewujudkan Percepatan Penanganan Gangguan Tumbuh Kembang

Anak (Stunting) di Kabupaten Kebumen. Puskesmas Kebumen II berhasil menciptakan sebuah inovasi yaitu “MIE KERITING” (Makanan Instan Cegah Kerdil dan Stunting). Inovasi Mie Keriting merupakan makanan instan yang dibuat dari bahan utama ganyong dan kelor, serta bahan lain yang dibutuhkan sesuai konsep makanan beragam, bergizi, seimbang dan aman dengan konsep “ISI PIRINGKU”. Mie Keriting telah melalui uji laboratorium sebagai salah satu pertimbangan dalam pengembangan dan replikasi inovasi agar dapat menjangkau masyarakat yang lebih luas.

Inovasi ini telah mengalami pengembangan sejak diinisiasi pada Tahun 2020 yang awalnya berupa makanan tambahan yang diberikan langsung kepada balita berupa kue basah. mie basah. bubur dan lainnya kemudian berkembang menjadi camilan instan yang disukai anak-anak dalam bentuk mie instan. Selanjutnya pada Tahun 2022 MIE KERITING berkembang menjadi camilan sehat yang lebih bervariasi dengan bermacam-macam rasa yang disukai anak-anak. Untuk memperluas penerima manfaat. inovasi ini berkembang menjadi industri rumah tangga serta tengah memiliki Nomor Izin Berusaha (NIB), izin edar/P-IRT. Bentuk perlindungan atas kekayaan intelektual yang diberikan antara lain fasilitasi penerbitan sertifikat hak cipta, SK Gubernur Jateng atas Pemenang Inovasi, hak paten, serta MOU dengan BRIDA Jateng dalam pengembangan produk inovasi. Selain itu inovasi ini telah ditetapkan sebagai Top 45 Nasional Inovasi Pelayanan Publik pada Tahun 2023, dan menjadi Top Inovasi Pelayanan Publik kelompok keberlanjutan Tahun 2024.

Makanan instan dari inovasi mie keriting ini dapat di replikasi di seluruh wilayah sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dengan melibatkan kader kesehatan desa bekerjasama dengan promkes dan program gizi kemudian diolah oleh kader menjadi PMT dan diberikan pada balita pada kegiatan posyandu. Sasaran utama pemberian PMT ini adalah balita yang mempunyai berat dan tinggi badan kurang. Selain itu juga melakukan pembinaan pada kelompok PKK desa yang anggotanya termasuk kader desa untuk mengolah mie keriting ini menjadi sediaan instan yang disukai oleh anak-anak seperti coco crunch dan bit mie kemudian dikemas sedemikian rupa untuk dijual dan menambah pendapatan desa. Pemasaran mie keriting ini akan dilaksanakan melalui koperasi, bumdes dan toko-toko makanan yang ada di Kebumen. MIE KERITING sebagai peluang baru untuk pengembangan produk yang bermanfaat untuk pencegahan stunting dan untuk menunjang pertumbuhan balita, atau sebagai alternatif Pemberian Makanan Tambahan (PMT) sebagai pencegahan stunting. Inovasi ini diharapkan menjadi pioner munculnya inovasi-inovasi baru dalam penanganan stunting di Kabupaten Kebumen.

4. Transformasi Penataan Ruang Terbuka Publik dalam Kerangka Pertumbuhan Ekonomi yang Berkelanjutan dan Inklusif

Kabupaten Kebumen menghadapi berbagai permasalahan yang membutuhkan penanganan diantaranya angka kemiskinan yang masih cukup tinggi. Kabupaten Kebumen memiliki potensi yang sangat besar dari sektor ekonomi berupa geliat usaha mikro, kecil

menengah dan besar yang mampu menggerakkan pertumbuhan ekonomi wilayah. Hal ini terlihat dari perubahan struktur ekonomi Kabupaten Kebumen yang mengalami pergeseran dari sektor pertanian ke sektor industri pengolahan, meskipun nyatanya belum mampu secara optimal mengentaskan masyarakat dari bawah garis kemiskinan. Permasalahan kemiskinan antara lain terlihat dari masih rendahnya tingkat pendapatan, belum tersedianya peluang usaha yang memadai, serta masih minimnya ruang publik yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai aktivitas dan interaksi masyarakat termasuk aktivitas ekonomi.

Kabupaten Kebumen merupakan wilayah dengan jumlah penduduk sebesar 1,3 juta jiwa yang membutuhkan ruang publik terbuka dan inklusif pada Kawasan Perkotaan untuk melakukan berbagai aktivitas termasuk olahraga, hiburan, kesenian, sosial dan kebudayaan, kemasyarakatan, dan lain-lain. Saat ini Kabupaten Kebumen memiliki beberapa ruang publik yaitu stadion olahraga, taman kota, alun-alun kota, hutan kota dan taman rekreasi dan olahraga. Pemilihan titik awal penataan adalah kawasan perkotaan karena selama ini kawasan perkotaan Kebumen menjadi salah satu ruang publik untuk masyarakat berekreasi, olahraga, dan melakukan aktivitas ekonomi, maupun sosial budaya sehingga kawasan perkotaan Kebumen menjadi lokus favorit para penyelenggara atraksi pariwisata dan pelaku ekonomi kreatif.

Mendasari hal tersebut, Kabupaten Kebumen melakukan inovasi penataan ruang terbuka publik sebagai bagian dari pengembangan pusat ekonomi yang berkelanjutan dan inklusif. Inovasi yang dilakukan adalah melalui revitalisasi dan penataan ulang infrastruktur ruang terbuka publik yang ada sehingga tetap mampu berperan sebagai ruang terbuka publik yang inklusif, sekaligus memperluas fungsi sebagai sarana berbagai aktivitas seperti olahraga, kesenian, ekonomi serta sosial budaya.

Mendasari letak dan fungsinya yang strategis telah dibangun Koridor Perkotaan Kebumen, Moro Soetta di sepanjang ruas Jalan Soekarno-Hatta yang dulunya disebut Jalan Pahlawan, hingga Jalan Merdeka di seputaran Alun-alun Kebumen, dilanjutkan sepanjang Jalan Sutoyo hingga terhubung ruas Jalan Kusuma yang berada di pusat perkotaan Kebumen mempunyai nilai fungsi dan aksesibilitas sosial ekonomi yang tinggi sebagai poros pertumbuhan ekonomi. Kondisi sebelum dilakukan revitalisasi infrastruktur, koridor perkotaan Kebumen kurang representatif keberadaannya, ruas jalan tersebut belum mampu mawadahi perkembangan aktivitas perekonomian dan sosial masyarakat. Permasalahan yang timbul diantaranya drainase yang kurang lancar sehingga terjadi genangan pada waktu hujan, parkir di kedua bahu jalan, pergerakan transportasi lambat, spesifikasi trotoar yang kurang nyaman sebagai pedestrian, banyaknya PKL dan ruang terbuka hijau (RTH) yang terbatas. Ketersediaan ruang publik diharapkan akan mampu mendorong tumbuhnya aktivitas ekonomi dan sosial masyarakat yang dapat mendukung terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kebumen. Ruang publik diharapkan menjadi wadah interaksi antara Pemerintah, masyarakat dan pelaku bisnis.

Inovasi ini berupaya menawarkan sudut pandang baru kepada masyarakat tentang pemanfaatan ruang publik. Masyarakat yang selama ini memiliki kebutuhan terhadap ruang dan menuntut akan pemenuhannya (pusat aktivitas masyarakat dan gedung kesenian) ditawarkan dengan konsep pemanfaatan ruang publik terbuka untuk memenuhi berbagai kebutuhannya tersebut. Caranya adalah dengan mengubah bentuk, desain, tampilan dan peruntukannya sehingga sesuai dengan kebutuhan akan ruang publik yang ada.

Karena sifatnya yang terbuka, maka ruang publik ini juga akan mampu menopang berbagai aktivitas yang sifatnya lebih massif, utamanya dalam mewadahi berbagai aktivitas ekonomi masyarakat, penciptaan peluang usaha dan peningkatan pendapatan. Penciptaan bangunan iconic dan pusat informasi pariwisata/geopark juga diharapkan akan mampu menjadi daya tarik wisata baru, meningkatkan kedatangan wisatawan baik dari dalam maupun luar daerah yang berujung pada meningkatnya peredaran uang dalam masyarakat secara berkelanjutan. Selain itu ruang publik diharapkan dapat menjadi pusat kegiatan luar ruang seperti pelaksanaan event baik lingkup lokal, regional, nasional dan bahkan internasional. Sebagai pusat kegiatan olahraga, maupun ruang kolaborasi pemuda dan pelaku ekonomi kreatif.

5. Pengembangan Agrobisnis Melalui Corporate Farming

Pertanian merupakan salah satu sektor utama dalam perekonomian Kabupaten Kebumen, meskipun sektor ini belum mampu menjadi sektor andalan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat terutama yang bekerja di sektor pertanian. Beberapa masalah dalam sektor pertanian antara lain rendahnya kualitas SDM petani sehingga tingkat adopsi teknologi dan inovasi rendah, terdapat inefisiensi dalam pengelolaan produksi karena kurangnya skala usaha karena pengelolaan lahan pertanian yang sempit yaitu kurang dari 0,25 Ha, produktivitas yang rendah, dan permasalahan manajemen usaha dan akses pemasaran.

Konsep *corporate farming* diharapkan menjadi salah satu solusi untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani. *Corporate farming* adalah suatu bentuk kerjasama ekonomi dari sekelompok petani dengan orientasi agribisnis melalui konsolidasi pengelolaan lahan untuk meningkatkan efisiensi usaha dan manajemen. Keberadaan *Corporate Farming* diharapkan dapat memberikan keuntungan tersendiri bagi petani yang tergabung dalam manajemen *Corporate*, seperti solusi terkait hambatan permodalan, teknis budidaya, penerapan teknologi, dan pemasaran. Selain itu, *Corporate Farming* dapat membuka kesempatan hilirisasi dan kemitraan dari berbagai stakeholder, serta masyarakat Kebumen secara umum selaku konsumen dari produk hasil *Corporate Farming* tersebut. Secara khusus, pelaksanaan *Corporate Farming* yang ditumbuhkan dan dikembangkan di Kabupaten Kebumen fokus pada sisi hulu, sehingga perlu mengintegrasikan kelembagaan kelompok tani/Gapoktan/ Kelompok Usaha Bersama dalam suatu manajemen korporasi yang mengelola lahan petani yang menyerahkan lahan sawahnya untuk dikelola oleh manajemen korporasi. Selain penguatan kelembagaan kelompok tani dalam manajemen *Corporate Farming*, manajemen mekanisasi untuk mendukung pelaksanaan penumbuhan dan pengembangan

Corporate Farming perlu ditingkatkan. Oleh karena itu, revitalisasi kelembagaan Usaha Pelayanan Jasa Alsintan (UPJA) dan Brigade Alsintan menjadi fokus pembinaan dan pendampingan secara terpadu. Tujuan jangka panjang dari *corporate farming* adalah untuk mewujudkan suatu usaha pertanian yang mandiri, berdaya saing dan berkesinambungan melalui pengelolaan lahan secara korporasi.

Pilot project corporate farming pada MT 1 Tahun 2023 dan MT 2 Tahun 2024 dilaksanakan di 13 desa, 8 kecamatan dengan 13 kelompok tani dengan luasan 83 hektar. Adapun hproduktivitas pada lokasi percontohan tersebut rata-rata pada MT 1 Tahun 2023 sebesar 59,79 dan rata-rata pada MT 2 Tahun 2024 sebesar 67,72. Pemerintah Kabupaten Kebumen bermitra dengan PT Aneka Usaha Kebumen Jaya untuk memberikan bantuan pinjaman penyediaan sarana produksi pertanian, sebagai *off taker* Gabah Kering Panen (GKP) Kelompok Tani pelaksana *corporate farming*. PT Aneka Usaha Kebumen Jaya juga bekerjasama dengan PT Food Station Tjipinang Jaya untuk mendukung akses pemasaran hasil kelompok tani. Hasil serapan GKP kelompok tani digunakan untuk mendukung gerakan pangan murah (GPM) sebagai salah satu upaya pengendalian inflasi yang dilaksanakan di Kabupaten Kebumen. Setidaknya pada September 2024 penyerapan Gabah sebanyak 43,99 ton (GKP) di lokasi *corporate farming* dan mendukung 60% penyediaan beras untuk pelaksanaan program GPM yang dilaksanakan sebanyak 366 kali selama Tahun 2024 di 26 Kecamatan di Kabupaten Kebumen.

Selain pada komoditas padi, *corporate farming* juga diterapkan pada komoditas jagung pada MT 2 Tahun 2024 di 3 desa pada 3 kecamatan di Kabupaten Kebumen dengan masing-masing lokasi seluas 5 Hektar. Untuk akses pemasaran jagung, Pemerintah Kabupaten Kebumen menjalin kemitraan dengan PT Semar Sakti di Brebes dan PT Seger Agro Nusantara di Gresik yang menjadi *offtaker* jagung di Kabupaten Kebumen. Setidaknya terserap sebesar 29.176 ton jagung pada Tahun 2024.

6. Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan

Gerakan pengendalian harga pangan dilatar belakangi oleh peningkatan indeks perkembangan harga (IPH) di Kabupaten Kebumen yang terus meningkat terutama di komoditas beras, cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan gula pasir. Kenaikan bahan pangan ini akan berpengaruh terhadap daya beli masyarakat. dan secara tidak langsung akan mempengaruhi garis kemiskinan. Sebagai salah satu upaya dalam pengendalian inflasi di Kabupaten Kebumen, dilaksanakan secara terintegrasi dari sisi hulu hingga hilir sinergi antara Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen melalui Perangkat Daerah terkait dengan ketahanan pangan dan perdagangan, Bulog, BUMD Aneka Usaha Kebumen Jaya dan stakeholder lainnya. Upaya ini sejalan dengan arahan Pemerintah terkait aksi dan kebijakan terkait pengendalian inflasi pangan salah satunya dengan pelaksanaan gerakan pangan murah,

pemberian bantuan pangan, pengawasan keamanan dan mutu pangan, dan edukasi pola konsumsi pangan B2SA.

Terobosan yang dilakukan Pemerintah adalah dengan meluncurkan program prioritas kolaboratif yang mengintegrasikan dari sisi hulu hilir pertanian dan distribusi barang untuk meningkatkan ketahanan pangan dan pengendalian harga, stabilitas inflasi dan pengurangan kemiskinan melalui program Gerak Seruni (Gerakan Pengendalian Harga Pangan Dukung Stabilitas Inflasi dan Penurunan Kemiskinan). Implementasi program Gerak Seruni di sisi hulu yaitu dengan penerapan teknologi CSA (*Climate Smart Agriculture*) dan sistem tanam jajar legowo di 580 ha yang kemudian berkembang menjadi *corporate farming* di 6 kecamatan dengan produktivitas sebesar 10-12 ton Gabah Kering Giling (GKG) per Ha. Penerapan *off season* dengan tanaman padi biofortifikasi seluas 1000 Ha, pemanfaatan teknologi pompanisasi, penyediaan pupuk dan benih serta peningkatan ketahanan pangan keluarga melalui pekarangan pangan lestari. Pada sisi hilir yang dilaksanakan antara lain menjaga stabilitas harga melalui gerakan pangan murah dan pasar mitra tani secara masif sebanyak 108 kali di tahun 2024, operasi pasar beras dan minyak di pasar tradisional, subsidi harga pangan strategis di tingkat konsumen sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2023 yaitu untuk komoditas beras, minyak goreng, gula pasir dan bawang putih, membentuk Toko SPHP yaitu toko mitra bulog, mendirikan kios BUMD Aneka Usaha sebagai penyedia beras SPHP dan komoditas pangan dengan harga di bawah harga pasar. Selanjutnya adalah menjaga stabilitas harga di tingkat produsen melalui dana talangan pangan, BUMD sebagai *off taker* gabah petani terutama hasil dari peserta *corporate farming* dengan harga beli sesuai dengan standar harga pemerintah, dan melalui lumbung pangan di kecamatan rawan pangan. Selain itu penguatan stok komoditas strategis penyumbang inflasi, pemantauan harga komoditas pangan melalui aplikasi SIMBOK, penguatan pemanfaatan data dan informasi harga dan untuk mengetahui ketersediaan komoditas dan implementasi pencegahan pemborosan pangan.

Program ini diharapkan mampu mendukung ketersediaan pasokan komoditas, stabilitas inflasi dan keterjangkauan harga, menjaga daya beli konsumen dan meningkatkan kesejahteraan petani. Implementasi program ini mendapatkan apresiasi dari Pemerintah Pusat dengan diterimanya anugerah penghargaan predikat Terbaik 1 Nasional pada Program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Awards dari Badan Pangan Nasional, dan TPID Kabupaten/Kota Berprestasi Kawasan Jawa Bali 2024 dari Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

1.2. Prestasi Daerah Tahun 2024

Upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Kebumen dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan pembangunan manusia dan pelayanan publik telah menghasilkan penghargaan-penghargaan sebagai berikut:

1. Peraih Nilai IKPA Terbaik ketiga Kategori Satker Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan dari Kementerian Perdagangan RI
2. Piagam Perhargaan atas Persentase Tertinggi Terbentuknya Tim Pencegahan dan Penanganan di Satuan Pendidikan dari BBPMP Provinsi Jawa Tengah
3. Penghargaan Baznas Award: kategori Kepala Daerah Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik dari Baznas RI
4. HPN Jateng Award 2024 dari Berlian Organizer / Diskominfo Jateng
5. Adipura Kencana 2023 dari KLHK
6. Anugerah Media Center 2024 Kategori Kab/Kota Kolaborator Terbaik Pengelolaan Konten Audio Visual dari Kemenkominfo
7. Hassan Wirajuda Award: Kategori Mitra Kerja Kementrian Luar Negeri di Daerah Kepada Pemerintah Kabupaten Kebumen Tahun 2023 dari Kementerian Luar Negeri
8. Penghargaan Festival Literasi Nasional: Kategori Pemerintah Daerah sebagai Mitra yang aktif dalam pengembangan literasi daerah dari Founder Nyalanesia
9. Anugerah Inovasi Pembangunan Terpuji Bidang Peningkatan Mutu Pendidikan dari detik.com
10. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD 2023 dari Badan Pemeriksaan Keuangan
11. Penghargaan Pengelola Arsip Terbaik Nasional 2023 dari ANRI
12. TPID Awards dari Kemenko Bidang Perekonomian
13. Anugerah Merdeka Belajar 2024 Kategori Transformasi SDM Pendidikan dari Kemendikbudristek
14. SPHP Award Terbaik 1 Nasional dari Badan Pangan Nasional
15. Penghargaan Kematangan UKPBJ Level 3 (Proaktif) dari LKPP RI
16. UHC Award 2024 dari Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI
17. CNN Indonesia Award 2024 kategori Best Innovative Leadership dari CNN